

**EFEKTIVITAS PENDIDIKAN LALU LINTAS PADA
ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**NURHAENI
4616103041**



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Efektifitas Pendidikan Lalu Lintas Pada Anak Usia

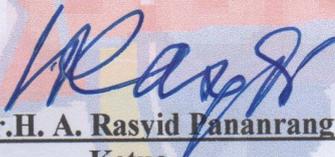
Dini Di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan

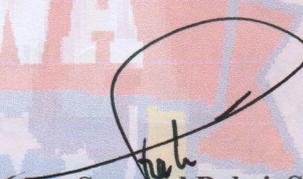
Nama Mahasiswa : Nurhaeni

NIM : 4616103041

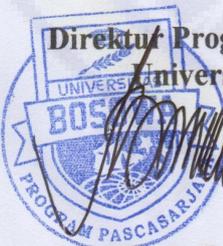
Program Studi : Administrasi Publik

Menyetujui,
Komisi Pembimbing:


Prof. Dr. H. A. Rasyid Pananrangi, SH., M.Pd.
Ketua

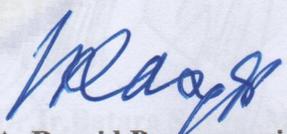

Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si.
Anggota

Mengetahui:


Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bosowa

Prof. Dr. Ir. Batara Surya., M.Si.

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik


Prof. Dr. H. A. Rasyid Pananrangi, SH., M.Pd.

HALAMAN PENERIMAAN

**EFEKTIFITAS PENDIDIKAN LALU LINTAS
PADA ANAK USIA DINI DI DITLANTAS
POLDA SULAWESI SELATAN**

Pada Hari/Tanggal :
Tesis atas nama : Nurhaeni
NIM : 4616103041

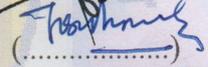
Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Administrasi Publik.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof.Dr.H.A.Rasyid Pananrangi,M.Pd.
Sekertaris : Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si.
Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.S.
2. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd.



(.....)



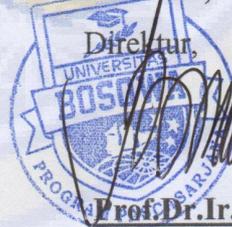
(.....)



(.....)

Makassar,

2019




Prof.Dr.Ir.Batara Surya,M.Si.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

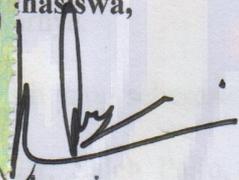
Tidak ada kata yang pantas peneliti ucapkan selain Syukur Alhamdulillah, peneliti sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kepada peneliti sehingga tesis ini dapat di selesaikan dengan baik dalam waktu yang telah di rencanakan. Dalam penelitian ini, peneliti banyak mendapatkan motivasi, bimbingan dan bantuan dari Bapak Prof. Dr. Andi Rasmy Panarung, SH, M.Pd selaku pembimbing I, dan Bapak Prof. Dr. Saiful Hidayat, SH, selaku pembimbing II. Bapak Prof. Dr. Ir. Bahara Surya, M.Eng, selaku Wakil Dekan, dan Bapak Prof. Dr. Andi Rasmy Panarung, SH, selaku Kepala Prodi, serta Bapak Prof. Dr. Saiful Hidayat, SH, selaku Direktur PPS Unitas yang telah banyak memberikan penyediaan studi peneliti. Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan transformasi ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh para dosen selama kuliah di PPS Ilmu Administrasi Publik. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Kepala Pokes Kabupaten Kepulauan Setayar dan jajarannya.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2019

....., mahasiswa,




Nurhaeni
NIM 4616103041

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas peneliti ucapkan selain Syukur Alhamdulillah, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nyalah kepada peneliti sehingga tesis ini dapat di selesaikan dengan baik sesuai batas waktu yang telah di rencanakan.

Dalam penelitian ini, peneliti banyak mendapatkan motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagi pihak, terutama dari Bapak Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, SH., M.Pd. selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Syamsul Bahri, M.Si. selaku pembimbing II, Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si. Direktur PPs Unibos, Bapak Syamsul Bahri, M.Si. Asisten Direktur PPs Unibos dan penguji, serta Bapak Prof. Dr. Andi Rasyid Pananrangi, SH, M.Pd, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan penguji, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dorongan, saran yang konstruktif. Oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Demikian juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat masing-masing: Bapak Prof. Dr. Saleh Pallu, M.Eng. Rektor Unibos, Para wakil Rektor Unibos dan seluruh Dosen serta Staf Administrasi PPS Unibos yang telah membantu proses penyelesaian studi peneliti.

Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan transformasi ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh para dosen selama kuliah di PPs Ilmu Administrasi Publik. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Kepala Polres Kabupaten Kepulauan Selayar dan jajarannya,

serta Kepala Sekolah TK se-Kabupaten Kepulauan Selayar dan jajarannya. Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada para guru yang sudah menjadi informan peneliti untuk pengembangan kajian ilmu pengetahuan demi mendukung penggalan potensi kecerdasan generasi muda di masa mendatang.

Kepada rekan-rekan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang tak henti-hentinya memberi motivasi, dukungan, dan kerjasamanya sehingga dapat menyelesaikan studi, peneliti menyampaikan banyak terima kasih.

Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh anggota keluarga, Ayahanda, Ibunda, bapak mertua, Ibu mertua, suami, dan putra putraku, serta seluruh anggota keluarga lainnya yang dengan penuh kesabaran memberi semangat, saran dan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan kuliah dengan baik dan lancar.

Harapan peneliti, semoga motivasi, bimbingan, dan bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang memungkinkan selesainya penelitian dan penyusunan disertasi, bernilai ibadah sehingga memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Makassar, Agustus 2019

Nurhaeni

ABSTRAK

NURHAENI. *Efektivitas Pendidikan Lalu Lintas pada Anak Usia Dini di Kabupaten Kepulauan Selayar*. (dibimbing oleh Andi Rasyid Pananrangi, selaku pembimbing I, dan Syamsul Bahri, sebagai Pembimbing II).

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi pendidikan lalu lintas anak usia dini, sehingga hasil proses pendidikan dapat berkontribusi konstruktif secara signifikan terhadap perkembangan psikomotorik murid.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian fenomenologi dan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi: (1) Staf pengajar dari pihak Polres Kabupaten Kepulauan Selayar, dan tenaga pengajar dari TK Kabupaten Kepulauan Selayar. (2) Pengabsahan data menggunakan: *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*. dan (3) Analisis data yaitu: koleksi data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Deskripsi konten pendidikan anak usia dini, indikator: (a) Kurikulum pembelajaran, implementasi peraturan perundangan PAUD untuk anak masih sangat terbatas, dan (b) Lingkup materi pembelajaran, dilakukan dengan memperhatikan landasan, prinsip, dan pendekatan pengembangan kurikulum, (2) Realitas proses pendidikan anak usia dini, indikator: (a) Persiapan pembelajaran, Komunikasi pembelajaran belum sepenuhnya berjalan baik, efektif dan maksimal, Sumber daya, standar kualifikasi pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan belum memenuhi standar, Sikap pelaksana, memiliki komitmen namun masih perlu diikuti dengan agenda sosialisasi., dan Struktur birokrasi, implementasi kebijakan program PAUD belum sepenuhnya berjalan efektif dan maksimal. dan, (b) Implementasi program pembelajaran, belum terlaksana dengan baik, efektif dan maksimal, dan (3) Evaluasi hasil pendidikan anak usia dini, diukur oleh indikator: (a) Peningkatan mutu pembelajaran, Pengelolaan kelas, belum signifikan yang dibuktikan dengan kurang penguasaan materi pelajaran oleh siswa dan kurang mampu mempraktekkannya, Penggunaan media dan sumber belajar, siswa sangat antusias dan fokus ketika guru menggunakan media ajar, Penggunaan metode pembelajaran, cara memotivasi siswa dan adanya kompetisi untuk lebih aktif, dan Penilaian hasil pembelajaran, belum efektif dan proporsional, dan, (b) Pendokumentasi hasil pembelajaran, belum memiliki Sistem Informasi Manajemen dan fasilitas *Information and Communi-cation Technology* untuk proses penyelenggaraan pendidikan.

Kata Kunci: Konten, proses, evaluasi hasil Pendidikan lalu lintas.

ABSTRACT

NURHAENI. *Effectiveness of Traffic Education in Early Childhood in Selayar Islands Regency*. (guided by Andi Rasyid Pananrangi, as mentor I, and Syamsul Bahri, as Advisor II).

The aim of the study was to analyze the implementation of early childhood traffic education, so that the results of the educational process can contribute significantly constructively to students' psychomotor development.

The research method uses a type of phenomenological research and a qualitative research approach. Data collection is done through: observation, interviews and documentation. Research informants included: (1) Teaching staff from: the Selayar Islands District police station, and teaching staff from TK Selayar Regency Kindergarten. (2) Validation of data using: credebility, transferability, dependability and confirmability. and (3) Analysis of data, namely: data collection, data condensation, data presentation, and conclusion.

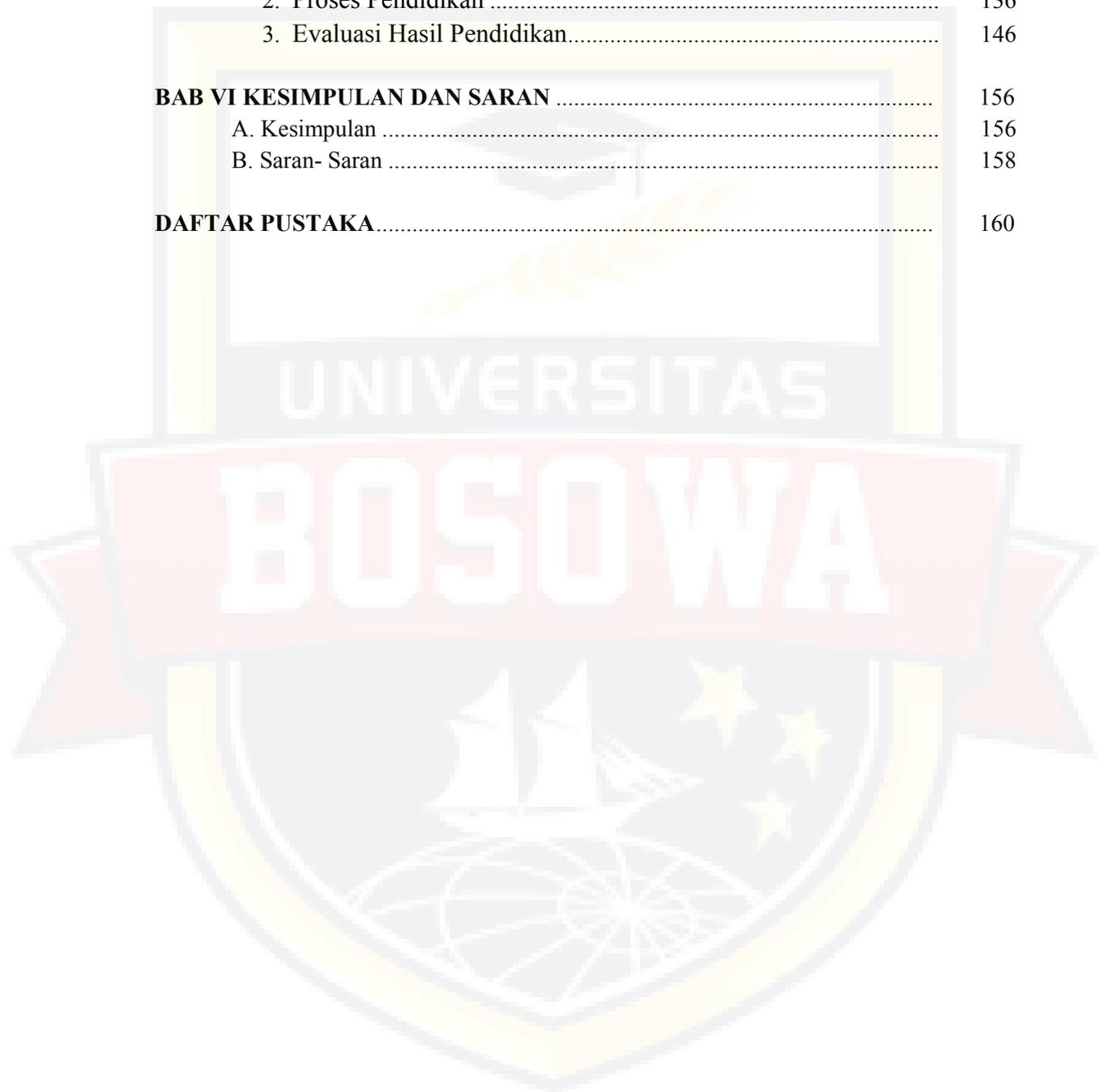
The results of the study show that: (1) Description of early childhood education content, indicators: (a) Learning curriculum, implementation of early childhood education programs legislation for children is still very limited, and (b) Scope of learning material, carried out by observing the foundation, principles, and approaches curriculum development, (2) the reality of the early childhood education process, indicators: (a) learning preparation, learning communication has not fully run well, effectively and maximally, resources, educational qualification standards, educators and education personnel have not met standards, implementing attitudes, have commitment but still need to be followed by a socialization agenda, and the bureaucratic structure, the implementation of early childhood education programs, program policies has not been fully implemented effectively and maximally. and, (b) Implementation of learning programs, have not been implemented properly, effectively and maximally, and (3) Evaluation of the results of early childhood education, measured by indicators: (a) Improving the quality of learning, classroom management, not yet significant as evidenced by lack of mastery subject matter by students and less able to practice it, Use of media and learning resources, students are very enthusiastic and focused when teachers use teaching media, Use of learning methods, how to motivate students and the existence of competition to be more active, and Assessment of learning outcomes, not yet effective and proportional, and, (b) Documentation of learning outcomes, do not yet have a Management Information System and Information and Communication Technology facilities for the process of implementing education.

Keywords: *Content, process, evaluation of the results of traffic education*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN.....	
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP	11
A. Peregeseran Paradigma Ilmu Administrasi Publi	11
B. Hakekat Kebijakan Publik.....	21
C. Efektivitas Pembelajaran.....	27
D. Dinamika Pendidikan Lalu Lintas.....	28
E. Hasil Penelitian Terdahulu	32
H. Kerangka Konsep Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Desain dan Jenis Penelitian.....	39
B. Desain Penelitian.....	42
C. Sumber Data dan Infroman Penelitian.....	42
D. Deskripsi Fokus dan Indikator Fokus.....	43
E. Instrumen Penelitian	45
F. Teknik Pengumpulan dan Pengabsahan Data	46
G. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
A. Geografi, Administrasi dan Kondisi Fisik	50
B. Keadaan Demografi.....	54
C. Gambaran APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.....	57
D. Kondisi Pendidikan	58
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Hasil Penelitian	60
1. Konten Pendidikan.....	61
2. Proses Pendidikan	85

3. Evaluasi Hasil Pendidikan.....	105
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	123
1. Konten Pendidikan.....	123
2. Proses Pendidikan	136
3. Evaluasi Hasil Pendidikan.....	146
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran- Saran	158
DAFTAR PUSTAKA.....	160



DAFTAR SINGKATAN

APE	= Alat Permainan Edukatif (APE)
BOP	= Biaya Operasional Pembelajaran
KBM	= Kegiatan Belajar Mengajar
DAP	= <i>Developmentally Appropriate Practices</i>
GTK	= Guru dan Tenaga Kependidikan
PAUD	= Pendidikan Anak Usia Dini
PAUDNI	= Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal
PADU	= Pendidikan Anak Dini Usia
PBM	= Proses Belajar Mengajar
PNPB	= Penerimaan Negara Bukan Pajak
PTK	= Pendidik dan Tenaga Kependidikan
RKPS	= Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester
RPP	: Rencana Program Pembelajaran
Satker	= Satuan Kerja
SDM	= Sumber Daya Manusia
SIM	= Sistem Informasi Manajemen
SMM	= Sertifikat Manajemen Mutu
SOP	= <i>Standard Operational Procedure</i>
SWT	= Subhanahuwatala
TK	= Taman Kanak-Kanak
TQM	= <i>Total Quality Management</i>
TYME	= Tuhan Yang Maha Esa
TYME	= Tuhan Yang Maha Esa
UP3AD	= Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah
YMK	= Yang Maha Kuasa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lalu lintas merupakan salah satu sarana transportasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar arus lalu lintas masyarakat. Melalui sarana dan prasarana lalu lintas memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya untuk pemenuhan perekonomian masyarakat. Tanpa keamanan lalu lintas, dapat dipastikan kesulitan menuju tempat pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas.

Pentingnya transportasi tersebut tercerminkan pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobiltas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya (Kansil, dkk, 1995: 4).

Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dan mendominasi dalam lalu lintas yaitu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri. Misalnya, seorang pengemudi mobil waktu

hendak mendahului mobil yang ada di depannya, tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan sehingga menabrak pengendara lain.

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9000 (sembilan ribu) nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa 25 (dua puluh lima) orang tewas setiap hari atau ada 1 (satu) orang meninggal dunia di jalan raya setiap 57 (lima puluh tujuh) menit.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus mengembangkan potensi dan peran lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara. Kajian lalu lintas pada penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Selayar.

Dalam bidang keprasarana transportasi, sekarang ini telah dibangun jalan alternatif, jalan tol, jalan layang (satu tingkat), jalan di bawah tanah (*under pass*), jalan (terowongan). Teknologi transportasi makin maju, modern dan canggih. Pada dasarnya kemajuan teknologi transportasi memperlihatkan wajahnya dalam

peningkatan kecepatan (*faster speed*) dan memperbesar kapasitas muat (*bigger capacity*). Kondisi fasilitas transportasi yang disediakan dan dioperasikan, terutama dalam transportasi perkotaan, memperlihatkan perkembangan yang makin maju, modern dan canggih, (*transportation is always changing face*). Perubahan wajah transportasi menjadi lebih cantik dalam arti semakin efektif dan efisien. (Sasmita, 2011: 12).

Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Transportasi merupakan urat nadi bagi kehidupan perekonomian dan sosial. Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur, namun kinerja Polisi Lalu Lintas merupakan salah satu unsur penting dalam mengatur transportasi jalan raya agar terwujudnya suatu keamanan dan keselamatan lalu lintas.

Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, eksistensi polisi tengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya. (Atmasista, 2005: 127). Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas adalah “mengawasi lalu lintas”. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika cacat-cacat di dalam sistem jalan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, lalu lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali. Karena itu, tugas

pengawasan lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan, dan bahaya seminimal mungkin.

Untuk mencapai tujuan ini, para polisi yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan, bukan hanya mendeteksi titik-titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat (Cecil, 2011:28). Jadi, patroli lalu lintas adalah metode utama yang diterapkan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas lalu lintas atau mengawasi lalu lintas.

Penegakan hukum pidana merupakan sub sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan (*criminal justice system*). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Pasal 4 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tugas dan wewenang kepolisian adalah melakukan penegakan hukum dan sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diselenggarakan dengan tujuan: (1) terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu

menjunjung tinggi martabat bangsa; (2) terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan (3) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*), sebagai berikut: (1) Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan; (2) Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan; (3) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri; (4) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang teknologi; dan (5) Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan lalu lintas oleh Kepolisian Negara RI.

Dengan adanya pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab diharapkan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan kecelakaan lalu lintas kerap kali

terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak berjalan seperti apa yang diharapkan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Faktor penyebab yang memungkinkan terjadi kecelakaan lalu lintas adalah meningkatnya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat didukung dengan mudahnya kepemilikan kendaraan bermotor serta perkembangan sarana dan prasarana lalu lintas yang lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas. Peningkatan kepadatan lalu lintas disebabkan oleh ingginya/bertambahnya frekuensi kendaraan setiap tahunnya.

Rendahnya kesadaran berlalu lintas dan belum memadainya sarana prasarana pendukung menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas di Provinsi Sulawesi Selatan. Kesadaran berlalu lintas yang masih kurang dari masyarakat dan fasilitas jalan yang masih terbatas sementara kendaraan roda dua dan empat bertambah terus menyebabkan kemacetan tidak terhindarkan. Pada triwulan II 2018 kendaraan baru di Provinsi Sulawesi selatan sebanyak 51.016 unit, meningkat 12.118 unit atau sekitar

31 persen dibandingkan jumlah kendaraan baru pada triwulan I 2018 yang hanya sebesar 38.898 unit.

Menurut Kapolres Kabupaten Kepulauan Selayar (Faizal Herstan) bahwa sarana prasarana pendukung yang belum memadai merupakan penyebab utama kecelakaan di daerah ini. Salah satu sarana yang belum memadai adalah fasilitas jalan yang tidak sebanding dengan perkembangan kendaraan roda dan roda empat yang setiap tahun meningkat. Akibatnya banyak pengendara yang ugal-ugalan menyebabkan korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai 60 persen yang merupakan usia produktif. (Nurwahidah, wartawan, 2018, Tribunselayar.Com).

Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan menggelar kampanye keselamatan pelayaran tahun 2018 di Ruang Tunggu Pelabuhan Benteng Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Rabu (21/11/2017). Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Selayar. Dihadiri Kadishub Selayar Andi Baso, Kabid laut Selayar Andi Caco Amras, wakil KPLP Selayar Syamsul Bahri, para staf dishub Selayar, staf LLAJ bidang Lalu Lintas H, Edy Purnomo, staf Pelabuhan Benteng Selayar, staf Dishub, para peserta terdiri ABK kapal, pemilik kapal, buruh kapal dan syahbandar. Kadishub Selayar Andi Baso berharap kepada pemilik kapal nelayan, kapal penumpang agar mematuhi arahan-arahan dari pemerintah yang berwenang. Begitu juga terhadap regulator terkait standar keselamatan diperhatikan untuk setiap pemilik kapal penumpang, kapal penyebrangan dan kapal nelayan untuk senantiasa mengikuti arahan-arahan semua sektor yang terkait. (Nurwahidah, wartawan, 2017, Tribunselayar.Com).

Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Kabupaten Selayar yang terjadi selama periode Januari hingga pertengahan Desember 2017 tercatat 118 kasus. Jenis kendaraan yang dominan terlibat kasus kecelakaan adalah roda dua. Data itu sudah sesuai dengan rekap tim Lakalantas dan paling banyak motor yang mengalami kecelakaan Pjs. Kanit Lakalantas Polres Selayar (Faizal Herstan) kepada Tribun Selayar.com, Senin (18/12/2017).

Dari total kasus tersebut, korban meninggal dunia tercatat 9 orang, luka berat 3 orang, dan ratusan lainnya luka ringan. Total kerugian materil mencapai Rp 182 juta. "Kebanyakan kasus kecelakaan lalu lintas itu karena tidak memperhatikan penyebab kecelakaan. Karena anak masih di bawah umur yang seharusnya mengurangi kecepatan di perempatan jalan tapi tidak mengerti tentang aturan lalu lintas. Mereka tiba-tiba memasuki persimpangan tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan, dan tidak mementingkan keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Hal-hal tersebut bisa memudahkan terjadinya kecelakaan bagi diri dan orang lain.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk,

dan mudah terpancing oleh ulah orang lain sebagai pengguna jalan yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konten pendidikan lalu lintas anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Bagaimana proses pendidikan lalu lintas anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Selayar?
3. Bagaimana evaluasi hasil pendidikan lalu lintas anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi konten pendidikan lalu lintas anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pendidikan lalu lintas anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Selayar?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian pendidikan lalu lintas anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Selayar?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua sebagaimana penjelasan berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Publik, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lainnya untuk pengembangan ilmupengetahuan di masa akan datang bagi yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama dalam konsidi yang berbeda.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- a. Sebagai masukan kepada pemerintah daerah khususnya Polres Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Sebagai masukan terhadap Polres Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan kinerja kesatuan polisi lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pergeseran Paradigma Ilmu Administrasi Publik

1. *Old Public Administration*

Perspektif ini merupakan perspektif klasik, berkembang sejak tulisan Woodrow Wilson di tahun 1887 yang berjudul "*The Study of Administration*". Terdapat dua gagasan utama dalam perspektif ini. Gagasan pertama menyangkut pemisahan politik dan administrasi. Administrasi publik tidak secara aktif dan ekstensif terlibat dalam pembentukan kebijakan karena tugas utamanya adalah implementasi kebijakan dan pelayanan publik. Dalam menjalankan tugasnya, administrasi publik menampilkan netralitas dan profesionalitas. Administrasi publik diawasi oleh dan bertanggung jawab kepada pejabat politik yang dipilih (Saleh dan Muluk, 2005).

Gagasan kedua menyangkut nilai yang dikedepankan oleh perspektif ini, bahwa administrasi publik seharusnya berusaha sekeras mungkin untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Efisiensi ini dapat dicapai melalui struktur organisasi yang terpadu dan bersifat heirarkis. Gagasan ini terus berkembang melalui para pakar seperti Frederick Winslow Taylor (1947) dengan "*scientific management*", Leonard D. White (1958) dan W.F. Willoghby (1927) yang mengembangkan struktur organisasi yang sangat efisien, dan Gullick & Urwick (1937) yang sangat terkenal dengan akronimnya POSDCORB.

Dengan mengacu pada dua gagasan utama tersebut, perspektif ini menaruh perhatian pada fokus pemerintahan pada penyediaan layanan secara langsung kepada masyarakat melalui badan-badan publik. Perspektif ini berpandangan bahwa organisasi publik beroperasi paling efisien sebagai suatu sistem tertutup sehingga keterlibatan warga negara dalam pemerintahan dibatasi. Perspektif ini berpandangan pula bahwa peran utama administrator publik dibatasi dengan tegas dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan pegawai, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, dan penganggaran.

Selama masa berlakunya perspektif *old public administration* ini, terdapat dua pandangan utama yang lainnya yang berada dalam arus besar tersebut. Pertama adalah pandangan Simon (1984) yang tertuang dalam karya klasiknya yaitu "*administrative behavior*". Simon mengungkapkan bahwa preferensi individu dan kelompok seringkali berpengaruh pada berbagai urusan manusia. Organisasi pada dasarnya tidak sekedar berkenaan dengan standar tunggal efisiensi, tetapi juga dengan berbagai standar lainnya. Konsep utama yang ditampilkan oleh Simon adalah rasionalitas. Manusia pada dasarnya dibatasi oleh derajat rasionalitas tertentu yang dapat dicapainya dalam menghadapi suatu persoalan, sehingga untuk mempertipis batas tersebut manusia bergabung dengan lainnya guna mengatasi segala persoalannya secara efektif. Meski nilai utama yang hendak dijadikan dasar bertindak manusia adalah rasionalitasnya, namun Simon mengungkapkan bahwa dalam organisasi manusia yang rasional adalah yang menerima tujuan organisasi

sebagai nilai dasar bagi pengambilan keputusannya. Dengan demikian orang akan berusaha mencapai tujuan organisasi yang rasional dan menjamin perilaku manusia untuk mengikuti langkah yang paling efisien bagi organisasi. Dengan pandangan ini akhirnya posisi rasionalitas dipersamakan dengan efisiensi. Hal ini tampak dalam pandangan Denhardt dan Denhardt (2007:35) bahwa “*For what Simon called ‘administrative man’, the most rational behavior is that which moves an organization efficiently toward its objective.*”

Pandangan berbeda kedua dalam perspektif *old public administration* adalah *public choice* (pilihan publik). Pandangan ini merupakan penafsiran baru atas perilaku administrasinya Simon (2005), dan yang lebih dekat dengan *economic man*. Teori pilihan publik ini didasarkan pada tiga asumsi kunci.

Dengan alasan ini, teori pilihan publik menstrukturasi proses pembuatan keputusan sehingga dapat mempengaruhi pilihan-pilihan manusia. Hal ini merupakan kunci beroperasinya badan-badan publik. Teori pilihan publik inilah yang merupakan jembatan penghubung antara *old public administration* dengan *new public management*.

2. New Public Management

Perspektif ini berusaha menggunakan pendekatan sektor swasta dan pendekatan bisnis dalam sektor publik. Selain berbasis pada teori pilihan publik, dukungan intelektual bagi perspektif ini berasal dari *public policy schools* (aliran kebijakan publik) dan *managerialism movement*. Aliran kebijakan publik dalam beberapa dekade sebelum ini memiliki akar yang cukup kuat dalam ilmu ekonomi, sehingga analisis kebijakan dan para ahli yang

mengeluti evaluasi kebijakan terlatih dengan konsep *market economics*, *cost and benefit*, dan *rational models of choice*. Selanjutnya, aliran ini mulai mengalihkan perhatiannya pada implementasi kebijakan yang selanjutnya mereka sebut sebagai *public management*.

Penggunaan istilah yang berbeda ini dilakukan untuk membedakannya dari *public administration* dengan mengabaikan fakta bahwa keduanya memiliki perhatian yang sama, yakni implementasi kebijakan publik. Denhard dan Denhard (2007) mengakui bahwa *public administration* merupakan sinonim dengan *public management*, namun jika antara keduanya ada yang membedakannya maka istilah *public management* cenderung bias pada interpretasi ekonomi terhadap perilaku manajerial, sementara istilah *public administration* cenderung dipergunakan dalam ilmu politik, sosiologi, atau analisis organisasi.

Dukungan intelektual dari *managerialisme movement* berakar dari pandangan bahwa keberhasilan sektor bisnis dan publik bergantung pada kualitas dan profesionalisme para manajernya. Kemajuan dapat dicapai melalui produktivitas yang lebih besar, dan produktivitas ini dapat ditingkatkan melalui disiplin yang ditegakkan oleh para manajer yang berorientasi pada efisiensi dan produktivitas. Untuk memainkan peran penting ini para manajer harus diberi “*the freedom to manage*” dan bahkan “*the right to manage*”.

Secara praktek, gerakan manajerialis memperoleh pengaruh besar dalam reformasi administrasi publik diberbagai negara maju, seperti Selandia

Baru, Australia, Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris, reformasi administrasi publik dijalankan sejak masa PM Margaret Thatcher. Dukungan intelektual dalam gerakan ini di Inggris tampak dari karya Emmanuel Savas (2000) dengan "*privatization*"-nya, Norman Flynn (1990) dengan "*Public Sector Management*". Di Amerika Serikat, gerakan ini memperoleh popularitas besar berkat karya terkenal Osborne dan Gaebler, berjudul *Reinventing Government* (2000). Gerakan ini menyebar ke seluruh dunia sehingga menjadi inspirasi utama dibanyak negara dalam mereformasi administrasi publik baik dengan melakukan privatisasi gaya Inggris atau dengan gaya mewirausahakan birokrasi gaya Amerika Serikat.

Perspektif ini menekankan penggunaan mekanisme dan terminologi pasar sehingga memandang hubungan antara badan-badan publik dengan pelanggannya sebagai layaknya transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Peran manajer publik berubah karena ditantang untuk selalu menemukan cara-cara baru dan inovatif dalam mencapai tujuan, atau menswastakan berbagai fungsi yang semula dijalankan pemerintah. Manajer publik didesak untuk "mengarahkan bukannya mengayuh", yang bermakna bahwa beban pelayanan publik tidak dijalankan sendiri tetapi sebisa mungkin didorong untuk dijalankan oleh pihak lain melalui mekanisme pasar. Dengan demikian, manajer publik memusatkan perhatian pada akuntabilitas pada pelanggan dan kinerja tinggi, restrukturisasi badan-badan publik, mendefinisikan ulang misi organisasi, menyederhanakan proses administrasi, dan mendesentralisasi pembuatan keputusan.

Perbedaan antara manajemen publik baru dan model tradisional, dalam sistem penganggaran sektor publik tersebut antara lain:

Tabel 2.1. Perbedaan model manajemen publik baru dan model tradisional

Aspek	Manajemen Publik Baru	Administrasi Pemerintahan Tradisional
Nilai-nilai	Kewiraswastaan, Fleksibilitas, kreativitas, Pemerintah yang lebih kecil	Kebijaksanaan, stabilitas, kejujuran, Pemerintah yang lebih besar
Toleran Resiko	Mengambil resiko, Manajemen resiko	Menentang resiko
Akuntabilitas	Akuntabilitas untuk hasil, Nilai untuk uang	Proses akuntabilitas, efisiensi
Struktur	Desentralisasi, kerjasama, kontrak	Sentralisasi, hirarkis

Gambaran yang lebih utuh tentang perspektif *new public management* ini dapat dilihat dari pengalaman Amerika Serikat sebagaimana tertuang dalam 10 prinsip “*reinventing government*” karya Osborne & Gaebler.

3. *New Public Service*

Perspektik administrasi dari sudut pandang *Old Public Administration* (OPA), kemudian masuk ke dalam paradigam *New Public Management* (NPM), hingga ke paradigma *New Public Service* (NPS), semua melihat akuntabilitas tidak bisa dipisahkan dari paradigma administrasi.

Paradigma administrasi publik pada masa OPA yang menekankan kerja birokrasi dengan 2 (dua) gagasan utama. Gagasan *pertama* menyangkut pemisahan politik dan administrasi. Gagasan *kedua* menyangkut nilai yang dikedepankan oleh perspektif ini, bahwa administrasi publik seharusnya berusaha sekeras mungkin untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan mengacu pada dua gagasan utama tersebut, perspektif ini menaruh perhatian pada fokus pemerintahan pada penyediaan layanan secara

langsung kepada masyarakat melalui badan-badan publik. Perspektif ini berpandangan bahwa organisasi publik beroperasi paling efisien sebagai suatu sistem tertutup sehingga keterlibatan warga negara dalam pemerintahan dibatasi. Perspektif ini berpandangan pula bahwa peran utama administrator publik dibatasi dengan tegas dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan pegawai, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, dan penganggaran.

Berbeda dengan pandangan tersebut, dalam perkembangan selanjutnya muncullah paradigma baru yang disebut *new public management* (NPM). Perspektif ini menekankan penggunaan mekanisme dan terminologi pasar sehingga memandang hubungan antara badan-badan publik dengan pelanggannya sebagai layaknya transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Peran manajer publik berubah karena ditantang untuk selalu menemukan cara-cara baru dan inovatif dalam mencapai tujuan, atau menswastakan berbagai fungsi yang semula dijalankan pemerintah. Di Indonesia, khususnya disektor publik diimplementasikan melalui program kegiatan dengan sistem anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pola ini mengharuskan para pimpinan di organisasi publik untuk mengejar target pendapatan yang telah dibuat sebelumnya dengan menjual program-program yang seharusnya menjadi tugas negara untuk menyediakannya, seperti diklat teknis, diklat fungsional maupun diklat kepemimpinan. Orientasinya adalah keuntungan bagi negara karena menambah pendapatan non pajak.

Ketika paradigma NPM sudah mulai dirasakan lebih mengarah ke swastanisasi tugas-tugas dasar pelayanan pemerintah, maka muncullah paradigma baru yang dikenal dengan istilah *new public service*. Di Inggris ketika semua pelayanan dasar diswastakan seperti rumah sakit, maka setelah 15 tahun baru disadari tentang betapa menurunnya dan tidak berdayanya peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan dasar. Akibatnya masyarakat yang seharusnya dilayani dengan baik, khususnya hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan dasar bidang kesehatan sudah tidak dipenuhi lagi, kecuali dengan membayar sejumlah uang yang diluar kemampuan mereka. Di Amerika sebagaimana disiarkan dalam televisi memberitakan ada masyarakat yang terpaksa mengoperasi sendiri amandelnya, karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit yang sangat mahal.

Denhard and Denhard (2007) mencoba untuk menyeimbangkan pendekatan filosofis dan praktek dalam etika pelayanan publik. Denhard mendefinisikan etika administratif sebagai "suatu proses yang secara independen mengkritisi standar keputusan, berdasarkan inti nilai-nilai sosial yang diterapkan dan dalam batas kewajaran organisasi yang mengarah/mengacu pada pertanggungjawaban baik secara pribadi maupun profesional" (Denhard and Denhard 2007,26). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya adanya refleksi dan dialog dalam pengambilan keputusan yang etis. Dalam bukunya yang lain, (Denhard and Denhard 2007) ia memperluas pendapatnya ini untuk memperkuat pembentukan peranan administrator publik.

Manajemen Publik yang baru menekankan pendekatannya pada hal-hal seperti privatisasi, pengukuran kinerja, perencanaan strategis dan pendekatan manajerial lainnya. Kenyataannya, pendekatan ini memiliki implikasi dalam efisiensi pelaksanaan pemerintahan. Christopher Hood menulis bahwa manajemen publik yang baru bergerak dari model tradisional yang melegitimasi birokrasi publik, seperti perlindungan prosedural terhadap kewenangan administratif, untuk mendukung "kepercayaan terhadap metode pasar dan usaha swasta...., ide tersebut ditulis dalam lingkup rasionalisasi ekonomi" (Hood 1995,94).

Berbeda dengan manajemen publik yang baru, Denhard & Denhard (2007). *The New Public Service: Serving, not Steering* berpijak dalam kerangka teoritis yang lebih mendalam. Denhardt & Denhardt "menolak gagasan penciptaan kembali, manajemen publik yang berorientasi pada pasar". Bahkan, mereka menawarkan adanya penyatuan dasar-dasar peranan administrasi publik dalam pemerintahan. Paradigma ini berpendapat bahwa seharusnya negara juga harus menjadi lebih kuat dan menyediakan bentuk-bentuk pelayanan dasar yang justru gratis sehingga bisa dinikmati dan dirasakan hasil kerja pemerintahan.

Berdasarkan gagasan dari pakar, maka peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan teori administrasi publik terdiri dari tiga tahap, yaitu: (1) Paradigma *Old Public Administration* (OPA) yang menekankan pembangunan birokrasi profesional, dan penerapan aturan dan standarisasi secara tegas untuk mendorong efisiensi dan efektifitas; (2) Paradigma *New Publik*

Managemant (NPM) didasarkan pada teori pasar dan budaya bisnis yang ditransformasi ke dalam organisasi sektor publik; dan (3) Paradigma *New Public Service* (NPS) menekankan pada pemberian pelayanan masyarakat dengan memperhatikan standar norma, dan nilai-nilai.

Atas dasar paradigma administrasi publik di atas menunjukkan administrasi publik setiap saat senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman, peradaban dan teknologi. Berbagai aspek administrasi sebenarnya telah ada dan dijalankan semenjak peradaban manusia mulai terstruktur.

Pemikiran dalam administrasi yang berkembang sangat dipengaruhi oleh paham-paham demokrasi, seperti administrasi yang partisipatif, yang menempatkan administrasi di tengah-tengah masyarakat dan tidak terisolasi darinya. Pemikiran ini selain ingin menempatkan administrasi sebagai instrumen demokrasi, juga mencoba menggunakan administrasi sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat bawah. Implikasi lain dari pemikiran tersebut adalah sistem administrasi memiliki dimensi ruang dan daerah yang penyelenggaraannya juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi. Kesemua itu menuntut reorientasi peranan administrasi publik.

Upaya merevitalisasi ilmu administrasi pada tahun 1965, Waldo (2004) memprakarsai pertemuan sejumlah pakar muda ilmu administrasi, untuk mempelajari masalah-masalah konseptual yang dihadapi ilmu administrasi, dan berusaha memecahkannya. Perkembangan yang melahirkan dorongan untuk meningkatkan desentralisasi dan mendekatkan pelayanan

kepada masyarakat. Kesemua itu menandakan bergulirnya gerakan administrasi publik baru (*new publik administration*).

Pada dasarnya administrasi publik baru ingin mengetengahkan bahwa administrasi tidak boleh bebas nilai dan harus menghayati, memperhatikan, serta mengatasi masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Frederickson (2003), seorang pelopor gerakan administrasi publik baru lebih tegas lagi menyatakan bahwa administrasi publik harus memasukkan aspek pemerataan dan keadilan sosial (*social equity*) ke dalam konsep administrasi. Beliau bahkan menegaskan bahwa administrasi tidak dapat netral.

B. Hakekat Kebijakan Publik

1. Paradigma Kebijakan Publik

Membahas konsep kebijakan publik (*public policy*), ada beberapa pendapat dari para ahli ilmu kebijakan yang dapat dianalisis diantaranya Mustopadidjaja (2003) mengemukakan bahwa kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu sistem kelembagaan dalam membuat kebijakan publik, melalui 4 (empat) elemen: (1) Masalah kebijakan publik, (2) Pembuatan kebijakan publik, (3) Kebijakan publik, dan (4) Dampak kebijakan publik terhadap kelompok sasaran (*target groups*). Selanjutnya Mustopadidjaja mengatakan bahwa sebagai sistem kebijakan publik dikenal ada 3 (tiga) unsur, yaitu: *input*, proses, dan *output* yang diproses secara politis.

Kemudian Peterson (2003) menyatakan; kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi (mengatasi)

masalah. Laswell & Kaplan (1956) dalam Dye, (1998) lebih menekankan bahwa kebijakan publik merupakan suatu pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat yang dijalankan pemerintah. Sedangkan E. Latham dalam Agustino (2007) menegaskan bahwa kebijakan publik adalah keadaan seimbang yang tercapai dalam perjuangan antar kelompok kepentingan pada waktu tertentu dan mencerminkan keseimbangan setelah kelompok kepentingan berhasil mengarahkan kebijakan publik kepada yang menguntungkan mereka.

Sedangkan Anderson (1990) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Suatu kebijakan publik itu ditetapkan oleh lembaga-lembaga dan aparat pemerintah.

Hampir senada dengan pendapat Dimock & Dimock dalam Islamy (2007) bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok masyarakat atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.

Menurut Birkland (2001) bahwa kebijakan publik pada umumnya merupakan apakah pemerintah melakukan tindakan yang merujuk kepada pilihan, dan apakah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan atas program yang telah dipilih. Hal ini dapat disarankan sebagai suatu definisi yang dapat dilihat secara nyata tetapi hal tersebut secara kompleks dapat dibandingkan dengan

definisi secara simpel. Berkenaan dengan itu, maka dapat ditegaskan bahwa kebijakan ialah apa yang harus dilakukan pemerintah yang merupakan suatu kebijakan yang paling intens, atau yang dapat dilaksanakan sebagaimana hukum, aturan, perkembangan, keputusan ataukah hal-hal yang dapat dikombinasikan.

Berdasarkan batasan konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ilmuan di atas maka dapat ditegaskan bahwa; kebijakan publik memiliki dimensi yang luas sehingga menjadi sangat dinamis dan dapat diadakan pengembangan lebih lanjut melalui penelitian. Makna dan hakikat *publik policy* adalah suatu keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah atau pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat (*publik interest*), dimana kepentingan rakyat itu merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat.

2. Kebijakan Pelayanan Publik

Dalam konteks ini, Nugroho (2006) mengemukakan secara jelas mengenai: (1) Makna kebijakan publik adalah: (a) Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh administratur negara atau administratur publik; (b) Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik; dan (c) Dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya. (2) Bentuk kebijakan publik di Indonesia meliputi: (a) UUD

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945, (b) UU dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU, (c) Peraturan Pemerintah, (d) Keputusan Presiden, serta (e) Peraturan Daerah. dan (3) Tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumberdaya (*resources*), yaitu; (a) kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara; dan (b) kebijakan publik yang bertujuan menyerap sumber daya negara.

Kebijakan publik dilaksanakan dalam serangkaian; petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi dan standar pelayanan publik yang menjabarkan persyaratan-persyaratan, jenis dan bentuk pelayanan, serta siapa saja yang berhak mendapatkan pelayanan tersebut. Agar kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif maka diperlukan: (a) Perangkat hukum seperti peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan; (b) Kebijakan yang jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; dan (c) Kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan mengalami penyimpangan atau tidak. (Wikipedia, 2008).

Pada sisi lain, kebijakan publik memiliki fokus dan ciri-ciri khusus. Dalam konteks negara modern, fokus utama kebijakan publik adalah; pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, dalam bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak (Wikipedia, 2008). Sedangkan menurut Nugroho (2004) bahwa yang menjadi

tugas pokok atau misi kebijakan publik adalah; pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat .

Selanjutnya terdapat ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik. Asumsi Wahab (2003) bahwa terdapat ciri-ciri dari kebijakan publik yaitu: (a) Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan daripada tindakan yang serba kebetulan, (b) Kebijakan publik pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola, yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri (c) Kebijakan publik bersangkutan paut dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pemerintah di dalam bidang-bidang tertentu, misalnya di dalam mengatur pola hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di dalam kerangka otonomi daerah, industri dan perdagangan, mengendalikan inflasi; dan (d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif dan mungkin pula berbentuk negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan pengaruh tertentu. Sementara di dalam bentuknya yang negatif, kebijakan publik meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru sebenarnya sangat diperlukan.

Setelah memahami berbagai konsep, makna, dan tujuan kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli di atas, jelas memberi gambaran bahwa, makna atau substansi dari kebijakan publik adalah perpaduan dan

kristalisasi dari pada pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang dan golongan-golongan dalam masyarakat.

Konsep kebijakan publik yang lebih simpel dan konkrit dikemukakan oleh Dye (1998); kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukannya (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep kebijakan publik Dye ini mengandung makna: (1) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau lembaga pemerintah, bukan organisasi swasta dan (2) Kebijakan publik menyangkut pilihan-pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan atau lembaga pemerintah.

Walaupun batasan konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dye dirasakan agak tepat, akan tetapi batasan konsep kebijakan publik ini tidak cukup mengakui bahwa mungkin terdapat adanya perbedaan-perbedaan yang signifikan antara apa yang diputuskan oleh Pemerintah untuk dilakukan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pemerintah.

Berdasarkan batasan konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ilmuwan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, kebijakan publik memiliki dimensi yang luas sehingga menjadi sangat dinamis dan dapat diadakan pengembangan lebih lanjut melalui penelitian. Makna dan hakekat *public policy* adalah suatu keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah atau pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat (*public interest*), dimana kepentingan rakyat itu merupakan keseluruhan

yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat.

C. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas pembelajaran merupakan suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan oleh seorang guru. Pembelajaran yang sering terjadi di kelas masih didominasi guru, sehingga pembelajaran yang dilakukan di kelas kurang efektif, pencapaian efektivitas pembelajaran diperlukan sebuah strategi pembelajaran yang tepat sesuai kondisi siswa.

Kondisi siswa dalam proses pembelajaran memegang hal penting dalam pencapaian hasil yang optimal sehingga dibutuhkan strategi yang sesuai dengan kondisi siswa agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Saat ini masih banyak guru yang menggunakan metode konvensional atau metode ceramah, siswa hanya sebagai pendengar yang setia dan tidak bisa aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Senjana (2006:13) yang menyatakan strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Kedudukan strategi pembelajaran *discovery* merupakan salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi guru dan siswa. Guru memberi beberapa petunjuk kepada siswa untuk membantu siswa menghindari jalan buntu, guru memberi pertanyaan atau mengungkapkan dilema yang membutuhkan

pemecahan, penyediaan materi yang sesuai dan menarik, serta meningkatkan kemampuan siswa untuk mengemukakan pendapat dan berfikir kritis.

Melalui penggunaan strategi *snowball throwing* diharapkan dapat mempertinggi kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. *Snowball Throwing* atau yang sering dikenal dengan *Snowball Fight* merupakan pembelajaran yang diadopsi pertama kali dari game fisik dimana segumpal salju dilempar dengan maksud memukul orang lain (Huda, 2013).

Saat guru melakukan proses pembelajaran harus mampu menciptakan pengelolaan kelas yang kondusif agar siswa tertarik dalam mengikuti pelajaran. Pengelolaan kelas yang tidak kondusif akan berdampak negatif pada proses pembelajaran dan sulitnya tercapai tujuan pembelajaran dan sebaliknya. Indikator kelas yang kondusif dibuktikan dengan giat dan asyiknya siswa belajar dengan penuh perhatian mendengarkan penjelasan dari guru yang sedang memberikan bahan pelajaran.

Namun pada kenyataannya siswa kurang memperhatikan guru saat menyampaikan materi pelajaran, banyak siswa yang sibuk sendiri dan gaduh saat guru menyampaikan materi pelajaran. Hal ini disebabkan karena strategi pembelajaran yang digunakan kurang tepat dan efektif saat melakukan pembelajaran IPS pada materi keunggulan iklim di Indonesia.

D. Dinamika Pendidikan Lalu Lintas

Pendidikan merupakan usaha membina kepribadian dan kemajuan manusia baik fisik maupun moril, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam

kehidupan manusia yang lebih bermanfaat dan berkualitas. Melalui pendidikan maka suatu bangsa dapat berdiri kokoh di tengah-tengah globalisasi dunia. Dalam pasal 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun 2003) dijelaskan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak krendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Jadi pergerakan kita dari suatu tempat ketempat tujuan.

Lalu lintas dilihat dalam konteks pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkan kesadaran tertib lalu lintas, sehingga peserta didik mampu mengendalikan atau mengurangi timbulnya kecelakaan lalu lintas. Upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap dan etika berlalu lintas, yang santun, aman, nyaman, tertib, dan selamat, baik dari dirinya maupun orang lain.

Pendidikan lalu lintas dalam konteks pendidikan berarti melakukan serangkaian usaha secara terprogram dan tersistem untuk melahirkan generasi yang memiliki etika dan budaya tertib lalu lintas. Pendidikan lalu lintas memfokuskan pada penanaman pengetahuan tentang cara berlalu lintas, dan menanamkan nilai-nilai etika budaya tertib lalu lintas dan membangun perilaku pada generasi muda. Pendidikan Lalu Lintas memfokuskan pada penanaman pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas (*transfer of knowledge*) dan

menanamkan nilai-nilai (*transform of values*) etikadan budaya tertib berlalu lintas dan membangun perilaku pada generasi muda.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan lalu lintas dapat diartikan melakukan serangkaian usaha secara terprogram dan tersistem untuk melahirkan generasi yang memiliki etika dan budaya tertib berlalu lintas.

1. Peraturan Lalu Lintas

Henry Hanzlitt (2003: 93) mengemukakan “Peraturan lalu lintas tidak ada dalam rangka mengurangi atau memperlambat lalu lintas, melainkan untuk mempercepat dan memaksimumkannya demi keluasan yang terbesar yang konsisten dengan keselamatan timbal balik”. Dalam penegakkan peraturan lalu lintas, seperti dalam banyak bidang hukum dan moral yang lebih luas, kita tidak dapat memperoleh hak pertimbangan pribadi.

Peraturan lalu lintas merupakan sistem hukum dan sistem moral dalam mikrokosmos. Tujuannya yang khas adalah untuk memaksimalkan lalu lintas dan memaksimalkan keselamatan, untuk memungkinkan masing-masing orang mencapai tujuannya dengan sedikit campur tangan dari orang lain.

2. Tujuan Pendidikan Lalu Lintas

Dalam Edukasi Kompasina (Aar, 2015: 2) Pendidikan Lalu Lintas di sekolah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: (a) Agar generasi muda secara sadar mampu mengimplementasikan sistem nilai yaitu etika dan budaya berlalu lintas yang aman, santun, selamat, tertib dan lancar yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari; (b) Mengubah perilaku pemakai jalan (*road user*

behavior);(c) Menurunkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas; dan
(d) Memberikan informasi tentang lalu lintas.

3. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Kedalam Mata Pelajaran PKn

Kata integrasi berasal dari bahasa Inggris "*integrate*" yang berarti menggabungkan, menyatukan, dan "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Menurut Winarno (2013: 23) Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu: (a) Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, dan (b) Membuat sesuatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Merujuk pada pengertian kedua pengintegrasian berarti penyatuan unsur-unsur yang ada.

Winarno (2013: 23) mengungkapkan "berintegrasi artinya berpadu (bergabung agar menjadi kesatuan yang utuh). Kata "mengintegrasikan" berarti membuat untuk menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah". Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi adalah menggabungkan atau menyatukan dua unsur atau lebih yang awalnya berbeda dan pada akhirnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan pengintegrasian memiliki arti penggabungan, dalam hal ini penggabungan materi pendidikan lalu lintas kedalam materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kepolisian RI telah mengambil langkah positif dalam melakukan pengintegrasian pendidikan lalu lintas yaitu dengan mengadakan kerjasama (MoU) dengan Kemendiknas pada Tanggal 8 Maret 2010 dengan SK Mou N0.03/III/KB/2010 tentang pendidikan berlalu lintas dalam pendidikan

nasional. Pengintegrasian pendidikan lalu lintas kedalam mata pelajaran PKn dapat diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan materi pendidikan lalu lintas kedalam materi Pkn melalui telaah Standar Kompetensi dan Standar Isi.

Pengintegrasian pendidikan lalu lintas kedalam mata pelajaran PKn diharapkan berdampak positif bagi kesadaran dan perilaku anak didik dalam berlalu lintas. Setelah ada pendidikan lalu lintas, para siswa diharapkan mampu mengimplementasikan etika dan budaya berlalu lintas yang santun, tertib dan aman. Kunarto (2014: 3) mengemukakan bahwa “Etika berlalu lintas yaitu pedoman sikap atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam berlalu lintas”.

Muhammad (2007) dalam model pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas/PLL (2010: 3) mengemukakan bahwa Beberapa program yang sudah dirancang untuk meningkatkan disiplin dan etika berlalu lintas siswa antara lain kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam kegiatan intrakurikuler pendidikan lalu lintas dapat dilakukan melalui penyusunan Rencana Program Pembelajaran (RPP) dengan menyisipkan materi pendidikan lalu lintas, sedangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan melalui kegiatan PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Polsana (Polisi Sahabat Anak), dan Saka Bhayangkara Lintas.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mempelajari posisi dan perspektif yang dipilih dalam penelitian ini, maka dipandang perlu mengkomparasikan dengan penelitian terdahulu yang relevan, dan dianggap sangat urgen karena 3 (tiga) alasan prioritas,

antara lain: (1) Agar terhindar dari kemungkinan terjadinya *copy faste it* terhadap karya ilmiah penelitian lain; (2) Agar menemukan peneliti menemukan problematika yang sama dalam hal “Efektivitas Pendidikan Lalu Lintas Pada Anak Usia Dini”; dan (3) Agar memungkinkan peneliti menemukan posisi kajian yang bertaraf penemuan, dan/atau lanjutan, dan/atau pengembangan secara komprehensif.

Dalam rangka memenuhi harapan di atas, maka peneliti memilih dua hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Kadarsih, 2015. jurnal dengan judul: “*Penanaman Karakter Melalui Pendidikan Etika Berlalu Lintas Sejak Usia Dini di Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta*”. dengan temuan adalah: (a) Penanaman karakter melalui Pendidikan Etika Berlalu Lintas sejak usia Dini dapat dilakukan melalui kegiatan rutin, spontan, keteladanan, pengkondisian dan budaya di PAUD. (b) Pendidikan Etika berlalu Lintas tepat diberikan sejak anak usia dini karena dengan kejujuran anak yang polos dapat memberikan edukasi kepada orang tuanya apabila melanggar rambu lalu lintas. dan (c) Anak berani menegur dan mengingatkan. Guru jangan sampai membuat kesalahan dalam melayani anak didiknya, tetapi berperilaku mendidik yang baik dengan menjadi modelling dan sebagai agen perubahan serta terapkan kembali konsep pendidikan Ki Hajar dewantara, yaitu: “*Ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa dan tut wuri handayani*” bermakna “Jika berada di depan jadilah suri teladan, jika berada di tengah, jadilah pengayom, dan jika berada di belakang, jadilah motivator”.

2. Dwi Agung Nugroho Arianto dan Samsul Arifin, 2017. Jurnal dengan judul “*Pengaruh Usia, Pendidikan dan Budaya Terhadap Kepatuhan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Jepara*”, dengan temuan: (a) Usia masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan lalulintas di wilayah hokum Polres Jepara. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($13,198 > 1,645$), sehingga hipotesis diterima. Berarti semakin dewasa atau matang usia seseorang (pengendara), maka akan meningkatkan kepatuhan seseorang (pengendara) terhadap peraturan lalu lintas di Kabupaten Jepara. (b) Pendidikan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara. Dibuktikan dari hasil nilai uji hipotesis $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($12,844 > 1,645$). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang (pengendara), maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas di Kabupaten Jepara, begitu juga sebaliknya. (c) Budaya masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara. Hal ini dibuktikan dari hasil uji hipotesis yang menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($18,868 > 1,645$). Artinya bahwa semakin seseorang (pengendara) memiliki Budaya yang baik dalam berkendara, maka akan mempengaruhi terhadap peningkatan masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas di Kabupaten Jepara. dan (d) Usia, pendidikan dan budaya masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara. Hal ini dibuktikan dari nilai uji hipotesis menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($262,889 > 2,996$), sehingga hipotesis diterima.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dibedakan posisi penelitian ini dengan penelitian lain. Untuk memudahkan mencermatinya maka peneliti menampilkan tabel yang menunjukkan posisi masing-masing penelitian di atas, dengan penelitian ini, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2: Perbandingan Fokus dan Temuan Penelitian

No	Nama Peneliti	Fokus Penelitian	Temuan
1	Kadarsih	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pendidikan ELL - Penilaian pembelajaran - Keberanian siswa dalam kebenaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pendidikan ELL dilakukan melalui kegiatan rutin, spontan, keteladanan, pengkondisian dan budaya. - Penilaian pembelajaran berefek kejujuran anak yang polos memberikan edukasi kepada orang tuanya apabila melanggar rambu lalu lintas. - Anak berani menegur dan mengingatkan. Guru jangan sampai membuat kesalahan dalam melayani anak didiknya.
2	Dwi Agung Nugroho Arianto dan Samsul Arifin	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh usia masy. terhadap kepatuhan lalu lintas - Pengaruh pendidikan terhadap ketaatan lalin - Pengaruh budaya masy. terhadap kepatuhan lalulintas - Usia dan budaya berpengaruh secara bersama thrp kepatuhan lalin 	<ul style="list-style-type: none"> - Usia masy. berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan lalulintas - Pendidikan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan lalu lintas - Budaya masy. berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan lalu lintas - Usia dan budaya secara bersama-sama berpengaruh signifikan thdp kepatuhan lalu lintas.
3	Nurhaeni	<ul style="list-style-type: none"> - Konten pendidikan lalu lintas anak usia dini - Proses pendidikan lalu lintas anak usia dini - Hasil pendidikan lalu lintas anak usia dini 	<ul style="list-style-type: none"> - Materi pendidikan lalu lintas anak usia dini masih perlu dianalisis agar memberi efek secara signifikan. - Proses pendidikan lalu lintas anak usia dini membutuhkan duungan semua pihak - Hasil pendidikan lalu lintas anak usia dini berkontribusi terhadap perilaku anak.

F. Kerangka Konsep Penelitian

Melihat fenomena perilaku masyarakat Indonesia dalam berlalu lintas saat ini diperlukan adanya penanaman pengetahuan tentang disiplin dan etika dalam berlalu lintas. Salah satu upaya pemerintah adalah Kementerian Pendidikan

Nasional dan Polri mencanangkan untuk memasukkan materi pendidikan lalu lintas dalam kurikulum intra kurikuler berupa Nota Kesepakatan Menteri Pendidikan Nasional dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 03/III/KB/2010 dan Nomor B/III/2010. Pada tanggal 8 maret 2010 diselenggarakan kegiatan pengintegrasian disiplin berlalu lintas ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Dalam konteks UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) dijelaskan bahwa pendidikan usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Tingkatan pendidikan ini lebih populer disebut Taman Kanak-kanak (TK). Realitas di lapangan selama ini, anak-anak TK sudah diajari mengenal rambu-rambu lalu lintas. Metodenya, menggunakan alat peraga dan diajarkan dengan model bermain yang digemari anak-anak.

Pengenalan pengetahuan lalu lintas di TK perlu dilanjutkan di SD, MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat. Anak-anak SD sekitar tahun 1985-an pernah diperkenalkan kegiatan ekstra kurikuler seperti Polisi Keamanan Sekolah (PKS). Bahkan pada masa itu, untuk mensosialisasikan pendidikan lalu lintas tersebut Kepolisian dan Dinas Pendidikan setempat mengadakan lomba PKS tingkat SD dan SMP.

Kegiatan tersebut sangat tepat untuk pembentukan perilaku anak melalui proses belajar. Lewat proses belajar diharapkan akan terjadi perubahan kelakuan dan sikap anak. Mulai dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak memahami menjadi memahami.

Perencanaan program untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lalu lintas melalui kurikulum pendidikan. Untuk prospek jangka panjang keselamatan jalan, tersedianya program pendidikan sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan dan kecakapan menyangkut hal keselamatan lalu lintas. Pendidikan berupaya menyiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam mentaati peraturan dan menghormati untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan yang lainnya, sampai kelak menjadi orang dewasa. Program kurikulum keselamatan lalu lintas dalam pendidikan harus ditentukan dengan prinsip pendidikan dan mencerminkan kebutuhan setempat tentang masalah keselamatan lalu lintas. Peran kepolisian juga diperlukan untuk datang ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan dan pendekatan pada siswa maupun tenaga pendidiknya (guru).

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan peranannya sangat penting. Sebab, lalu lintas menguasai hajat hidup orang banyak. Maka penyelenggarannya harus dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan keselamatan berlalu lintas. Peningkatan kemampuan dan kesadaran dalam menghindari potensi kecelakaan merupakan upaya strategis yang dapat ditempuh untuk mencapai tingkat keselamatan yang lebih tinggi. Fokus terhadap kemampuan dan kesadaran manusia tentu saja bukan hal yang sederhana sebab rentang upaya untuk mencapai hal tersebut sangat luas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah

melalui pendidikan sejak dini mengenai pentingnya keselamatan di jalan. Berkat pendidikan lalu lintas anak usia dini menjadi alternatif terbaik membentuk pola pikir dan karakter anak-anak yang masih polos dan lugu dalam membentuk persepsi dan paradigma tentang urgensi keselamatan di jalan.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Keselamatan Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengeluarkan seri materi sosialisasi keselamatan berlalu lintas untuk anak-anak usia 7-12 tahun yang bertujuan untuk: (1) Memberikan pemahaman nilai-nilai, norma, etika, aturan keselamatan jalan; dan (2) Mengembangkan sikap “selamat” dalam berlalu lintas dan karakter “empati” terhadap sesama pengguna jalan. Melalui materi sosialisasi dapat dimanfaatkan oleh pihak manapun untuk mengajarkan dan memberikan penerapan sikap anak usia dini dalam berlalu lintas di Kabupaten Kepulauan Selayar.



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, menurut Moleong (2012:3). Penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dokumen pribadi, dokumen resmi, serta catatan lapangan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah mencocokkan realitas empirik dengan teori yang berlaku. Selanjutnya dijelaskan bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sedangkan menurut Sugiyono (2005: 1) pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti pada obyek penelitian tertentu, teknik pengumpulan datanya pada umumnya dilakukan melalui survei, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, berupa panduan survei, wawancara, dan teknik pemilihan dokumen adalah yang relevan dengan kajian penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian fenomenologi untuk menghasilkan informasi yang bersifat eksplanatori (*explanatory research*), yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu generalisasi serta menjelaskan hubungan antar fokus. Jenis penelitian survei bertujuan mendeskripsikan secara sistematis dan analitik tentang sifat-sifat individu, gejala, dan keadaan kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala hubungan tertentu antara satu gejala dan gejala lainnya dalam proses pendidikan lalu lintas pada anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan maksud untuk dapat memberikan deskripsi secara sistematis dan tuntas, faktual dan aktual terhadap obyek penelitian.

Penelitian kualitatif, salah satu kekuatan penelitian kualitatif adalah kemampuannya menguraikan secara rinci gejala empiris yang sedang dikaji. Disamping itu, pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada nara-sumber data dan metode triangulasi mengutamakan perspektif emik, yaitu lebih menekankan proses daripada hasilnya. Sedangkan pemilihan informan bersifat *purposive* dan *snowball*

yaitu lebih mementingkan makna, dan analisis dilakukan secara induktif sejak awal penelitian, sepanjang penelitian, dan setelah selesai penelitian.

Menurut Sugiyono (2005: 1) pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti pada obyek penelitian tertentu, teknik pengumpulan datanya pada umumnya dilakukan melalui survei, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, berupa panduan survei, dan wawancara, dan teknik pemilihan dokumen adalah yang relevan dengan kajian penelitian.

Penyajian data tentang kualitas harus dalam bentuk penjelasan, narasi atau uraian. Penyajian data tentang makna “keapaan, sebagaimana, dan kemengapaan” berdasarkan data orsinil tanpa dimodifikasi. Deskripsi hasil penelitian sesuai dengan fokus-fokus atau keseluruhan fenomena yang sedang diteliti tanpa dugaan penafsiran dan interpretasi. Deskripsi yang baik harus didukung dengan data faktual atau aktual berupa kutipan langsung dari hasil wawancara, foto-foto, dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari obyek penelitian.

B. Desain Penelitian

Setelah menemukan hal yang hendak diteliti, maka merumuskan masalah dan menyusun pernyataan dugaan, asumsi perkiraan yang merupakan jawaban sementara, hal yang selanjutnya dilakukan oleh peneliti adalah menentukan desain penelitian. Desain penelitian erat hubungannya dengan proses penelitian karena merupakan tuntunan bagi peneliti agar dapat mendapatkan jawaban-jawaban dari temuan penelitian. Pada bagian desain penelitian terdapat tuntunan bagi peneliti mengenai fokus, indikator dan prediktor penelitian untuk menyempurnakan komponen penelitian, dan menemukan solusi proses penyelesaian penyusunan karya ilmiah ini. Tidak hanya menjadi tuntunan bagi para peneliti, desain penelitian juga mempermudah peneliti untuk menggunakan suatu metode pengumpulan data berupa: Observasi, Wawancara, dan Penelusuran dokumentasi, dalam mencari jawaban yang terkandung dalam fokus, indikator dan prediktor penelitian. Adanya desain penelitian, peneliti dapat memilah data yang relevan dan tidak sesuai dengan topik penelitian.

C. Sumber Data dan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian adalah fenomenologi, maka sumber data penelitian meliputi: dokumentasi, hasil observasi dan hasil wawancara. Sedangkan informan atau narasumber penelitian ini dipilih secara sengaja "*purposive*" yaitu:

1. Sumber data penelitian diperoleh melalui:
 - a. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan menggunakan instrumen penelitian pada informan, sedangkan data sekunder berupa data dokumen dari Kabupaten Selayar berupa: (i) Renstra Kabupaten Selayar tahun 2015-2018, (ii) Standar Operasional Prosedur (SOP) pendidikan anak usia dini, dan (iii) Laporan akuntabilitas pendidikan anak usia dini.
 - b. Data sekunder diperoleh melalui: (i) Dokumen dari Kabupaten Selayar, (ii) Dokumen mutu dan kinerja Kabupaten Kepulauan Selayar, dan (iii) Berita media massa yang relevan dengan pendidikan anak usia dini.
2. Informan terdiri atas informan utama dan informan biasa, yaitu: (1) Informan utama, yaitu: (i) Ketua Tim Pengajar dari Polri, (ii) Anggota Tim Pengajar dari Polri, dan (2) Informan biasa, yaitu: (i) Guru Mata Pelajaran Agama, (ii) Guru Mata Pelajaran Berhitung, (iii) Guru Mata Pelajaran Budi Bahasa, (iv) Guru Mata Pelajaran Membaca, (v) Guru Mata Pelajaran Bersosialisasi Lingkungan, (vi) Guru Mata Pelajaran Bernyanyi, dan (vii) Guru Mata Pelajaran Keterampilan.

D. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian

Bertitik tolak pada masalah penelitian, maka penelitian ini diarahkan pada 3 fokus penelitian dengan 6 indikator dan 8 predictor penelitian yaitu:

1. Menggambarkan konten pendidikan lalu lintas anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan indikator sebagai berikut: (a) Kurikulum pembela-

jaran anak usia dini, yaitu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan, dan (b) Lingkup materi pembelajaran adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak.

2. Mendeskripsikan proses pendidikan lalu lintas anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan indikator sebagai berikut: (a) Persiapan materi pengajaran yaitu program pengajaran yang memuat satuan bahasan untuk disajikan dalam beberapa kali pertemuan agar lebih terarah dan berjalan efisien dan efektif, dengan 4 prediktor yaitu: (i) Komunikasi pembelajaran yaitu metode penyampaian materi pendidikan kepada siswa, (ii) Sumber daya yaitu seluruh kompetensi yang dimanfaatkan dalam Proses Belajar Mengajar (PMB), (iii) Sikap pelaksana yaitu orientasi pandangan dan tindakan implementor terhadap PAUD, dan (iv) Struktur birokrasi yaitu tugas-tugas operasional rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan formal yang dikelompokkan ke dalam berbagai fungsi, wewenang, rentang kendali terbatas dan pengambilan keputusan, dan (b) Implementasi program pengajaran yaitu aktivitas proses pendidikan secara terprogram terhadap anak usia dini.
3. Evaluasi hasil pendidikan lalu lintas anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan indikator sebagai berikut: (a) Peningkatan mutu pembelajaran yaitu upaya mengembangkan kemampuan, sikap yang berahlak disegala bidang

untuk keberhasilan pendidikan anak usia dini, dengan 4 prediktor yaitu: (i) Pengelolaan kelas yaitu teknik memeneg PMB, (ii) Penggunaan media dan sumber belajar yaitu pemilihan sarana dan prasarana sebagai media PBM, (iii) Penggunaan metode pembelajaran yaitu pemanfaatan teknik mengajar yang proporsional, dan (iv) Penilaian hasil pembelajaran yaitu menilai PMB yang secara komprehensif, dan (b) Pendokumentasian hasil pembelajaran, yaitu melakukan pendokumen-tasian hasil proses belajar megajar anak usia dini di rak atau *roolpack* sesuai sistem penyimpanan sentralisasi.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian kualitatif terfokus pada penelitian tentang implementasi pelayanan pendidikan anak usia dini pada Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dideskripsikan sesuai data empirik secara naratif. Oleh sebab itu instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan tiga alat kelengkapan yaitu: (1) Pedoman wawancara, berisi daftar pertanyaan terbuka yang merupakan penjabaran fokus penelitian, yang ditujukan untuk menggali informasi dari para subyek penelitian. Pedoman wawancara mendalam ditujukan kepada subyek utama penelitian. Pedoman wawancara hanya berfungsi sebagai petunjuk dalam wawancara dengan subyek agar tidak keluar dari konten dan kontekspenelitian; (2) Pedoman observasi, berisi rumusan item pengamatan yang berhubungan dengan situasi, konten dan konteks menyangkut: kebijakan pelayanan rekam medis; standar pelayanan rekam medis; dan

prototype model pelayanan rekam medis; dan (3) Catatan dokumen, berupa pengumpulan data sekunder yang tertulis menyangkut: kebijakan pelayanan rekam medis; standar pelayanan rekam medis; dan *prototype model* pelayanan rekam medis.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pengembangan instrumen, khususnya pedoman wawancara dan daftar pertanyaan yang diberikan kepada informan adalah: (1) Merumuskan fokus dan indikator dari masing-masing fokus penelitian; (2) Membuat tabel matriks pengembangan instrumen, meliputi: rumusan masalah, fokus penelitian, indikator fokus, prediktor dari indikator, sumber data, dan nomor/ butir/ item pertanyaan; dan (3) Membuat daftar pertanyaan dengan berpedoman pada deskripsi fokus masalah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan dan Pengabsahan Data Penelitian

Dalam penelitian ini, yang digunakan dalam teknik pengumpulan data terkait: (1) Kebijakan pelayanan pendidikan anak usia dini pada Kabupaten Selayar, yang diukur melalui: (a) Sistem penerimaan peserta pendidikan anak usia dini, (b) Sistem pengisian rekam medis, (c) Sistem review rekammedis, dan (d) Sistem penyimpanan rekam medis, (2) Standar pelayanan rekam medis, yang diukur melalui: (a) *Threshold* (kriteria minimal), (b) *Benchmark* (kriteria normatif), dan (3) *Prototype model* pelayanan rekam medis, yang diukur melalui prediktor: (a) Intensitas pelayanan rekam medis, (b) Dinamika pelayanan rekam medis, dan (c) Dampak pelayanan rekam medis.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang utama digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, Teknik pengamatan atau observasi langsung adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data awal secara umum, kemudian observasi dilakukan untuk memaknai fokus apa saja harus mendapat perhatian secara khusus. Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipasi terbatas (*limited participatory observation*) dilakukan terhadap pelaksanaan rekam medis. Observasi partisipasi terbatas dilakukann terhadap kegiatan para aktor pelaksanaan rekam medis. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, akhirnya sampai pada keputusan untuk menetapkan aspek-aspek apa saja yang perlu dipahami lebih mendalam.
- b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap tim pendidik anak usia diri di Kabupaten Selayar, fokus pada diskusi kelompok (*Fokus Group Discussion*) tentang kebijakan pelaksanaan pendidikan anak usia diri.
- c. Penelusuran dokumen (*document tracking*) berupa risalah rapat, laporan-laporan dan dokumentasi elektronik. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang disajikan dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, baik dari sekolah TK Selayar, Polres Kabupaten Kepulauan Selayar, maupun dari Polda Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Teknik pengabsahan data

Untuk menilai kualitas suatu hasil penelitian kualitatif, diperlukan 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan sebagai standar penelitian kualitatif. Teknik

pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif yang digunakan sesuai gagasan Moleong (2000) sebagai berikut:

- a. *Credibility* (kredibilitas), digunakan untuk melaksanakan penelitian sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Disamping itu untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan penelitian dilakukan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada fakta lain yang sama.
- b. *Transferability* (transferabilitas), bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan, seorang peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks, sehingga peneliti akan menyajikan data deskriptif selengkapya.
- c. *Dependability* (kebergantungan) yaitu melakukan replikasi studi. Apabila telah dua atau beberapa kali diadakan pengulangan studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya tetap sama maka diasumsikan reliabilitasnya tercapai.
- d. *Confirmability* (konfirmasiabilitas) bermakna bahwa sesuatu yang objektif adalah sesuatu yang dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan datanya melalui asumsi, paradigma, bias, orientasi teori, sistem nilai dan posisi epistemologinya.

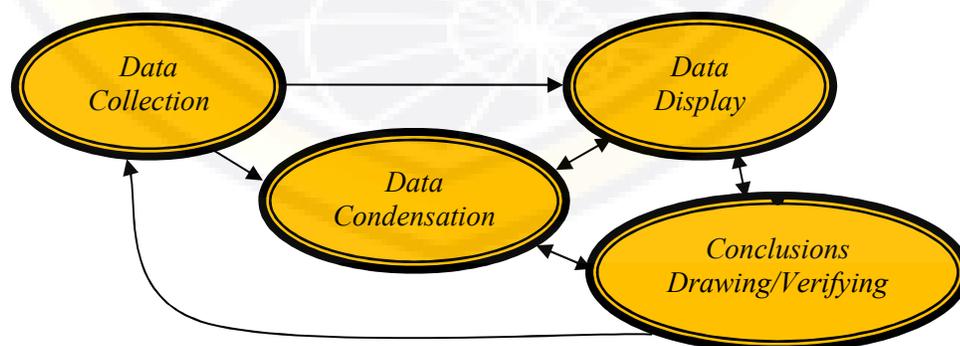
G. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data yang cocok digunakan adalah teknik analisis interaktif sebagaimana dikemukakan oleh

Miles & Huberman (2014) dengan proses analisis data sebagai berikut:

1. *Data collection* (koleksi data) yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, sebagai bahan triangulasi data untuk mencapai validitas dan reliabilitas penelitian.
2. *Data condensation* (kondensasi data) yaitu merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
3. *Data Display* (penyajian data) dilakukan dalam bentuk narasi, matriks, skema, dan gambar dengan maksud memudahkan dalam membuat kesimpulan.
4. *Conclusion/ verification* (verifikasi dan penarikan kesimpulan) yaitu melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh untuk mencari makna, mencatat keteraturan pola, hubungan sebab akibat yang mungkin dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan yang longgar dan terbuka untuk menarik kesimpulan final.

Demi mendapatkan deskripsi teknik analisis data kualitatif secara singkat, maka ditampilkan mekanisme teknik analisis data berikut.



Gambar 3.2:
Teknik Analisis Data Model Interaktif dari Miles & Huberman (2014)

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

A. Geografis, Administrasi, dan Kondisi Fisik

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang terletak di ujung Selatan Pulau Sulawesi. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara $5^{\circ} 42'$ dan $7^{\circ} 35'$ LS dan $120^{\circ} 15'$ dan $122^{\circ} 30'$ BT. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki jumlah pulau sebanyak 130, sedangkan luas wilayah $10.503,69 \text{ km}^2$ meliputi luas daratan $1.357,03 \text{ km}^2$ dan luas wilayah perairan laut $9.146,66 \text{ km}^2$.

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores dan Selat Makassar.

Tabel 4.3: Pulau dan Garis Pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Pulau Berpenghuni	Buah	34
2.	Pulau Tidak Berpenghuni	Buah	96
3.	Pulau Bernama	Buah	130
4.	Pulau Tidak Bernama	Buah	
5.	Panjang Garis Pantai	Km	6,440.89

Sumber : Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2010.

Pulau-pulau yang berjumlah 130 tersebut semuanya bernama dan hanya 34 pulau di antaranya yang berpenghuni. Panjang garis pantai keseluruhan adalah 6.440,89 km.

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan sekitarnya secara umum ditandai dengan curah hujan dan pengaruh angin musiman, sebab wilayahnya berbatasan langsung dengan laut lepas. Pengkajian lebih lanjut terhadap sifat-sifat iklim di Kabupaten Kepulauan Selayar harus lebih rinci karena sangat berkaitan dengan aktivitas penduduknya sebagai nelayan.

Menurut catatan pada Stasiun Meteorologi Benteng, rata-rata curah hujan per bulan 146,25 mm dan hari hujan per bulan 10 hari, sementara pada stasiun meteorologi Bontomatene rata-rata curah hujan per bulan 155,60 mm dan hari hujan per bulan 7 hari. Perbedaan curah hujan di suatu tempat dikarenakan oleh pengaruh iklim, keadaan geografi, dan perputaran/pertemuan arus udara.

Kondisi hidrologi Pulau Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada di pulau ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Pulau Selayar. Pada umumnya, debit air sungai-sungai tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai sebagai wadah tadah hujan (catchment area) dan sistem sungainya. Sistem pengaliran langsung ke laut dan kondisi batuan yang berkelurusan (*straight*) rendah serta curah hujan yang tidak mendukung sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga sulit diukur besaran debit airnya.

Berdasarkan susunan stratigrafi dan struktur geologi, maka pada wilayah bagian tengah (yang merupakan sebaran endapan formasi Walanae) merupakan suatu formasi lapisan batuan pembawa air yang bersifat tertekan (*aresian aquifes*) dengan debit air kecil sampai sedang (kurang dari 1-3 liter/detik). Air tanah bebas (watertable groundwater) dijumpai pada endapan alluvial dan endapan pantai, endapan formasi Walanae serta pada lembah-lembah yang ditempat oleh endapan dan jenis lapisan batuan. Pada endapan alluvial dan endapan pantai tingkat kedalaman muka air tanahnya berkisar antara 5 dan 6 meter yang sangat dipengaruhi oleh intrusi air laut. Air tanah bebas ini dapat dijumpai pada daerah yang ditutupi oleh endapan batu gamping Selayar dari formasi Walanae berupa aliran tanah terbatas rekahan ataupun ruang akibat pelarutan yang membentuk sungai bawah tanah. Sumber air yang sangat terbatas, sehingga hampir keseluruhannya telah dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan penduduk. Indikasi adanya mata air tersebut terdapat di beberapa wilayah antara lain Batangmata Sapo, Lembang-Lembang, Bonto dan sebelah Timur Tile-Tile, dengan besaran debit airnya relatif kecil sampai sedang (1-4 liter/detik).

Sistem aliran hidrogeologi di Pulau Selayar menunjukkan adanya pergerakan air, baik air permukaan maupun air tanah menuju ke kawasan perairan (laut). Akuifer pada umumnya terdapat pada lapisan pasir, pasir kerikil, dan lapisan tipis batu gamping terumbu yang berumur Holosen dengan pergerakan airnya melalui ruang antarbutir atau rongga-rongga. Pada daerah yang ditempati satuan batu gamping, aliran air tanah terbatas pada rekahan ataupun ruang akibat pelarutan membentuk sungai-sungai bawah tanah. Ini dapat dijumpai di sekitar wilayah Tajuiya,

Tamasongoia dengan debit air yang bervariasi. Terdapatnya air tanah pada satuan batu gamping ini dijumpai pada beberapa tempat pada batas kontak dengan satuan batu gamping dan lempung pasir dengan debit yang relatif kecil.

Keterbatasan sumber air akibat cakupan luas DAS yang relatif sempit, struktur batuan permukaan dan catchment area sangat sempit menjadi tolak ukur untuk menggali potensi air. Oleh karena itu, arahan penggunaan lahan pada kawasan potensial resapan air dilimitasi untuk kawasan budidaya dan penggalan sumber air tanah khususnya kawasan utara.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai pada Tahun 2011 wilayah administratifnya mencakup 11 kecamatan, yakni Kecamatan Pasimarannu, Pasimasunggu Timur, Pasilambena, Pasimasunggu, Taka Bonerate, Bontosikuyu, Bontoharu, Bontomanai, Benteng, Bontomatene dan Buki dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 75. Faktor transportasi sangat menentukan pengembangan kawasan sebab interaksi antara moda darat dan laut akan meningkatkan tingkat aksesibilitasnya. Luas wilayah dan jumlah desa di Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan pada Tabel 4.4:

Tabel 4.4: Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kab. Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	
			Ha	%
1.	Pasimarannu	6	176.35	4,13
2.	Pasilambena	5	102.99	9,86
3.	Pasimasunggu	6	114.50	15,20
4.	Pasimasunggu Timur	4	47.93	13,78
5.	Takabonerate	8	221.07	17,16
6.	Bontosikuyu	11	199.11	0,48
7.	Bontoharu	8	129.75	8,87
8.	Bontomanai	8	115.56	7,13
9.	Benteng	3	7.12	10,81
10.	Bontomatene	11	159.92	11,18
11.	Buki	5	82.73	1,41
Total (Kab. Kep. Selayar)		75	1.357,03	100

Sumber: BPS, Selayar Dalam Angka Tahun 2018.

B. Keadaan Demografi

Berdasarkan data BPS Tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2007 adalah sebesar 117.860 jiwa, kemudian berkembang menjadi 123.283 jiwa pada tahun 2011 atau mengalami pertambahan sebesar 5.423 jiwa periode waktu 5 tahun terakhir (2006-2010), atau tumbuh rata-rata sebesar 1,36 % pertahun.

Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Benteng yang merupakan pusat kegiatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk sebesar 21.870 jiwa, sedang yang paling rendah adalah di Kecamatan Buki sebesar 6.147 jiwa pada tahun 2011. Jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5: Jumlah Penduduk Kab Kepulauan Selayar Dirinci Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011
1	Pasimarannu	8.710	8.821	8.923	8.959	9.000
2	Pasilambena	7.230	7.411	7.802	6.786	6.889
3	Pasimasunggu	6.826	6.907	7.008	7.625	7.711
4	Taka Bonerate	11.523	11.794	12.143	12.296	12.474
5	Pasimasunggu Timur	6.436	6.498	6.524	7.307	7.318
6	Bontosikuyu	14.088	14.278	14.450	14.332	14.407
7	Bontoharu	11.505	11.693	11.801	12.484	12.586
8	Benteng	18.174	18.540	18.860	21.344	21.870
9	Bontomanai	16.080	13.425	13.642	12.226	12.270
10	Bontomatene	17.288	13.721	13.818	12.571	12.611
11	Buki	*)	6.723	6.778	6.125	6.147
Kepulauan Selayar		117.860	119.811	121.749	122.055	123.283

Sumber : BPS, Selayar Dalam Angka (2008, 2009, 2010, 2011)

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar selama beberapa tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatif rendah dan berfluktuasi.

1. Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2010 adalah 90 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tersebut bervariasi pada setiap kecamatan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum merata. Kecamatan Benteng yang memiliki luas wilayah sebesar 7,12 km² dihuni oleh 18.860 jiwa penduduk. Hal tersebut mengakibatkan kepadatan penduduk di Kecamatan Benteng berada jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk Kecamatan lain di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kepadatan penduduk

di Kecamatan Benteng pada tahun 2010 mencapai 2.649 jiwa/km². Adapun daerah yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Pasimarannu yaitu 51 jiwa/km².

Dari data yang ada juga diketahui bahwa distribusi penduduk sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah kecamatan Pulau Selayar. Tentunya ini berkaitan dengan luas wilayah yang lebih besar dibanding pulau lainnya.

2. Komposisi Penduduk

Uraian mengenai komposisi penduduk terdiri dari komposisi penduduk menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, secara umum dapat dikatakan bahwa selama periode 2014-2018 Kabupaten Kepulauan Selayar masih mempunyai struktur penduduk sedang, sebab proporsi penduduk berusia di bawah 15 tahun tidak melampaui angka 40%. Pada tahun 2009 jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun mencapai 29,64% (36.091 jiwa, terdiri dari 18.316 pria dan 17.775 wanita) dari total penduduk. Sedangkan penduduk yang termasuk kelompok usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 77.488 jiwa (63,64%) dan penduduk berusia 65 tahun ke atas hanya sekitar 6,71% atau 8.170 jiwa (terdiri dari 3.553 pria dan 4.617 wanita).

C. Gambaran APBD Kabupaten Kepulauan Selayar

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selama kurun waktu tahun 2014 -2018 menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, meskipun sempat menurun di tahun 2016. Pada tahun 2014 jumlah total pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 392.010.867.048, kemudian meningkat menjadi 434.240.052.000 pada tahun 2015, lalu mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi Rp. 371.221.054.000 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp. 516.389.324.000. Kapasitas fiskal kabupaten Kepulauan Selayar masih di dominasi oleh dana transfer dari pusat dalam bentuk DAU dan DAK. Sementara itu, belanja daerah juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2008 jumlah belanja daerah sebesar Rp. 416.166.239.526 dan tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 501.389.324.000. Kondisi ini tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6: Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Selayar 5 Tahun Terakhir

No	Anggaran	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pendapatan					
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13.377.454.700	21.489.086.000	18.117.097.000	18.794.717.000	18.848.000.000
2	Dana Perimbangan (Transfer)	320.924.969.948	342.398.310.000	336.708.770.000	410.016.566.000	448.884.515.000
3	Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	57.708.442.400	70.352.656.000	16.395.187.000	44.101.037.000	48.656.809.000
	Jumlah Pendapatan	392.010.867.048	434.240.052.000	371.221.054.000	472.912.320.000	516.389.324.000

No	Anggaran	2014	2015	2016	2017	2018
B	Belanja					
1	Belanja Tidak Langsung	157.399.305.395	188.643.236.000	216.650.924.000	256.352.106.000	286.698.250.000
2	Belanja Langsung	258.766.934.131	298.335.784.000	176.360.860.000	215.060.214.000	214.691.074.000
	Jumlah Belanja	416.166.239.526	486.979.020.000	393.011.784.000	471.412.320.000	501.389.324.000
	Surplus/Defisit Anggaran	-24.155.372.478	-2.738.968.000	-21.790.730.000	+1.500.000.000	-5.000.000.000

Sumber : Dinas Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Dari total Belanja tersebut, proporsi belanja Sanitasi di Kabupaten Kepulauan Selayar 5 tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2016 belanja sanitasi sebesar Rp. 9.058.587.500 menjadi Rp. 8.315.146.650 pada tahun 2017. Total Belanja Sanitasi Kabupaten Kepulauan Selayar.

D. Kondisi Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDA) suatu Negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tahun 2018 di Kabupaten Kepulauan Selayar jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 114 buah, jumlah guru sebanyak 98 orang dengan jumlah siswa sebanyak 3.297 orang. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 139 buah dengan jumlah guru sebanyak 1.181 orang termasuk guru honor serta jumlah murid sebanyak 15.187

Orang. Jumlah SMP sebanyak 47 buah dengan jumlah guru sebanyak 1.005 orang dan murid sebanyak 5.232 orang. Jumlah SMU 9 buah dengan jumlah guru 179 orang dan murid 2.600 orang.

Tabel 2.7 : Fasilitas Pendidikan yang Tersedia di Kab. Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	TK	SDN	SDS	MI	SLTPN	SLTPS	MTs	SMUN	SMUS	SMKN	SMKS	MA
1	Benteng	11	8	-	2	2	1	2	1	1	2	1	1
2	Bontoharu	8	14	-	3	4	1	2	1			1	-
3	Bontomanai	22	18	-	3	5	-	3	-	-	1	-	-
4	Buki	9	10	-	4	2	-	1	-	-	-	-	-
5	Bontomatene	17	17	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-
6	Bontosikuyu	13	20	-	2	4	-	1	1	-	-	-	-
7	Pasimasunggu	8	10	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-
8	Pasimasunggu Timur	8	9	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-
9	Takabonerate	7	13	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-
10	Pasimarannu	9	10	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-
11	Pasilambena	2	10	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-
	Jumlah	114	139		14	44	3	10	8	1	4	2	1

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar, 2018.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Permintaan kendaraan yang sangat tinggi menambah potensi kecelakaan yang terjadi, salah satunya di wilayah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi, antara lain tingkat kepatuhan para pengendara sepeda motor yang sangat lemah dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki para pengguna sepeda motor tentang peraturan atau kebijakan yang di buat oleh pemerintah dalam mengatur tata tertib yang harus di patuhi oleh pengendara sepeda motor di jalan raya.

Korps Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia (Korlantas Polri) melakukan program Gerakan Nasional Keselamatan Berkendara sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia. Gerakan ini dilakukan pemerintah karena keprihatinan pemerintah akan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Penerapan pembelajaran etika berlalu lintas di Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dimana perencanaan sendiri dilakukan dengan tujuan proses penerapan pendidikan etika berlalu lintas dapat berjalan dengan optimal dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan komponen-komponen lain yang mendukung penerapan pendidikan etika berlalu lintas. Perencanaan dalam proses pendidikan etika berlalu

lintas sendiri dimulai dengan memasukkan indikator capaian perkembangan pendidikan Etika Lalu Lintas (ELL) dalam rencana pembelajaran. Hal ini sudah dilakukan pada saat sekolah menggunakan kurikulum lama. Namun karena TK di Kabupaten Kepulauan Selayar sedang beralih menggunakan kurikulum baru yakni kurikulum 2013, indikator capaian perkembangan pendidikan ELL belum dapat dituliskan dalam Rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH).

Dalam proses pelaksanaannya penerapan pendidikan etika berlalu lintas di TK Kabupaten Kepulauan Selayar memasukkan ke dalam kegiatan terprogram dan kegiatan pembiasaan. Hal ini dilaksanakan dalam satu kesatuan yang utuh dalam setiap kegiatan merupakan sarana untuk menerapkan pendidikan etika berlalu lintas pada peserta didik pada tingkat TK di Kabupaten Kepulauan Selayar.

1. Konten Pendidikan Lalu Lintas Anak Usia Dini

a. Kurikulum Pembelajaran

Kurikulum pembelajaran anak usia dini, yaitu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

Mengkaji mengenai filosofi anak usia dini dalam perspektif teori, keunggulan dan penerapan hukum dalam konteks pendidikan menurut kebijakan pemerintah Indonesia. Secara teori, anak usia dini memiliki usia emas untuk mengembangkan diri secara psikomotor dan kognitif. Untuk itu, pengembangan

konsep intelegensia ganda yang dimiliki anak harus menjadi perhatian utama para guru dan orang tua. Pada taraf perkembangan lebih lanjut, potensi literasi yang meliputi perpikir kritis, karakter, dan pengembangan potensi diri harus diperhatikan. Peraturan pemerintah yang didedikasikan untuk pengembangan anak harus menunjukkan komitmen kuat misalnya dalam bentuk kurikulum anak dan penerapan kebijakan untuk perlindungan dan pemberian hak-hak anak.

Pendidikan itu sudah dimulai dari anak sedini mungkin, bahkan ketika di dalam perut pun anak sudah bias mendengarkan suara di luar rahim, menurut penelitian yang telah berkembang ketika janin yang masih dalam kandungan setelah berumur 4 minggu dengan di putarkan lagu-lagu klasik maka akan membentuk karakter emosi anak. Oleh karena itu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat dilakukan sejak anak mulai belajar bicara dan mulai melihat serta mendengarkan kejadian-kejadian lingkungan sekitar, sekitar usia 3 tahun. Maka pada usia ini pendidikan harus mulai diperhatikan agar dapat mempengaruhi pola hidup anak ketika dewasa nanti, karena anak akan sangat teringat begitu kuat akan kejadian apapun yang dianggap anak penting dan tidak terlupakan sampai dewasa. Dan atas dasar inilah pemerintah mulai memikirkan akan betapa pentingnya PAUD sebagai upaya menangkal tindak-tindak criminal yang terjadi pada anak usia produktif.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka pemerintah tergugah, khususnya departemen pendidikan nasional untuk membentuk sebuah direktorat baru yang bernama Direktorat PAUD.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mengkonfirmasi kepada Ketua

Tim Pengajar dari Polri (RHN), dan beliau mengemukakan bahwa:

Yaitu sebuah direktorat yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, hal ini diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi masyarakat dibidang layanan PAUD. Manusia hidup akan selalu belajar dari semua yang ada dalam lingkungannya, tak lepas dari aspek terkecil sekalipun. Sejak dalam kandungan, manusia telah diciptakan untuk memulai belajar. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa perlunya pendidikan itu mulai anak sejak usia dini. Bahkan usia anak pad ataman kanak-kanak sudah bisa dikatakan terlambat, menurut hasil penelitian dibidang neurologi yaitu Bloom, pada usia empat tahun pertama separuh kecerdasan manusia sudah terbentuk. (Wawancara, 2 November 2018).

Dalam arti pada usia tersebut otak anak tidak mendapatkan rangsangan yang maksimal, maka potensi otak anak tidak akan berkembang secara optimal. Secara keseluruhan sampai usia 9 tahun 80% kapasitas kecerdasan anak hanya bertambah sekitar 30% setelah usia 4 tahun hingga mencapai usia 8 tahun. Baru kemudian kapasitas kecerdsan anak bisa mencapai 100% setelah berusia sekitar 18 tahun. Seiring perkembangan anak maka lebih baik pula jika terus diadakan pendampingan dan bimbingan terhadap perkembangannya. Karena jika tanpa adanya pendampingan dalam perkembangannya, maka akan sangat mempengaruhi pola pikir dan tingkah lakunya ketika menuju dewasa. Dalam kenyataan sehari-hari sering dijumpai anak-anak melakukan tindakan criminal, hal ini yang membuat resah orang tua, dikarenakan seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi.Hal ini banyak berpengaruh pada pola dan tingkah laku dala perkembangan anak menuju dewasa. Berlatar belakang dari hal ini pemerintah tergugah, khususnya departemen pendidikan nasional untuk

membentuk sebuah direktorat baru yang bernama PADU, yaitu sebuah direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, hal ini diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi masyarakat dibidang layanan PAUD. Berkenaan dengan itu, maka ditampilkan hasil wawancara dengan Anggota Tim Pengajar dari Polri (SMD) sebagai berikut:

Dari hal ini telah dibukanya lembaga-lembaga yang memfasilitasi anak usia dini untuk mendapatkan permainan yang layak dan mendidik serta mengembangkan tingkat kecerdasan anak. Seperti playgroup dan lain sebagainya. lingkungan sekitar kita. Sebetulnya ketika anak sudah bisa mendengarkan sesuatu hal, maka sesungguhnya anak tersebut sudah siap untuk mendapatkan pendidikan. Tetapi dalam hal ini dikategorikan anak usia dini yaitu ketika anak sudah bisa memulai bicara dan memulai menirukan halhal yang ada disekitarnya, maka selayaknya anak kita bombing dengan memberikan pendidikan yang patut, sesuai dengan usianya. Anak-anak usia dini biasanya sekitar usia 3-6 tahun, karena pada usia ini anak sangat antusias sekali dalam bermain dan menirukan perkataan serta tingkah laku dilingkungan sekitarnya. (Wawancara, 5 November 2018).

Pada dasarnya diusia dini naka asih sangat sederhana dala pengenalan lingkungannya, tetapi juga bisa menjadi berbahaya karena pada masa ini anak sangat suka menirukan apa saja yang sudah dia lihat. Pada asa pra sekolah ini merupakan fase perkembangan individu, ketika anak mulai memiliki kesadaran tentang dirinya sebagai pria atau wanita, mulai dapat mengatur diri dalam buang air dan mengenal beberapa hal yang dianggap berbahaya, akan tetapi baru mengenal saja belum bisa mengendalikannya secara penuh. Pada fase ini, anak lebih banyak bermain, karena dengan bermain berfungsi yang mempunyai pengaruh besar sekali pada perkebangannya. Jika pada orang dewasa sebagian besar dari perbuatannya diarahkan pada pencapaina tujuan dan prestasi dalam

bentuk kegiatan kerja, maka kegiatan anak sebagian besar berbentuk aktivitas bermain.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka peneliti mewawancarai informan (NRL) selaku Anggota Tim Pengajar dari Polri menyatakan bahwa:

Permainan pada masa anak merupakan kesibukan yang dipilih sendiri oleh tujuan. Kegiatan bermain seperti menyentak-nyentakkan tangan dan kakinya dengan tidak henti-hentinya, meremas-remas jari, dan menggoyang-goyangkan kakinya. Kegiatan seperti ini di stimulis oleh dorongan dari dalam diri anak oleh impuls intern. Kegiatan bermain pada anak itu lebih tepat jika disebutkan sebagai usaha mencoba-coba dan melatih diri. Sekalipun kita menyangka anak itu cuma bermain dengan rasa acuh tak acuh saja, namun pada hakikatnya kegiatan tadi disertai intensitas kesadaran, minat penuh, dan usaha yang keras. Gerak-gerak permainan anak itu disebabkan oleh kelebihan tenaga yang terdapat pada dirinya, dan di kemudian hari digerakkan oleh dorongan belajar guna melatih semua fungsi jasmani dan rohani. (Wawancara, 7 November 2018).

Walaupun permainan itu tampaknya tidak bertujuan, akan tetapi anak memegang peranan yang sangat penting dalam latihan pendahuluan, terutama untuk mengendalikan fungsi-fungsi jasmani dan rohani, yang dikemudian harinya akan mengarah pada kegiatan intensional yang bertujuan sebagai kerja. Dengan begini anak akan terampil menggunakan semua kemampuan jasmani dan rohani untuk melakukan tugas-tugas hidupnya kelak. Dengan jalan bermain ini, anak melakukan experiment tertentu dan berexplorasi sambil menggiatkan usaha belajar dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Semua pengalamannya dalam media bermain akan memberikan dasar dan media yang kokoh dalam pencapaian macam-macam keterampilan yang sangat diperlukan bagi pemecahan kesulitan hidup dikemudian harinya. Permainan yang

mempunyai arti luas dan nilai bagi anak sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bisa kita lihat seperti: (1) Permainan merupakan sarana penting untuk mensosialisasikan anak. Yaitu sarana untuk mengintrodusir anak menjadi menghargai masyarakat manusia. (2) Dengan permainan dan situasi bermain anak bisa mengetes dan mengukur kemampuan serta potensi diri. (3) Dalam situasi bermain anak bisa menampilkan fantasi, bakat-bakat dan kecenderungannya. Anak laki-laki bermain dengan mobil-mobilannya, dan anak perempuan bermain dengan bonekanya. (4) Ditengah permainan itu setiap anak menghayati macam-macam emosi. Dia merasakan kegairahan dan kegembiraan, dan tidak secara khusus mengharapkan prestasi-prestasi. (5) Permainan itu menjadi alat pendidikan, karena permainan kita membuat rasa puas, gembira dan bahagia pada diri anak. (6) Permainan memberikan kesempatan pra latihan untuk mengenal aturan-aturan permainan, mematuhi norma-norma dan laranganlarangan, dan bertindak secara jujur serta loyal. Dan (7) Dalam bermain, anak menggunakan semua fungsi kejiwaan dan fungsi jasmaniah dengan suasa hati kesungguhan. Hal ini penting guna memupuk sikap serius dan bersungguh-sungguh pada usia dewasa untuk mengatasi setiap kesulitan hidup yang dihadapinya.

Dalam hal ini bentuk permainan dapat kita bagi menjadi 3 kategori yaitu permainan yang terdapat gerakan, memberi bentuk dan ilusi, yaitu: (1) Permainan gerakan, mula-mula bayi bermain sendirian, untuk melatih gerakan badan adan anggota tubuh dengan menggunakan bermacam-macam manipulasi.

Pada usia sekitar 3-4 tahun timbul kebutuhan untuk bermain-main dengan kawan-kawannya, selanjutnya anak melakukan kerjasama dengan teman sepermainannya dengan beraneka ragam gerak dan olah tubuhnya. (2) Permainan memberi bentuk, alat permainan dan bahan permainan yang paling baik adalah materi tanpa bentuk, seperti lilin, kertas, air, tanah liat, balok-balok kayu, pasir dan lain-lain. Dan tepat yang paling ideal adalah pantai atau pegunungan yang tenang dan teduh. (3) Permainan ilusi, pada permainan ini unsur fantasi yang paling memegang peranan penting. Misalnya sebuah sapu menjadi kuda tunggangan, kursi menjadi sebuah mobil, termasuk permainan menirukan juga dikategorikan dalam permainan ini. Seperti bermain ibu-ibu, dokter-dokteran, atau tentara, dan lain sebagainya. dan (4) Dalam hal ini, permainan tersebut anak dengan semangat memasuki dunia ilusi yang dijadikan dunia sungguh-sungguh oleh fantasi anak.

Kemudian langkah-langkah utama yang dapat diambil oleh setiap pendidik dan orang tua dalam aktifitas bermain adalah sebagai berikut:

- (1) Jangan mengganggu anak-anak yang sedang asyik bermain dengan permainannya. Terpaksa harus mengalihkan permainannya yang mungkin sedikit berbahaya, maka usiklah sedikit demi sedikit dengan ungkapan-ungkapan yang membangun dan menyenangkan.
- (2) Kemudian yang penting juga adalah bukan jenis dan mahalnnya permainan akan tetapi memberikan kesempatan bermain yang cukup kepada anak untuk bergembira dan melatih diri anak.
- (3) Memberikan ruang bermain yang cukup luas, khususnya untuk

anakanak kota dimana ruang bermain hampir tidak ada dan anak dihadapkan pada banyak bahaya di jalan-jalan raya. (4) Dengan memberikan kesempatan bermain yang kreatif, secara tidak langsung kita telah mencegah dorongan untuk berbuat yang merusak, jadi timbulnya anak-anak yang nakal. (5) Bentuk permainan yang paling ideal terutama bagi anak-anak yang masih sangat muda adalah material yang mudah dibentuk seperti lilin, balok kayu, kertas, dan lain-lain. (6) Dengan bertambahnya usia anak hendaknya disamping unsur suasana permainan yang menyenangkan, perlu pula ditambahkan dimensi kerja, dan kesibukan yang bermanfaat, dan anak mulai merasakan kebahagiaan melalui prestasi sendiri, sehingga anak bisa menghayati rasa kebanggaan oleh hasil karyanya sendiri.

Arah kegiatan pendidikan, Dalam menyusun rencana kegiatan pendidikan diarahkan pada tiga peran pendidikan bagi anak dini usia, yaitu: (1) Pendidikan sebagai proses belajar dalam diri anak, (2) Pendidikan sebagai proses sosialisasi, dan (3) Pendidikan sebagai proses pembentukan kerjasama peran.

Selain itu, kegiatan PAUD hendaknya memperhatikan Sembilan kemampuan belajar anak yang meliputi: (1) Kecerdasan linguistik (*linguistic intelligence*), (2) Kecerdasan logika matematik (*logica-mathematical intelligence*), (3) Kecerdasan visual-spasial (*visual-spatial intelligence*), (4) Kecerdasan musical (*musical intelligence*), (5) Kecerdasan kinestetik (*kinesthetic intelligence*), (6) Kecerdasan naturalis (*naturalist intelligence*), (7) Kecerdasan interpersonal (*interpersonal intelligence*), (8) Kecerdasan intrapersonal

(*intrapersonal intelligence*), dan (9) Kecerdasan spiritual (*spiritual intelligence*).

Aspek pengembangan diarahkan pada: (1) Pengembangan moral dan nilai-nilai agama, (2) Pengembangan fisik, (3) Pengembangan bahasa, (4) Pengembangan kognitif, (5) Pengembangan social emosional, dan (6) Pengembangan seni. Adapun struktur pembelajarannya, dikelompokkan menurut: Kelompok usia, Aspek pengembangan, Kompetensi dan hasil belajar, dan Indikator kemampuan.

Temuan penelitian bahwa Pendidikan itu mulai anak sejak usia dini, bahkan pendidikan anak usia taman kanak-kanak bisa dikatakan terlambat. Hasil penelitian *neurologi Bloom* menegaskan usia 4 tahun pertama separuh kecerdasan manusia sudah terbentuk. Pada usia tersebut otak anak tidak akan berkembang secara optimal. Sampai usia 8 tahun 80% kapasitas kecerdasan anak hanya bertambah sekitar 30% setelah usia 4 tahun hingga mencapai usia 8 tahun. Baru kemudian kapasitas kecerdasan anak bisa mencapai 100% setelah berusia sekitar 18 tahun.

Ketika anak sudah bisa mendengarkan sesuatu, anak sudah bisa mendapatkan pendidikan. Anak usia dini yaitu ketika anak sudah mulai berbicara dan menirukan hal-hal yang ada disekitarnya. Anak wajib kita bimbing dengan pendidikan yang patut dan sesuai dengan usianya. Sangat berbahaya ketika anak disuguhi media yang tidak sepatutnya, misalnya anak dieksploitasi mengikuti gaya dan mode orang dewasa, menyanyi lagu-lagu

dewasa, mengikuti adegan film remaja, dan bahkan baju yang dikenakan oleh orang dewasa. Hal ini sangat buruk dampaknya bagi perkembangan emosi, psikologi anak dan berdampak besar ketika memasuki usia remaja.

Kenyataannya, implementasi peraturan perundangan PAUD untuk anak masih sangat terbatas, terutama karena kurangnya kesadaran orang tua dalam mendidik anak yang sesuai dengan usia dan peraturan yang berlaku.

b. Lingkup Materi Pendidikan

Lingkup materi pendidikan adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak.

Pendidikan multikultural saat ini mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Selain untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, pendidikan multikultural juga berfungsi sebagai sarana menanamkan sikap toleran, adil, dan santun pada diri anak. Dengan adanya pendidikan multukultural ini, diharapkan tidak ada lagi tindakan-tindakan diskriminasi, konflik, dan segala bentuk permusuhan lainnya.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2008, 2011, dan 2014 memperlihatkan kecenderungan peningkatan jumlah dan persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal. Jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir periode sensus terus meningkat dari 2.283 desa/kelurahan pada tahun 2008 menjadi 2.562 desa/kelurahan pada tahun 2014. Secara persentase dibandingkan jumlah total

desa/kelurahan terus meningkat dari 3,03 persen menjadi 3,38 persen pada tahun 2014.

Data tersebut menunjukkan kesesuaian dengan hasil wawancara dengan (AMN) selaku Guru Mata Pelajaran Agama mengatakan bahwa:

Pendidikan multikultural mempunyai peranan penting di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan multikultural sangat tepat diberikan kepada masyarakat di Indonesia, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, pemuda sampai pada orang dewasa. Hal ini dimaksudkan supaya berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah dapat segera teratasi atau minimal berkurang intensitasnya. (Wawancara, 9 November 2018).

Terkait hal tersebut, salah satu cara yang dianggap paling efektif dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural ialah melalui lembaga-lembaga pendidikan, lebih-lebih dimulai sejak dari Taman Kanak-Kanak. Anggapan ini memang ada benarnya, sebab aktivitas anak sehari-hari berlangsung di sekolah. Selain itu, pada usia taman kanak-kanak, seorang anak lebih mudah untuk menerima berbagai informasi baru dan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari.

Kemudian hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan (NSH) selaku Guru Mata Pelajaran Budi Bahasa menguraikan bahwa:

sekitar 50% kapabilitas kecerdasan manusia terjadi ketika berumur 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berumur 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi ketika anak berumur sekitar 18 tahun. Artinya, dengan perkembangan otak yang luar biasa ini, anak usia dini memiliki potensi untuk diberikan bekal pendidikan multikultural dengan lebih mudah dan belum banyak terpengaruh dengan dunia luar. (Wawancara, 11 November 2018).

Namun yang menjadi persoalan se-karang ini adalah banyak guru maupun sekolah yang merasa kesulitan menerapkan pendidikan multikultural di sekolah. Salah satu penyebab utamanya ialah belum adanya kurikulum pendidikan multikultural yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembelajaran. Padahal untuk dapat mengimplementasikan pendidikan multikultural dengan maksimal dibutuhkan adanya kurikulum yang jelas.

Hal ini dikarenakan kurikulum mempunyai peranan yang cukup vital dalam dunia pendidikan. Kurikulum memiliki beberapa peranan utama, yaitu: (1) peranan konservatif, yakni untuk mewariskan, mentransmisikan, dan menafsirkan nilai-nilai sosial dan budaya masa lampau yang tetap eksis dalam masyarakat; (2) peranan kritis dan evaluatif, yakni untuk menilai dan memilih nilai-nilai sosial budaya yang akan diwariskan kepada peserta didik berdasarkan kriteria tertentu; dan (3) peranan kreatif, yakni untuk menciptakan dan menyusun kegiatan-kegiatan yang kreatif dan konstruktif sesuai dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dan sekaligus sebagai pedoman dalam mengatur segala kegiatan pendidikan setiap hari.

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, maka dilakukan wawancara dengan informan (SMD) selaku Anggota Tim Pengajar dari Polri menjelaskan bahwa:

Dalam PBM anak usia dini dijelaskan tentang konsep kurikulum pendidikan multikultural di Taman Kanak-Kanak dan karakteristik model kurikulum pendidikan multikultural. Semuanya dimaksudkan sebagai usulan alternatif kurikulum PAUD di Indonesia. (Wawancara, 13 November 2018).

Pandangan yang tertera pada pendahuluan di atas, pada dasarnya berangkat dari keinginan untuk menanamkan konsep multikultur sejak dini. Pada dasarnya, hakekat PAUD adalah periode pendidikan yang sangat menentukan perkembangan dan arah masa depan seorang anak sebab pendidikan yang dimulai dari usia dini akan membekas dengan baik jika pada masa perkembangannya dilalui dengan suasana yang baik, harmonis, serasi, dan menyenangkan. PAUD merupakan dasar dari pendidikan anak selanjutnya yang penuh dengan tantangan dan berbagai permasalahan yang dihadapi anak. Berarti dengan kata lain, pembelajaran yang diberikan pada anak bila dikemas dengan baik maka akan membekas pada anak dan akan berlanjut pada kehidupannya di masa yang akan datang.

Sejatinya, masa depan seorang anak tidak terlepas dari perkembangan dan pertumbuhan anak sejak lahir, dimana perkembangan dan pertumbuhan seorang anak akan menjadi optimal jika mendapat rangsangan atau stimulus dari lingkungan sekitar anak, baik stimulus yang eksternal maupun internal anak itu sendiri. Begitupun dengan pengalaman akan penerimaan pada keberagaman, maka penerimaan itu akan berbekas dengan baik sampai ia dewasa. Melihat penting dan sangat bermaknanya PAUD dalam upaya menanamkan konsep dan pengalaman bagi anak, maka sangatlah harus adanya perhatian khusus pada PAUD. Perhatian khusus tersebut saat sekarang ini sudah terlihat dari keseriusan pemerintah terhadap pentingnya PAUD berdampak pada tingginya

kesadaran, partisipasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya PAUD dalam menghasilkan sumber daya yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.¹² Berdasarkan undang-undang ini dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa PAUD bukan hanya sebatas pada bentuk pendidikan yang selama ini dipandang rendah oleh masyarakat tetapi lebih dari itu bahwa PAUD sangat berkontribusi pada pemantapan kualitas anak di masa depan. Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan (koordinasi motorik halus dan kasar), intelegensi (daya pikir, daya cipta, kecerdasn emosi, dan kecerdasan spiritual), sosial emosional (sikap perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan keunikan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, anak usia dini terbagi dalam tiga tahapan, yaitu (a) masa bayi lahir sampai 12 bulan, (b) masa *toddler* (batita) usia 1-3 tahun, (c) masa prasekolah usia 3-6 tahun, (d) masa kelas awal SD 6-8 tahun. Petumbuhan dan perkembangan anak usia dini perlu diarahkan pada peletkan dasar-dasar yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik, daya pikir, daya cipta, sosial emosional, bahasa dan komunikasi yang seimbang sebagai dasar pembentukan pribadi yang utuh.

Maka dari itu, kurikulum yang dikembangkan pada PAUD menjadi perhatian yang sangat penting. Dalam PAUD, kurikulum anak usia dini lebih dikenal dengan istilah *Developmentally Appropriate Practices* (DAP). DAP merupakan salah satu acuan dalam pengembangan anak usia dini yang membahas berbagai perkembangan fisik dan mental yang sangat pesat pada anak. Agar fase perkembangan fisik dan mental berkembang secara maksimal, peran sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mendukung perkembangan anak dengan menyediakan dan mengondisikan waktu, kesempatan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk perkembangan fisik dan mental anak menjadi sangat penting. Perlakuan terhadap anak usia dini diyakinimemiliki efek kumulatif yang akan terbawa dan mempengaruhi fisik dan mental anak selama hidupnya. Berkaitan dengan perlakuan dan dukungan keluarga dalam mengoptimalkan kemampuan anak, maka peran keluarga sangatlah besar apalagi dalam upaya menumbuhkan semangat multikultur pada anak.

Berbicara tentang kurikulum anak usia dini, DAP memandang bahwa anak sebagai individu yang unik, memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda satu sama lainnya. Masa-masa semenjak kelahiran hingga tahun ketiga merupakan masa yang spesial dalam kehidupan anak-anak. Masa itu merupakan masa pertumbuhan yang paling hebat dan sekaligus paling penting. Anak-anak memasuki dunia dengan wawasan (*perpectual*), kemampuan motorik yang mengejutkan dan seperangkat kemampuan sosia untuk berinteraksi dengan

orang lain serta kemampuan untuk belajar yang siap digunakan begitu mereka lahir.

Kalau kita dapat memanfaatkan situasi dimana anak sangat hebat-hebatnya berkembang maka bukan tidak mungkin anak akan menjadi insan yang luar biasa. Anak yang hebat bukan hanya anak yang memiliki kelebihan baik dalam bentuk fisik maupun intelektual, namun anak yang dapat beradaptasi dengan baik, anak yang dapat memberikan penghormatan dan penghargaan baik kepada orang lain ituah yang sebenarnya dikatakan dengan anak hebat. Setiap orang pasti mendambakan anak yang seperti ini, anak yang memiliki kemampuan dan kecerdasan sosial yang baik pastinya menjadi keinginan setiap orang. Anak yang faham dan mengerti akan keberagaman dan anak yang sangat toleran dalam kehidupan menjadi dambaan setiap orang dalam kaitannya dengan upeya menciptakan masyarakat yang aman, damai, sejahtera dan penuh berkah dari Allah SWT. Usaha untuk menjaga keamanan dan kedamaian pada kehidupan merupakan salah satu bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT, karena taqwa berarti kita menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT.

Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar kegiatan seseorang atau sekelompok orang dan atau lembaga pendidikan dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan mengandung dua dimensi, yaitu dimensi berpikir dan dimensi bertindak.

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hewan juga belajar tetapi lebih ditentukan dengan instingnya. Sedangkan manusia belajar merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan dalam kehidupan yang bermakna.

Pendidikan berfungsi memanusiaikan manusia, bersifat normatif, dan harus dapat di pertanggungjawabkan. Ada beberapa aliran filsafat pendidikan, misalnya idealisme, realisme, dan pragmatism. Landasan filosofis pendidikan dalam konteks sistem pendidikan nasional, yaitu pancasila. Ada berbagai asumsi filsafat pendidikan nasional (Pancasila) yang meliputi hakekat realitas, pengetahuan, nilai serta implikasinya terhadap pendidikan yang meliputi hakekat tujuan pendidikan yaitu isi kurikulum pendidikan, metode pendidikan dan peranan pendidikan.

Peserta didik menerima pendidikan dari orang tuanya, disaat peserta didik ini dewasa dan berkeluarga mereka akan mendidik anak-anak mereka juga. Begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi. Para peserta didik dan mahasiswa diajar oleh guru dan dosen. Dalam pendidikan dikenal istilah mengajar dan mendidik, untuk melakukan kedua hal itu tentunya diperlukan acuan proses pengajaran dan pendidikan agar berjalan sesuai harapan Bangsa dan Negara.

Makna landasan pendidikan adalah (a) Landasan religius pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi tolak

ukur dalam rangka praktek pendidikan. (b) Landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi tolok ukur dalam rangka praktek pendidikan. dan (c) Landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi tolok ukur dalam rangka praktek pendidikan. Tergolong kedalam landasan ilmiah pendidikan antara lain: landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dsb. Landasan ilmiah pendidikan di kenal pula sebagai landasan empiris atau faktual pendidikan.

Pertama, Landasan religious pendidikan adalah upaya mengaitkan nilai-nilai agama dalam PBM. Dalam landasan religious, guru pada dasarnya ingin menetapkan peserta didik sebagai makhluk Tuhan dengan segenap kemuliaannya menjadi fokus sentral upaya pendidikan.

Agama merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi keagamaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu dalam proses pelayanan yang diberikan pada setiap peserta didik, konselor harus memperhatikan dimensi agamanya, sehingga pemberian solusi sesuai aturan atau akidah agama yang diyakini, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang mereka anut.

Hakekat landasan religius pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan tolok ukur dalam pendidikan. Contohnya: Carilah ilmu sejak dari buaian hingga masuk liang lahat/meninggal

dunia. Menuntut ilmu adalah “*fardhlu aing* (wajib) bagi setiap muslim.” (hadist). Implikasi bagi setiap orang muslim bahwa belajar atau melaksanakan pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu kewajiban.

Dengan mengamalkan ajaran agama, berarti manusia telah mewujudkan jati dirinya dan identitas dirinya yang hakiki, yaitu sebagai Abdullah (hamba Allah) dan khalifah (perwakilan) di muka bumi. Sebagai khalifah berarti manusia menurut fitrahnya adalah mahluk sosial yang bersifat *altruis* (sikap sosial untuk membantu orang lain). Manusia yang diciptakan Allah SWT sebagai khalifah memiliki kemerdekaan untuk mengembangkan dirinya. Allah SWT melengkapi manusia dengan sifat *khouf* (rasa cemas, takut, dan khawatir) dan *rojaa* (sikap penuh harapan dan optimis). Kondisi ini merupakan sifat eksistensi manusia yang tak dapat dihindari, dan kedua-duanya merupakan kekuatan yang ada pada diri manusia.

Kedua, Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan tolok ukur dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Dalam pendidikan terdapat momen studi dan praktek pendidikan. Melalui studi pendidikan akan diperoleh pemahaman tentang landasan-landasan pendidikan, yang akan dijadikan tolok ukur praktek pendidikan. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan dapat dijadikan tolok ukur dalam rangka studi pendidikan yang bersifat filsafiah, yaitu pendekatan yang lebih komprehensif, spekulatif, dan normatif.

Makna Ontologi (hakekat realitas), sesuai dengan realitas atau alam semesta, tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai ciptaan (makhluk) TYME. Jadi di alam semesta bukan hanya realitas fisik atau non fisik, yang tampak dalam pluralitas fenomena alam semesta sebagai keseluruhan yang integral. Sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945 bahwa hakekat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa (YMK) dan perjuangan yang di dorong oleh keinginan luhur untuk mncapai dan mengisi kemerdekaan.

Epistemologi (hakekat pengetahuan), segala pengetahuan hakekatnya bersumber dari TYME. Manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui berpikir, pengalaman empiris, penghayatan dan intuisi dalam konteks interaksi/komunikasi dengan segala yang ada dalam hidupnya.

Aksiologi (hakekat nilai). Sumber segala nilai hakekatnya adalah TYME. Manusia sebagai masyarakat dan individu adalah makhluk Tuhan, insan pribadi sekaligus insan sosial, maka hakekat nilai diturunkan dari TYME. Atas dasar filsafat atau pandangan hidup sebagaimana yang terkandung dalam butir-butir Pancasila. Dengan demikian, hasil penelitian dalam konteks landasan filosofis pendidikan adalah untuk mengkaji aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang bersifat preskriptif dari suatu disiplin ilmu.

Ketiga, Landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi pendidikan yang bersumber dari hasil studi disiplin ilmu yang dijadikan tolak berpikir dan bertindak dalam rangka proses pendidikan. Ilmu pengetahuan

merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan pada umumnya ditempuh melalui rangkaian kegiatan penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan dan penerapan teknologi, serta diikuti dengan evaluasi etis-politis-religius. Lembaga pendidikan di sekolah harus mengakomodir dan mengantisipasi perkembangan iptek. Materi ajar yang digunakan dalam proses pendidikan seharusnya hasil dari perkembangan iptek mutakhir.

Makna hasil wawancara di atas, adalah: *Pertama*, **landasan ilmu psikologis** pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin psikologi yang dijadikan tolok ukur dalam rangka praktek pendidikan. Dengan memahami bahwa manusia merupakan “mahkluk sosial dalam proses pencarian jati dirinya sebagai manusia seutuhnya”, karena manusia masih berada dalam perjalanan hidup, perkembangan dan pengembangan diri. Pada rana pengembangan diri dilakukan melalui pengajaran, dimana terdapat individu dalam proses belajar. Pada disiplin ilmu psikologi mengkaji perkembangan individu (*development*) dan bagaimana individu itu belajar (*learning*) yang hasilnya akan berimplikasi terhadap pendidikan.

Kedua, **Landasan ilmu sosiologis pendidikan** adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan tolok ukur dalam rangka praktek pendidikan. Memahami bahwa manusia adalah mahkluk individual sekaligus juga adalah mahkluk sosial atau mahkluk

bermasyarakat. Tentang bagaimana interaksi individu dan kelompok di dalam masyarakat di kaji lebih lanjut secara ilmiah dalam disiplin ilmu sosiologi.

Ketiga, Landasan ilmu antropologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin antropologi yang dijadikan tolok ukur dalam rangka praktek pendidikan. Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga adalah makhluk berbudaya. Manusia menciptakan kebudayaan, yaitu keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan manusia itu sendiri melalui PBM.

Keempat, Landasan ilmu historis pendidikan merupakan seperangkat konsep dan praktek pendidikan masa lampau sebagai tolok ukur sistem pendidikan masa kini yang terarah ke masa depan. Pendidikan masa kini tidak terwujud begitu saja secara tiba-tiba, melainkan merupakan kesinambungan dari pendidikan pada masa lampau. Dalam kesinambungan tersebut, konsep dan praktek pendidikan masa lampau yang dipandang baik dan berguna akan tetap dipertahankan. Sedangkan konsep dan praktek pendidikan yang dipandang tidak baik dan tidak berguna atau keliru akan di perbaiki atau dikembangkan sehingga berbeda dengan konsep dan praktek pendidikan masa lampau.

Kelima, Landasan ilmu ekonomis pendidikan, merupakan studi tentang kemakmuran materi manusia. Masalah pokok ekonomi mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, distribusi dan pertumbuhan sepanjang waktu. Faktor-faktor yang sangat penting dalam

ekonomi (pembangunan) adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal, teknologi dan kewiraswastaan, serta sosio-budaya. Faktor ekonomi yang sangat berkesesuaian dengan pendidikan adalah SDM.

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, pendidikan *adalah human investment* atau upaya penanaman modal pada diri manusia. Pendidikan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Terdapat hubungan antara pendidikan dan ekonomi melalui pendidikan tenaga kerja produktif yang dapat menghasilkan. Untuk itu, pelaksanaan pendidikan memerlukan sejumlah dana yang harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

Keenam, Landasan ilmu yuridis pendidikan bersifat ideal dan normatif, artinya merupakan sesuatu yang diharapkan dilaksanakan dan mengikat setiap pengelola, penyelenggara dan pelaksana pendidikan di dalam sistem pendidikan nasional.

Akar pendidikan nasional pada dasarnya merupakan usaha kultural dengan maksud mempertinggi kualitas hidup dan kehidupan manusia secara individual, kelompok masyarakat maupun sebagai bangsa. Pendidikan harus dikembangkan yang bersumber dari nilai-nilai agama, kebudayaan dan adat istiadat. Secara yuridis, pada pasal 1 ayat 2 UU Negara RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di tegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945

yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perumateri zaman.

Adapun definisi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah: *Pertama*, definisi pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pasal 1 UU RI No. 20/ 2003).

Kedua, fungsi pendidikan nasional adalah Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ketiga, tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada TYME, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Temuan Penelitian bahwa Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) konsep kurikulum pendidikan multikultural di Taman Kanak-Kanak dimaknai sebagai bentuk kurikulum yang memuat materi-materi pendidikan multikultural yang diperuntukkan bagi pembelajaran anak usia dini. Di mana tujuannya ialah untuk mengenalkan dan menanamkan anak usia dini sikap kebersamaan, keadilan, dan toleransi. (2) model pengembangan kurikulum

pendidikan multikultural di Taman Kanak-Kanak dilakukan dengan memperhatikan landasan, prinsip, dan pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan multikultural. Adapun model pendekatan yang dapat digunakan dan diimplementasikan dalam pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu pendekatan kontribusi dan aditif. dan (3) Landasan ilmiah pendidikan sangat menentukan bagi kehidupan umat manusia. Sebab pendidikan bersumber dari hasil studi berbagai disiplin ilmu menjadi tolok berpikir dan bertindak dalam rangka proses pendidikan.

2. Proses Pendidikan

a. Persiapan Materi Pengajaran

Persiapan materi pengajaran yaitu program pengajaran yang memuat satuan bahasan untuk disajikan dalam beberapa kali pertemuan agar lebih terarah dan berjalan efisien dan efektif.

Umumnya tugas implementasi adalah mengaitkan realisasi tujuan kebijakan publik dengan hasil kegiatan pemerintah. Tugas implementasi meliputi kreasi tentang sistem pengiriman kebijakan, didesain dengan cara khusus dan diupayakan dengan harapan mencapai tujuan khusus tersebut. Jadi kebijakan publik merupakan suatu pernyataan yang luas meliputi cita-cita (*goals*), tujuan (*objectives*) dan cara yang diwujudkan dalam program aksi yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan.

1) Aspek Komunikasi.

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi menggambarkan bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu informasi tertentu kepada orang lain atau masyarakat sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan akan dapat tercapai. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana apabila para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Agar implementasi efektif, siapapun yang bertanggung jawab terhadap sebuah keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Artinya bahwa pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus dikomunikasikan (*ditransmisikan*)

kepada personil yang tepat dan perintah tersebut harus jelas, akurat dan konsisten. Bereknaan dengan itu, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan (AMN) selaku Guru Mata Pelajaran Agama bahwa:

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok/lembaga sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektifitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan isi kebijakan kepada kelompok/lembaga sasaran akan sangat berperan. (Wawancara, 15 November 2018).

Adapun proses komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Program PAUD melalui kegiatan Pemberian Bantuan Dana Rintisan PAUD (baru); Biaya Operasional Pembelajaran (BOP); dan Alat Permainan Edukatif (APE) serta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tenaga Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan PAUD pada Dinas PK Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah dilaksanakan namun belum berjalan efektif sebagaimana diharapkan.

Adanya Program PAUD, masih perlu disosialisasikan kepada seluruh pelaksana kebijakan termasuk lembaga PAUD atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PK Kabupaten Kepulauan Selayar Bidang PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) telah merespon kebijakan Program PAUD ini, namun belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih belum didukung penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat atau lembaga PAUD, sehingga menimbulkan miss

komunikasi yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan atau program PAUD.

Sesuai dengan hal di atas, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan (MRY) selaku Guru Mata Pelajaran Berhitung mengatakan bahwa:

Dinas PK Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Bidang PAUDNI memberikan respon terhadap pengimplementasian kebijakan PAUD. Hal ini dibuktikan dengan upaya pembangunan sekolah-sekolah PAUD untuk mengakomodir kebutuhan PAUD. (Wawancara, 17 November 2018).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan program PAUD di Bidang PAUDNI yang dilihat dari aspek komunikasi, maka dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi sudah berjalan, tetapi belum menyentuh pada hal-hal yang substansi, seperti perbedaan pemahaman tentang tujuan kebijakan program PAUD, sehingga menyebabkan tujuan kebijakan itu tidak semuanya dipahami oleh pelaksana kebijakan.

Mengacu pada hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti diperoleh data atau informasi bahwa pada dasarnya komunikasi kepada masyarakat atau lembaga PAUD yang dilakukan Satuan Kerja (Satker) pelaksana kegiatan Program PAUD Kabupaten Kepulauan Selayar sudah berjalan. Hal ini terlihat dari kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang diselenggarakan Satker dalam rangka pelaksanaan kegiatan program PAUD, dan keaktifan dalam memberikan informasi baik dalam forum formal dan nonformal. Namun disisi lain, terjadi miss komunikasi antara Satker Dinas Pendidikan Provinsi pada beberapa kabupaten dimana dalam pelaksanaannya

terdapat beberapa lembaga penyelenggara program PAUD yang mengusulkan proposal bantuan Program PAUD yang persyaratan administrasinya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis. Seperti: rekening bank tidak aktif, rekening bank tutup, dan penggunaan rekening atas nama pribadi (bukan atas nama lembaga). Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dan mempengaruhi ketidakefektifan dalam proses implementasi kebijakan program PAUD di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar .

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam proses implementasi kebijakan program PAUD Dinas PK Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar belum sepenuhnya berjalan baik, efektif dan maksimal. Sehingga masih diperlukan agenda sosialisasi pada masyarakat atau lembaga PAUD agar kedepannya mereka lebih mengetahui dan memahami implementasi kebijakan tentang program PAUD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar tidak lagi terjadi miss komunikasi yang dapat merugikan masyarakat atau lembaga PAUD di tahun-tahun yang akan datang.

2) Aspek Sumber Daya.

Suatu organisasi yang ingin maju dan berkembang harus memenuhi syarat diantaranya adalah kepemilikan terhadap sumber daya (resources). Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya-sumber daya memadai yang tersedia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya utama yang terpenting dalam menentukan keberhasilan

suatu implementasi kebijakan atau program. Setiap tahap implementasi kebijakan atau program menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan yang dipersyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Dinas PK Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Bidang PAUD, Non Formal dan Informal (PAUDNI) merupakan bagian dari suatu organisasi, dan Lembaga PAUD merupakan suatu organisasi yang membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Program PAUD. Oleh karena itu membutuhkan sumberdaya yang memadai. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Meskipun pihak pelaksana kebijakan sudah menjelaskan kepada masyarakat dan konsisten terhadap aturan, akan tetapi tanpa dukungan sumber-sumber daya yang cukup dan memadai maka kebijakan atau program tersebut akan mengalami hambatan untuk mencapai tujuan secara efektif. Adapun sumber-sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan (anggaran), sumber daya sarana dan prasarana (tanah, gedung dan peralatan lainnya) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan atau program.

Sesuai dengan hal di atas, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan (NSH) selaku Guru Mata Pelajaran Budi Bahasa mengemukakan bahwa:

Sumber daya merupakan faktor yang terpenting dalam melaksanakan kebijakan publik. Pemerintah-perintah implementasi mungkin diteruskan

secara cermat, jelas dan konsisten. Tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan atau program maka implementasinya pun cenderung tidak efektif dan maksimal. Sumber-sumber daya yang penting meliputi: Staf yang memadai serta memiliki keahlian-keahlian atau keterampilan yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, informasi, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usulan-usulan di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. (Wawancara, 19 November 2018).

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terkait sumber daya manusia pelaksana kegiatan Program PAUD di Kantor Dinas PK Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Bidang PAUD, PAUDNI, dari segi jumlah kuantitasnya sudah cukup memadai; yaitu sebanyak 24 orang berstatus PNS termasuk Kepala Bidang dan Kepala Seksi, dan sebanyak 14 orang Non PNS. Dilihat dari segi kualitas SDM sudah cukup baik, namun untuk staf pelaksana masih perlu dilakukan dan didorong mengikuti pelatihan-pelatihan teknis, sehingga semua staf pelaksana dapat memiliki kemampuan dan keterampilan atau kompetensi professional dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya, terutama dalam melaksanakan kegiatan program PAUD dan pelayanan rutin lainnya. Sarana dan prasarana masih kurang karena kendala listrik baik eksternal maupun internal. Faktor internalnya adalah daya listrik yang ada di Bidang PAUDNI Dinas PK Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih kurang dimana hanya 16.000 watt sehingga sering mati disaat sedang kerja rutin walaupun dalam kondisi normal atau tidak ada pemadaman

lampu pada PLN. Sementara kebutuhan daya listrik di kantor Bidang PAUDNI adalah sebesar 23.000 watt.

Selain masalah listrik, kendala lain yang menjadi penghambat kelancaran pelaksanaan kerja rutin juga adalah mesin komputer masih kurang dan jaringan internet lemah. Dari hasil pengamatan peneliti juga adalah Staf pada Bidang PAUDNI, kendala ini terus terjadi setiap hari kerja. Oleh karena itu, disarankan agar menjadi perhatian untuk segera menambah beberapa unit mesin komputer baru. Juga daya listrik dan jaringan internet yang lemah supaya menjadi perhatian untuk segera diantisipasi dengan mengajukan ke pihak PLN penambahan daya listrik dan pihak pengelola Telkom untuk mendapatkan pemasangan jaringan internet yang kuat.

Sedangkan anggaran (dana) operasional kegiatan bersumber dari APBD Provinsi yang DPA-nya melekat pada Sekretariat Dinas PK Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang pencairannya setiap triwulan dalam bentuk barang/ATK dan honor kegiatan. Sumber lainnya dari komite yang besarnya Rp. 275.000, per orangtua anak.

Jumlah maupun kualitas guru dan tenaga kependidikan PAUD di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas. Dimana kualifikasi pendidikan (akademik) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD sekitar 63,30 % atau 7.890 dari 12.465 Guru dan Tenaga Kependidikan, hanya berkualifikasi pendidikan SMA atau sederajat. Sementara tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa

Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan minimal harus berkualifikasi pendidikan S1 atau Akta IV.

Berkaitan dengan hal diatas, maka peneliti mewancarai infoman (RSN) selaku Guru Mata Pelajaran Membaca dengan pernyataan bahwa:

Selain jumlah dan kualitas sumber daya Pendidik (guru) dan GTK PAUD. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan juga belum semua Satuan PAUD memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sesuai kriteria berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Sarana (peralatan, termasuk APE dalam dan luar ruangan) dan prasarana PAUD berupa Gedung dan infrastruktur lainnya yang masih sangat kurang dan belum memadai; serta anggaran (dana) yang terbatas. Sumber daya manusia pada lembaga PAUD yang dimonitoring juga masih kurang dan belum memadai. Pada PAUD TK Negeri Model Madani; GTK sebanyak 13 orang, yaitu 6 orang guru, 1 orang Kepala TK dan 2 orang staf tata usaha dengan kualifikasi akademik S1/Akta IV dan 2 orang penjaga keamanan dan 2 orang petugas kebersihan. Sarana (peralatan) seperti APE dalam ruangan, yang ada di PAUD TK di daerah ini terasa masih kurang dan perlu penambahan. Sedangkan Prasarana: gedung dan infrastruktur pendukung lainnya sudah cukup memadai dan perlu pemeliharaan. GTK; Sarana (peralatan) seperti APE dalam ruangan, yang ada di PAUD TK terasa masih kurang dan perlu penambahan. Prasarana: gedung dan infrastruktur pendukung lainnya sudah cukup memadai dan perlu pemeliharaan. (Wawancara, 21 November 2018).

Sedangkan anggaran (dana) operasional kegiatan bersumber dari APBD Provinsi yang DPA-nya melekat pada Sekretariat Dinas PK Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang pencairannya setiap triwulan dalam bentuk barang/ATK dan honor kegiatan. Sumber lainnya dari komite yang besarnya Rp. 275.000, per orangtua anak.

Berdasarkan hasil wawancara terkait kondisi sumber daya; Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa standar kualifikasi pendidikan, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, PAUD belum memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi guru sesuai kriteria Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Sarana dan prasarana yang masih sangat kurang, dan pengalokasian anggaran (dana) untuk PAUD yang masih kurang dan terbatas. Maka kondisi yang demikian tentunya sangat menghambat peningkatan kualitas layanan PAUD di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Oleh karena itu disarankan agar hendaknya perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota dalam penanganannya. Sehingga pada gilirannya “Visi dan Misi” Dinas PK Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Bidang PAUD, dan juga “Visi dan Misi” serta tujuan Satuan PAUD dapat terlaksana dan terwujud dengan baik, efektif dan maksimal dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sesuai tuntutan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bab III pasal 4 bahwa Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu: huruf (a) meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau; huruf (b) meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing luaran pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat.

3) Aspek Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) dan wawancara dengan informan, peneliti melihat bahwa sikap pelaksana kebijakan atau program PAUD di Bidang PAUDNI Dinas PK Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sangat merespon kebijakan program PAUD ini dengan baik, namun masih perlu diikuti dengan memaksimalkan agenda sosialisasi.

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif dan adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Keberhasilan implementasi kebijakan atau program bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Setiap kebijakan atau program pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan atau sikap penerimaan oleh para pelaksana, dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Sesuai keterangan di atas, maka peneliti melanjutkan penelusuran data melalui wawancara dengan informan (RR) selaku Guru Mata Pelajaran Bersosialisasi Lingkungan dengan kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi kebijakan program PAUD Dinas PK Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat disimpulkan bahwa Bidang PAUDNI (Kepala Bidang PAUDNI bersama Staf) yang merupakan pejabat pembina dan pelaksana teknis Bidang PAUD di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kesamaan sikap dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan program PAUD. (Wawancara, 23 November 2018).

Bahwa Penyelenggaraan dan Pembinaan Pendidikan tetap terus dilakukan sesuai Visi dan Misi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Pendidikan di Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, termasuk di dalamnya Pelaksanaan Pembinaan serta Pengembangan PAUD dengan melalui berbagai Program PAUD setiap tahun anggaran yang ditetapkan. Baik dalam bentuk program bantuan Biaya Operasional PAUD (BOP), sarana dan prasarana (peralatan dan gedung) maupun pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD yang ada dilembaga-lembaga PAUD se Sulawesi Tengah. Kami berharap kegiatan program PAUD dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tetap berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis penyelenggaraan program yang sudah ditetapkan.

Berkenaan dengan asumsi di atas, maka peneliti melakukan konfirmasi melalui wawancara dengan informan (SR) selaku Guru Mata Pelajaran Bernyanyi dengan kesimpulan hasil sbb:

Demikian juga pihak Kepala/Pengelola PAUD TK (lembaga PAUD yang dimonitoring) memiliki kesamaan sikap dan komitmen yang tinggi pula dalam penyelenggaraan kegiatan atau program PAUD. Dalam proses pelaksanaan kegiatan program PAUD berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. (Wawancara, 25 November 2018).

Penyelenggaraan kegiatan program PAUD TK dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan lembaga; Dalam proses penyusunan rencana kegiatan pembelajaran baik rencana tahunan, semesteran, bulanan, rencana mingguan dan rencana harian (RKPT, RKPS, RKPb, RKPM dan RKPH) dengan menggunakan Pedoman Penyusunan SOP pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Juga berpedoman pada Permendiknas RI Nomor 58 tahun 2009 dan telah dirubah dengan Permendikbud Nomor: 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD (Standar PAUD) dan Permendikbud RI Nomor: 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD, dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.

Berdasarkan respon positif baik dari pihak Bidang PAUDNI Dinas PK Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, pihak Kepala/Pengelola PAUD yang dimonitoring tersebut di atas, maka disarankan agar komitmen yang tinggi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan, namun masih perlu diikuti

dengan memaksimalkan agenda sosialisasi. Dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga visi, misi, dan tujuan lembaga PAUD yang dibina dapat tercapai dan terwujud dengan baik lebih efektif dan maksimal.

4) Aspek Struktur Birokrasi.

Struktur birokrasi (struktur organisasi) sangat diperlukan untuk mendukung kinerja sumber daya maupun pihak-pihak yang terkait (stakeholders) dengan proses implementasi kebijakan dengan cara adanya pembagian tugas maupun tanggung jawab yang jelas, sehingga tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses penerapan suatu kebijakan. Adanya pembagian tugas maupun struktur birokrasi yang jelas akan mencegah untuk tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses penerapan suatu kebijakan. Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia.

Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh

siapapun karena akan menjadi acuan pelaksana (implementor) dalam melaksanakan tugas kerjanya.

Sesuai numenklatur dan keterangan penelitian yang telah peneliti temukan dan pelajari, maka peneliti melakukan trianggulasi data melalui wawancara kepada informan (NHR) selaku Guru Mata Pelajaran Keterampilan dengan asumsi bahwa:

Pola kerja pendidikan dan keterampilan yang dilakukan di Kepulauan Selayar cukup mendapat respon dari masyarakat, sebab dapat meringankan beban orang tua murid PAUD dan dapat anak-anaknya dapat memperoleh pengetahuan etika moral dari sang guru. Sebab anak-anak usia dini ini lebih cepat menerima dan menirukan diklat dari luar lingkungan keluarganya ketimbang dari lingkungan keluarganya sendiri. Sehingga harapan orang tua agar pola diklat secara terstruktur dapat dipertahankan dan dikembangkan terus untuk memenuhi kebutuhan anak usia dini dan harapan orang tuanya. (Wawancara, 27 November 2018).

Dari hasil observasi maupun wawancara dengan informan, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Satuan kerja (Satker) atau Fungsi sebagai pejabat pengelola sudah berjalan dengan baik. Dalam implementasi kebijakan program PAUD tidak hanya Bidang PAUDNI yang nampak bekerja, tetapi juga dukungan dari masyarakat atau Pengelola lembaga PAUD yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Mekanisme implementasi kebijakan program PAUD sudah ditetapkan melalui SOP yang dicantumkan dalam petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang menjadi garis pedoman (guideline) kebijakan atau program PAUD yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.

Temuan penelitian bahwa Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program PAUD pada Dinas PK Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar belum sepenuhnya berjalan efektif dan maksimal. Dari 4 (empat) aspek: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi/ Sikap Pelaksana; dan Struktur Birokrasi yang digunakan untuk menjadi ukuran dalam menganalisis tentang implementasi kebijakan program PAUD. Dalam penelitian ini ada 2 (dua) aspek yaitu; Komunikasi dan Sumber daya yang belum berjalan secara efektif dan maksimal, sehingga menjadi faktor penghambat. Sedangkan aspek lainnya yaitu Disposisi/Sikap Pelaksana dan Struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik, efektif dan maksimal. Ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar dalam melaksanakan kebijakan program PAUD di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun-tahun yang akan datang lebih efektif dan maksimal lagi.

b. Implementasi Program Pendidikan

Implementasi program pendidikan yaitu aktivitas proses pendidikan secara terprogram terhadap anak usia dini. Salah satu tujuan negara Indonesia dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke 3 (tiga) adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka setiap warga Negara Republik Indonesia berhak memperoleh akses dan kesempatan pendidikan yang merata, bermutu dan relevan, serta berdaya saing sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan yang dimiliki setiap warga negara tanpa memandang status sosial, etnis dan gender di seluruh pelosok tanah air.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dikeluarkan kebijakan yang mengatur tentang sistem penyelenggaraan pendidikan sebagaimana terakhir dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14 dinyatakan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam (0-6 tahun) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan PAUD memberikan kepercayaan orang tua murid anak usia dini mempercayakan diklat kepada sekolah TK, agar anak-anaknya dapat memperoleh pengetahuan formal sebagaimana numenklatur dan tuntutan zaman. Atas dasar ini, maka peneliti melakukan wawancara terhadap informan (RHN) selaku Ketua Tim Pengajar dari Polri dengan asumsi sbb:

Penyelenggaraan PAUD memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, serta mengembangkan bakat-bakatnya secara optimal; selain itu juga memberikan bimbingan yang seksama agar anak-anak memiliki sifat-sifat, nilai-nilai, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu usaha untuk mendorong bentuk PAUD menjadi perhatian kita semua khususnya pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (Wawancara, 29 November 2018).

Disisi lainnya, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai tuntutan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk mengklarifikasi data di atas, maka peneliti melakukan triangulasi data melalui hasil wawancara dengan informan (SMD) selaku Anggota Tim Pengajar dari Polrimengemukakan bahwa:

Setiap guru sebagai tenaga profesional wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat yang sesuai dengan kewenangan mengajar (setiap guru di sebuah jenjang pendidikan harus berkualifikasi minimal Strata satu (S1). Sementara ribuan guru PAUD di Kepulauan Selayar hanya tamatan SMA dan sederajat. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengupayakan pengembangan Pendidik (Guru) dan PTK PAUD melalui program peningkatan kualifikasi akademik Akta IV atau S1. (Wawancara, 2 Desember 2018).

Sebagai bahan perbandingan data hasil wawancara, maka peneliti melakukan survey dengan hasil observasi implementasi kebijakan program PAUD, khususnya di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ternyata belum terlaksana dengan baik, efektif dan maksimal. Hal ini dapat dilihat kurangnya partisipasi atau kepedulian pemerintah daerah terhadap PAUD, antara lain: kurangnya perhatian terhadap tenaga pendidik dan kependidikan, kurangnya pembinaan terhadap tenaga pendidik, kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana, pengelolaan yang kurang bagus serta hambatan yang paling sering dihadapi adalah pembiayaan, sehingga apabila terus dibiarkan maka berdampak pada lembaga PAUD terbengkalai bahkan terancam tutup. Oleh karena itu agar dampak tersebut dapat dihindari maka diperlukan perhatian serius terhadap implementasi kebijakan program PAUD khususnya di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hal yang menjadi penting dalam penyelenggaraan program PAUD adalah faktor komunikasi, dan dukungan sumber daya relatif belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 42 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu. Atas penjelasan tersebut, maka peneliti melakukan konfirmasi data melalui wawancara dengan informan (NRL) selaku Anggota Tim Pengajar dari Polri dengan pernyataan sbb:

Melihat kondisi tersebut, terdapat 4 (empat) faktor yang menentukan dalam pengelolaan PAUD yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi/sikap pelaksana, dan Struktur Birokrasi yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, adalah komunikasi antar pihak terkait (*stakeholders*) dalam mengimplemtasikan kebijakan mengalami ketidakefektifan, dan sumber daya manusia yang tidak memadai dan mempunyai kualitas rendah, disposisi pelaksana program dan struktur birokrasi pelaksana menjadi lebih baik dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan sesuai dengan Prosedur, Strategi, Prinsip dan Pendekatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan. (Wawancara, 4 Desember 2018).

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi awal atas permasalahan dan pentingnya PAUD sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah bagaimana implementasi kebijakan program PAUD dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program PAUD di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari hasil penelitian dan penelaahan nantinya diharapkan dapat memberikan suatu solusi yang dapat dijadikan bahan rekomendasi sebagai saran positif dalam mengatasi berbagai

permasalahan terkait implementasi kebijakan program PAUD di daerah Kepulauan Selayar.

Di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu perlu memperhatikan 4 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan kebijakan yang dilaksanakan yaitu: (1) Komunikasi; keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. (2) Sumber daya; walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. (3) Disposisi/karakter pelaksana; adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda

dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. dan (4) Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

3. Evaluasi Hasil Pendidikan

a. Peningkatan Mutu Pembelajaran

Peningkatan mutu pendidikan yaitu upaya mengembangkan kemampuan, sikap yang berahlak disegala bidang untuk keberhasilan PAUD. Mutu pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku murid dalam usaha mendewasakannya melalui upaya bimbingan pengajaran dan pelatihan.

1) Pengelolaan kelas

Di dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan terkadang selalu saja ada hambatan atau halangan yang dialami. Hal tersebut dapat menghambat kinerja guru, Berikut ini adalah hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam kepada informan terlibat atau subjek dalam hal ini adalah guru PAUD Fatimah mengenai pengelolaan kelas,

penggunaan media dan sumber belajar, penggunaan metode pembelajaran dan evaluasi atau penilaian pembelajaran.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan yang diperoleh dari informan (AMN) selaku Guru Mata Pelajaran Agama sebagai berikut:

Memberikan stimulasi berbagai aspek demi menumbuhkan perkembangan anak. Menenangkan suasana kelas sehingga terjadi interaksi yang kondusif antara guru dan anak didik. Menggunakan media yang bisa merangsang perhatian anak sehingga materi yang akan diajarkan menyenangkan anak-anak. (Wawancara, 6 Desember 2018).

Stimulasi pada anak menjadi wajar dilakukan oleh setiap guru, guna memberikan wawasan maupun pandangan bagi setiap anak. Pengendalian kelas supaya kondusif menjadi prioritas utama pembelajaran dalam memberikan ilmu pengetahuan peserta didik.

Peneliti juga memberikan pertanyaan yang sama kepada informan (MRY) selaku Guru Mata Pelajaran Berhitung dan jawaban informan adalah: “Dengan metode bercerita, menggunakan media Alat Permainan Edukatif (APE) sesuai dengan tema”. (Wawancara, 8 Desember 2018).

Bercerita dan penggunaan media atau alat bantu ajar menjadi kewajiban bagi setiap guru, karena sesuai dengan kemampuan anak diusianya yang masih belia, media tersebut yang menjadi mudah mereka tangkap dan pahami. Hal yang sama juga dinyatakan kepada informan (NSH) selaku Guru Mata Pelajaran Budi Bahasa dengan asumsi sebagai berikut:

Dalam memberikan materi yaitu dengan menggunakan media atau alat bantu pembelajaran yaitu alat permainan edukatif seperti gambar, benda

tiga dimensi atau benda lain yang sesuai dengan tema pembelajaran”. (Wawancara, 10 Desember 2018).

Dari wawancara di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dengan media bercerita merupakan salah satu langkahlangkah yang digunakan dalam memberikan materi ajar khususnya menggunakan media atau alat bantu APE. Hal ini dirasa sangat efektif dalam memudahkan siswa untuk memahami materi ajar sekaligus guna meningkatkan mutu pendidikan anak. Lingkungan kelas sebagai tempat belajar siswa menjadi tempat yang perlu diperhatikan, sehingga perlu adanya langkah-langkah dalam pengelolaannya.

Hasil wawancara selanjutnya dengan informan (RSN) selaku Guru Mata Pelajaran Membaca menjelaskan mengenai langkah guru dalam mengelola kelas ketika proses KBM berlangsung, bahwa: “Pengelolaan kelas berpusat pada anak, anak memiliki sendiri kegiatan, memberikan kesempatan untuk bermain aktif dan menggunakan alat permainan yang edukatif”. (Wawancara, 12 Desember 2018).

Pengelolaan terpusat yang dimaksud adalah pengelolaan memfokuskan pada satu objek, dimana objek tersebut adalah peserta didik. Memberi kebebasan dan terkontrol bagi anak selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, sehingga dapat memberikan rasa percaya diri dan bertanggung jawab bagi setiap anak. Pijakan lingkungan, pijakan sebelum main, pijakan saat main, pijakan setelah main. Pijakan tersebut diberikan sebagai batasan dan aturan dalam semua kegiatan anak didik Memfokuskan anak pada materi ajar

dengan APE. Pendekatan kepada anak dengan yang kurang fokus merupakan cara mengajar yang tidak monoton.

Melalui langkah-langkah pengelolaan kelas diutarakan secara luas, dari segi materi ajar, penggunaan APE, pendekatan yang diberikan pada anak yang kurang fokus, dan cara mengajar guru. Hal tersebut menunjukkan adanya perhatian lebih dari guru untuk para anak didik dalam kegiatan belajarnya. Berdasarkan pada pernyataan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa langkah guru dalam mengelola kelas ketika proses KBM berlangsung yaitu dengan menggunakan APE dinilai sangat efektif. Selain itu, siswa juga dapat lebih aktif dan atraktif dalam mengikuti segala permintaan guru.

Penggunaan APE selama ini selalu digunakan dan diupayakan dalam setiap materi pembelajaran, sehingga apa yang guru dapat dari berbagai pelatihan dapat disalurkan didalamnya. Selain itu pendekatan-pendekatan juga sering dilakukan dalam menangani siswa yang kurang fokus bahkan tidak memperhatikan instruksi guru dan menghindari cara mengajar yang monoton. Begitu juga dengan adanya APE yang semakin banyak dan berkembang dapat mengurangi pembelajaran yang monoton. Pembelajaran dianggap berhasil jika anak didik mengerti atau paham bahkan dapat mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru.

Penguasaan materi ajar yang dianggap sempurna oleh para guru adalah apabila anak sudah memiliki tanggung jawab serta kerjasama dan memiliki kepedulian kepada teman yang lain. Bila anak sudah bisa mempraktekkan yang

diajarkan dan melaksanakan kebiasaan yang baik. Sehingga apa yang dimaksud dengan penguasaan materi ajar adalah rasa tanggung jawab yang dimiliki setiap anak, dapat berkerjasama dan peduli pada teman serta dapat mempraktekkan apa yang telah mereka terima sebagai kebaikan. Berkenaan dengan di atas, maka seorang guru dinyatakan telah menguasai bahan ajar, jika telah banyak berperan penting dalam meningkatkan pemahaman anak didik.

Berdasarkan pada pernyataan ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa guru yang telah menguasai materi ajar di kelas dapat dilihat dari siswa yang mampu atau dapat memahami materi ajar. Selain itu, siswa juga dapat mempraktekkan apa yang telah dicontohkan oleh guru sebagai hal kebaikan. Ini merupakan cara untuk mengetahui apakah guru sudah mampu dalam memahami dan menguasai materi ajar ketika proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sedang berlangsung. Ternyata belum signifikan yang dibuktikan dengan kurang penguasaan materi pelajaran oleh siswa dan kurang mampu mempraktekkannya ketika proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sedang berlangsung.

2) Penggunaan media dan sumber belajar

Pemanfaatan media dan sumber belajar bagi anak didik diperlukan bahkan dirasa wajib untuk meningkatkan pemahaman anak. Efektifkah guru dalam memanfaatkan media sumber belajar dengan memanfaatkan media dengan sangat efektif agar proses KBM bisa berjalan dengan tenang, menarik minat, menyenangkan, dan suasana berjalan kondusif.

Secara nyata media belajar dan sumber belajar bermanfaat dalam keberlangsungan Proses Belajar Mengajar (PBM) di kelas. Kefektifan guru dalam memanfaatkan media dapat mendukung kualitas penangkapan materi ajar oleh murid. Sebab murid akan sulit memahami materi ajar jika tidak menggunakan media.

Pernyataan tersebut menunjukkan ketergantungan anak pada media atau alat bantu belajar, namun hal tersebut wajar bagi anak usia dini. Untuk itu peneliti mewawancarai informan (RR) selaku Guru Mata Pelajaran Bersosialisasi Lingkungan menyatakan bahwa keefektifan guru dalam memanfaatkan media dalam mengajar adalah: “Sangatlah efektif dan dapat mempercepat anak-anak dalam memahami, selain itu kami sebagai guru sangat terbantu dengan adanya media tersebut”. (Wawancara, 14 Desember 2018).

Berdasarkan pada pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa guru telah menggunakan media yang dinilai sangat efektif untuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini dapat membantu guru memudahkan siswa untuk lebih cepat memahami materi ajar. Media dan sumber belajar yang digunakan juga sangat membantu guru dalam memberikan materi ajar karena dinilai lebih efektif dan efisien serta praktis dalam pemanfaatannya. Sumber belajar yang semakin mudah didapat seperti halnya sumber dari internet semakin memperbanyak pengetahuan dan sumber materi ajar bagi guru. Ruang kelas sebagai tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi faktor pendukung kelangsungan

kegiatan pendidikan, sekaligus ditambah dengan adanya media belajar yang semakin mendukung.

Kemudian peneliti menampilkan hasil wawancara mengenai situasi kelas ketika guru mengajar dengan menggunakan media ajar dengan informan (SR) selaku Guru Mata Pelajaran Bernyanyi dengan pernyataan bahwa: “Anak-anak antusias memperhatikan dan anak-anak menjadi tertarik untuk mencoba hal-hal yang baru”. (Wawancara, 16 Desember 2018).

Antusiasme anak didik dalam mengikuti materi ajar di kelas semakin mudah diikuti dengan penggunaan media ajar oleh guru. Menurut informan (NHR) selaku Guru Mata Pelajaran Keterampilan bahwa penggunaan media ajar yang menarik adalah: “Tenang semua memperhatikan dan antusias”. (Wawancara, 18 Desember 2018).

Dengan adanya media ajar diperoleh ketenangan dan perhatian lebih dari para siswanya, seperti halnya penggunaan media ajar yang menarik dalam PBM, sehingga anak-anak lebih fokus walau tidak semuanya, setidaknya anak-anak terus mengikuti peragaan dari para guru.

Berdasarkan pada pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa siswa sangat antusias dan fokus ketika guru menggunakan media ajar dan guru juga mencoba mempraktekkan supaya siswa lebih tertarik. Oleh sebab itu, penggunaan media sangat membantu guru untuk menarik siswa untuk lebih fokus dan aktif dalam belajar. Dengan adanya media ajar tersebut juga dapat

menarik siswa untuk mencoba hal-hal yang baru, sebagaimana siswa belum pernah mengalaminya.

3) Penggunaan metode pembelajaran

Metode pembelajaran adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, sehingga penggunaan metode tersebut haruslah sesuai dengan aturan-aturan maupun jalan yang telah diatur. Dalam kaitannya tentang metode pembelajaran, peneliti memberikan pertanyaan tentang penanganan siswa yang kurang fokus ketika KBM berlangsung, menurut informan (RHN) selaku Ketua Tim Pengajar dari Polri menjelaskan bahwa:

“.... dengan pendekatan, memberikan perhatian, pengertian, memberikan media atau permainan yang bisa menghasilkan pemahaman pada anak, sehingga secara bertahap bisa fokus dan mengembangkan imajinasinya”. (Wawancara, 20 Desember 2018).

Imajinasi anak dapat berkembang dengan adanya perhatiannya akan materi ajar, sehingga jika fokus anak-anak terganggu perlu adanya pendekatan, perhatian, pengertian dan penggunaan media pembelajaran yang efektif. Menurut informan (SMD) selaku Anggota Tim Pengajar dari Polri berpendapat bahwa penanganan siswa yang kurang fokus ketika KBM berlangsung adalah: “Memberikan media yang menarik, memberikan perhatian, memberikan reward”. (Wawancara, 22 Desember 2018).

Selanjutnya menurut informan (a) pemberian reward atau penghargaan sebagai salah satu faktor penyemangat siswa dalam kegiatan belajar. Sedangkan

menurut pendapat informan (NRL) selaku Anggota Tim Pengajar dari Polri menyatakan bahwa: “Pendekatan menjadi langkah awal yang dilanjutkan dengan memberikan pengertian, yang dapat menghasilkan pemahaman pada anak”. (Wawancara, 24 Desember 2018).

Berdasarkan pada pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan sebagai awal dari tindakan guru untuk mengajak siswa dalam mengikuti materi pembelajaran. Selain itu ada penggunaan media dan memberikan permainan yang dapat mendukung pembelajaran, semua itu dimaksudkan untuk mengurangi jumlah siswa yang kurang fokus saat belajar. Guru bersama-sama dengan orangtua sebagai motivator terdepan dalam peningkatan mutu pendidikan anak, sehingga motivasi berperan penting dalam kelanjutan pendidikan mereka.

Guru menggunakan pendekatan tematik yang berdasarkan pada minat dan kebutuhan anak. Membantu dan mengembangkan daya pikir anak. Menghubungkan pengalaman-pengalaman anak sehingga termotivasi untuk belajar. Memberikan pertanyaan seperti apa yang diketahui anak, apa yang ingin diketahui dan apa yang telah dipelajari anak. Memberikan berbagai pertanyaan sehingga anak termotivasi untuk menjawab. Mengungkapkan yang dia ketahui, bercerita menggunakan media yang menarik. Memberikan tantangan yang dapat menimbulkan rasa ingin melakukan dan bersaing dengan teman-temannya.

Berdasarkan pada pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa guru yang telah menyatakan bahwa cara memotivasi siswa dan adanya tantangan atau

kompetisi untuk lebih aktif yaitu dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa. Sehingga siswa akan berebut untuk menjawab, walau demikian bobot pertanyaan harus selalu dijaga dengan maksud untuk memancing anak dalam menjawab pertanyaan atau soal test. Alat bantu dalam pembelajaran juga memiliki peran penting dalam meningkatkan keaktifan anak, karena anak masih memiliki jiwa bermain yang tinggi.

4) Evaluasi / Penilaian Pembelajaran

Evaluasi dan penilaian adalah tugas penting para guru diakhir materi atau pembelajaran, dimana setiap guru harus memiliki catatan khusus untuk disampaikan. Berikut ini hasil wawancara mengenai bagaimana guru dapat mengetahui hasil belajar siswa, berdasarkan pernyataan informan (AMN) selaku Guru Mata Pelajaran Agama menjelaskan bahwa: “Dengan cara melalui evaluasi untuk memantau kemajuan dan perkembangan anak, membandingkan perkembangan anak saat ini dan sebelumnya serta menulis laporan perkembangan anak. (Wawancara, 26 Desember 2018).

Menulis laporan perkembangan anak sebagai pengumpulan data terpenting dalam evaluasi kegiatan anak selama proses pembelajaran berlangsung. Sama halnya dengan pendapat informan (MRY) selaku Guru Mata Pelajaran Berhitung dengan penjelasan kurang lebih memiliki jawaban yang sama, yaitu: “Evaluasi diakhir pelajaran sampai dengan evaluasi tahunan, hal tersebut yang selalu dilakukan oleh setiap guru yang mengajar”. (Wawancara, 28 Desember 2018).

Berdasarkan pada pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi secara berkala, pemantauan setiapwaktu dan pencatatan laporan perkembangan anak selama satuperiode penuh merupakan cara yang efektif dan sekaligus menjadibahan pengambilan nilai bagi setiap siswa PAUD. Mengenai cara guru memberikan penilaian atau evaluasi kepada siswa, yaitu menulis laporan yang menggambarkan perilaku sehari-hari di sekolah yang mencakup narasi tentang berbagai aspekperkembangan dan kemajuan anak.

Laporan perkembangan anak yang mencakup narasi tentang banyak aspek dari perkembangan dan kemajuan anak menjadikan alat bantu guru dalam memberikan evaluasi dan penilaian. Cara guru memberikan penilaian atau evaluasi kepada siswa adalah dengan pengamatan hasil karya tanya jawab. Selain penulisan laporan perkembangan anak guru jugamengamati hasil karya siswa, dimana dari siswa belum mengetahuisampai dengan siswa paham dan dapat berkarya adalah suatupencapaian lebih bagi siswa tersebut. Penulisan laporan, dengan hal tersebut akan dapat menilai maupun mengevaluasi peserta didik.

Sama halnya dengan pendapat sebelumnya, laporanperkembangan anak adalah alat terpenting dalam mengetahuiperkembangan siswa. Berdasarkan pada pernyataan di atas, makadapat disimpulkan bahwa penilaian atau evaluasi kepada siswa dapat digunakan dengan cara menulis laporan perkembangan danmetode pengamatan. Penulisan laporan akan lebih memudahkanguru dan juga orang tua siswa untuk mengetahui perkembangan siswa, sedangkan

penilaian dari hasil karya siswa adalah sebagai faktor pendukung dalam menyimpulkan atau mengevaluasi hasil belajar siswa.

Kemudian membahas tentang evaluasi dan penilaian pembelajaran yang disampaikan mengenai apa yang dilakukan guru untuk mencapai pendidikan yang bermutu. Guru diharapkan memiliki kualifikasi khusus. Guru harus terus menimba ilmu dan mempelajari cara membelajarkan anak yang sesuai dengan kaidah agama Islam. Guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian professional dan social. Banyak kualifikasi khusus bagi guru untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, diantaranya guru harus terus belajar serta mengikuti pelatihan-pelatihan, memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian professional dan sosial.

Untuk mencapai pendidikan yang bermutu, maka menanamkan karakter yang baik pada anak, memberikan ilmu/materi sesuai dengan ilmu pedagogik dan sesuai dengan umur. Penanaman karakter sejak usia dini adalah salah satu tingkatan dalam meningkatkan mutu pendidikan pada anak, dengan memiliki karakter menjadikan anak lebih berani dan berkarya dalam kebaikan. Sehubungan itu, maka guru harus terus menimba ilmu dan mempelajari cara membelajarkan anak yang sesuai dengan kaidah agama Islam.

Pencapaian mutu pendidikan dan kualitas pendidikan melalui pengajaran anak didik dengan kaidah agama Islam. Berdasarkan pada pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai pendidikan yang bermutu, maka guru menggunakan metode penanaman karakter kepada siswa dan

menguasai materi ajar. Penanaman karakter ini juga sesuai dengan kaidah Islam. Hal ini mampu membantu guru untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan baik bagi siswa maupun sekolah.

Pertama, Nilai-nilai agama dan moral sebagai dasar penanaman karakter pada siswa, berkenaan dengan hal tersebut sholat lima waktu sebagai pondasi dasar dari perilaku manusia. Siswa PAUD mayoritas memiliki jawaban sudah mampu melaksanakan sholat lima waktu. Mereka telah dididik oleh para guru di sekolah dengan baik, sehingga mereka dapat menerapkan ajaran tersebut baik di sekolah maupun di rumah. Akan tetapi, selain guru, orang tua juga ikut andil dalam mendidik anak mereka agar dapat melaksanakan sholat lima waktu dengan baik. Dari segi mutu pendidikan hal ini sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah demi kemajuan bersama.

Kedua, Kompetensi kognitif, hasil analisa mengenai kompetensi anak dalam berhitung dari 1 sampai dengan 20. Hasil analisa menunjukkan bahwa siswa sudah lancar dalam berhitung. Siswa sudah lancar berhitung dari angka 1 sampai dengan 20. Siswa telah lancar dalam berhitung menunjukkan bahwa siswa telah menguasai ilmu berhitung. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan di PAUD berkategori baik, karena dengan adanya siswa yang mahir dalam berhitung maka guru sekolah dianggap cukup berhasil dalam mencapai mutu pendidikan. Kelengkapan alat bantu mengajar juga cukup berkontribusi dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan.

Ketiga, Sosial emosional, kompetensi emosional, anak diberikan pertanyaan tentang perasaan atau suasana selama belajar di PAUD. Siswa senang selama belajar dan bermain di PAUD. Pihak sekolah memberikan pelayanan yang baik kepada siswa sehingga dapat membantu dalam mencapai mutu. Selain itu siswa merasa senang belajar di PAUD, dengan adanya alat bantu belajar maupun sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Keempat, Kompetensi kualitas lulusan, dalam hal ini peneliti menilai dari hasil belajar siswa selama belajar dan bermain di PAUD. Mayoritas siswa selalu memiliki nilai yang lebih. Siswa PAUD mendapatkan nilai yang baik. Hal ini dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Nilai yang baik ini dapat mengantarkan siswa menuju sekolah yang lebih baik yaitu dengan memberikan modal keterampilan dan memiliki mutu pendidikan yang baik.

b. Pendokumentasian Hasil Pembelajaran

Pendoku-mentasian hasil pembelajaran, yaitu melakukan pendokumenta-sian hasil proses belajar mengajar anak usia dini di rak atau *roolpack* sesuai sistem penyimpanan sentralisasi.

Terkait dengan penyimpanan data di TK Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan sarana dan prasarana yang urgen untuk mendukung PBM. Sarana dimaknai sebagai fasilitas/peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti komputer, alat-alat laboratorium, media belajar, mesin-mesin yang terkait dengan suprastruktur (dapat dipindahkan). Sedangkan prasarana

merupakan fasilitas yang berupa asset infrastruktur (tidak bergerak) seperti tanah, gedung, ruang perkuliahan, dan ruang laboratorium.

Terkait dengan sarana dan prasarana penyimpanan data yang dimaksud di atas, maka peneliti mewawancarai salah seorang informan (NSH) selaku Guru Mata Pelajaran Budi Bahasa mengatakan bahwa:

Sesungguhnya untuk mebentukkan PBM yang baik, selain mempersiapkan materi RPP dengan matang, juga dilengkapi dengan Blackboar dan *Liquid Crystal Display* (LCD) secara permanen di setiap ruangan. Akan tetapi semua itu masih terbatas, sehingga hanya sebagian guru yang memanfaatkan fasilitas tersebut secara bergiliran. Fasilitas lain adalah bangku dan meja belajar peserta didik yang masih terbuat dari kayu, dilengkapi fodium, meja dan kursi guru, spidol dan penghapus. (Wawancara, 5 Desember 2018).

Mestinya sekolah-sekolah sekarang menjaga kenyamanan ruangan kelas dengan melengkapi dengan *Air Conditioner* (AC) dengan kapasitas 2 PK, dan lantai dilengkapi dengan karpet dan pentilasi yang dilengkapi gorden, agar cahaya matahari tidak menembus masuk ruangan disaat PBM berlangsung.

Selain itu penjelasan oleh seorang informan (RSN) selaku Guru Mata Pelajaran Membaca menjelaskan bahwa:

Untuk menunjang terselenggaranya kegiatan akademik yang memadai, idelanya terdapat unit-unit pendukung berupa Perpustakaan pusat dengan layanan *digital library* dengan koleksi buku yang memadai. Kemudian unit pelayanan komputer untuk menunjang pelaksanaan akademik dengan basis teknologi informasi dengan fasilitas layanan jaringan komputer internet. (Wawancara, 7 Desember 2018).

Sudah saatnya fasilitas perpustakaan pusat bertujuan menjalankan layanan teknis berupa perpustakaan digital yang dapat diakses baik dari dalam maupun luar sekolah. Hal ini akan mempermudah dalam pencarian literatur yang

diperlukan peserta didik. Dengan melalui pengembangan *project inherent* 2006, perpustakaan Sekolah seharusnya semakin berbenah untuk pengembangan layanan *e-content* sampai dengan fasilitas *fulltext search*. Dengan demikian layanan perpustakaan akan semakin lengkap dalam mendukung berbagai kegiatan akademik civitas akademika Sekolah.

Kemudian keterangan yang dikemukakan oleh seorang informan (RR) selaku Guru Mata Pelajaran Bersosialisasi Lingkungan memberikan gambaran bahwa:

Pada hakekatnya dari aspek teknologi informasi, Sekolah mestinya sudah berkembang untuk peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas. Sehingga seluruh ruangan kelas sudah terhubung dengan internet, baik melalui Unit Pelayanan Teknologi Informasi (UPTI) sekolah maupun dengan akses langsung. (Wawancara, 9 Desember 2018).

Makna hasil wawancara adalah komunikasi verbal dan nonverbal merupakan jaringan berbagai sekolah dalam pelayanan dengan menggunakan *optical fiber* (serat optik) untuk menjamin kualitas komunikasi antar sekolah. Teknologi informasi juga sudah dimanfaatkan dalam proses pendidikan berupa layanan PBM secara asinkron dan sinkron. Namun realitasnya harapan tersebut belum terbentuk, padahal hal itu sangat mendukung peningkatan kecerdasan peserta didik.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh seorang informan (SR) selaku Guru Mata Pelajaran Bernyanyi menjelaskan kepada peneliti bahwa:

Saat ini kondisi perpustakaan sekolah ini masih di bawah standar ideal. Semestinya perpustakaan setiap sekolah memiliki buku-buku mata pelajaran 1/3 (sepertiga) dari jumlah keseluruhan peserta didik setiap

tingkatan kelas. Harapannya adalah agar semua peserta didik dapat membaca fasilitas buku-buku yang relevan dengan mata pelajarannya. (Wawancara, 11 Desember 2018).

Peserta didik semestinya dapat menggunakan perpustakaan dan ruang baca di lingkungan sekolah yang berada pada perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah idealnya memiliki luas \pm 1.200 m² (kurang lebih seribu dua ratus persegi) dan mempunyai koleksi buku mata pelajaran 1/3 (sepertiga) dari jumlah keseluruhan peserta didik setiap tingkatan kelas, baik berbahasa daerah, Indonesia dan Inggris. Disamping itu juga seharusnya terdapat berbagai jurnal baik berupa *printed journal* maupun jurnal *online proquest*, majalah dan surat kabar harian. Kemudian perpustakaan seharusnya juga dilengkapi CD-Room dan akses jaringan internet yang sudah terhubung dengan perpustakaan sekolah lain di Indonesia dalam bentuk *digital library*, yang sangat bermanfaat bagi peserta didik guna mendapatkan informasi terbaru.

Kemudian setiap peserta didik, terlebih pendidik dan tenaga kependidikan seharusnya mengetahui dan memahami secara jelas visi dan misi sekolah, arah dan strategi pemerintah. Karena visi dan misi merupakan tujuan yang harus dicapai dan dibentuk dalam PBM setiap sekolah. Dalam rangka melaksanakan tugasnya secara profesional dan secara moral bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh informan (NHR) selaku Guru Mata Pelajaran Keterampilan kepada peneliti mengatakan bahwa:

Fasilitas dapat mendukung proses untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pencapaian kinerja guru dalam PBM. Substansi pengetahuan lebih berorientasi pada intelegensi, daya pikir, sedangkan keterampilan terlihat pada penguasaan, kemahiran kerja menjalankan tugas sebagai pendidik . (Wawancara, 13 Desember 2018).

Pendapat tersebut mengandung makna bahwa pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan yang baik. Hal itu dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal yang memberikan kontribusi kepada civitas akademika sekolah dalam pemecahan masalah, daya cipta, termasuk dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Civitas akademika sekolah dapat memperoleh pengetahuan yang luas dan pendidikan yang tinggi, sehingga mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan produktif.

Penjelasan di atas dipertegas oleh informan (RHN) selaku Ketua Tim Pengajar dari Polri dalam suatu kesempatan wawancara, mengatakan bahwa:

Kemampuan dapat dibentuk dari sejumlah kompetensi setiap pendidik dan tenaga kependidikan. Pengetahuan dan keterampilan termasuk sebagai faktor pembentukan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan, diharapkan mempunyai kemampuan yang tinggi mendukung PBM. (Wawancara, 15 Desember 2018).

Mencermati kedua hasil wawancara di atas mengandung makna bahwa pengetahuan dan keterampilan mendasari pencapaian kinerja dan produktifitas kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Substansi pengetahuan lebih berorientasi pada intelegensi dan daya pikir, sedangkan keterampilan merupakan bentuk penguasaan dan kemahiran kerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengetahuan dan

keterampilan juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan kelengkapan fasilitas yang memadai. Jika pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi, maka terjadi implikasi positif dalam perilaku kerja yang produktif.

Berdasarkan hasil survey, wawancara dan dokumentasi diketahui bahwa umumnya TK Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan fasilitas *Information and Communication Technology* (ICT) yang digunakan untuk proses penyelenggaraan pendidikan (misalkan Siakad, Simawa, Simfa, Simpeg dan sejenisnya), termasuk *distance-learning*. Kemudian belum ada upaya penyebaran informasi/kebijakan sekolah untuk peserta didik (misalnya melalui surat, *faximily*, *mailing list*, *e-mail*, *sms*, buletin). Kesemuanya bermuara pada pemenuhan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang berorientasi pada kesiapan setiap saat dalam melaksanakan kebijakan program PAUD di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun-tahun yang akan datang lebih efektif dan maksimal lagi menjalankan peran dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka kelancaran PBM di sekolah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Konten Pendidikan

a. Kurikulum Pendidikan

Pendidikan anak usia dini telah menjadi perbincangan yang tidak pernah ada hentinya, dan selalu dikaji. Pada akhirnya pemerintah mendirikan lembaga-lembaga khusus yang menaungi pendidikan anak-anak usia dini. Latar belakang diadakan pendidikan anak usia dini atau PAUD karena zaman dewasa ini banyak moral bangsa Indonesia yang rusak dan semua ini diawali dengan pendidikan seseorang sejak dini. Kemudian juga dengan diadakan pendidikan ini akan mencetak manusia-manusia yang cerdas dan mempunyai skill yang bagus dalam kehidupannya masa datang yang dimulai dari pengoptimalan pendidikan sejak dini.

Berlatar belakang dari hal ini juga, pemerintah tergugah, khususnya di Departemen Pendidikan Nasional untuk membentuk sebuah direktorat baru yang bernama PADU, yaitu direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, hal ini diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi masyarakat dibidang layanan pendidikan anak usia dini (Depdiknas, 2002:1).

Dasar pendidikan anak usia dini adalah Undang Undang No. 20 bahwa upaya pembinaan yang ditunjukkan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak

memiliki kesiapan dalam hal memasuki pendidikan lebih lanjut” (Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). Kemudian kurikulum ada pada pasal 1 butir 19 yang bunyinya adalah “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu” (Sisdiknas, No., 20, Tahun 2003).

Kemudian dasar hukum secara umum tentang pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut (Depdiknas 2006:2): (a) Undang-Undang Dasar 1945. (b) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (c) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (d) Undang-Undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, (e) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (f) Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009, (g) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional, (h) Rencana Strategi Departemen pendidikan Nasional tahun 2005-2009 Dalam pendidikan anak usia dini terdapat menu pembelajaran, yaitu sebagai berikut:

Landasan pendidikan akan menjadi tolok ukur praktek pendidikan dalam menetapkan tujuan pendidikan, konten pendidikan dan metode proses pendidikan. Dengan demikian praktek pendidikan diharapkan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, fungsi dan sifatnya yang dapat

dipertanggungjawabkan. Oleh karena uang pajak sebagian besar digunakan untuk membiayai pendidikan, untuk itu sering mendapat tekanan untuk dipertanggungjawabkan. Akibatnya, sumber daya yang disalurkan ke TPD adalah juga di bawah pengawasan ketat oleh pembuat kebijakan, orang tua peserta didik, dan pihak sekolah.

Pertama Landasan agama pendidikan, berangkat dari definisi pendidikan yaitu upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidup. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan setiap pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dan dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Dalam menjalankan kelanjutan pendidikan tersebut, harus ada fasilitas sebagai pegangan, salah satunya adalah adanya kurikulum yang dibingkai oleh nilai-nilai moral dan etika.

Menurut Abdullah (2014:34) bahwa Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keluarga, lingkungan, masyarakat, dirinya sendiri maupun kehidupan bangsa dan negara. Fungsi dari pendidikan yaitu berusaha mengembangkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat maupun bangsa dan Negara. Sedangkan tujuan umum pendidikan mencakup beberapa hal, salah satunya adalah aspek kemanusiaan yang meliputi: sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pola pikir.

Pandangan yang lebih rinci dikemukakan oleh Darajat (2012:32) bahwa pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogie* yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata *education* yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini dikenal dengan kata *tarbiyah* dengan kata kerjanya *rabba-yurobbi-tarbiyatan* yang berarti “mengasuh, mendidik, dan memelihara”.

Sementara itu kata “agama” atau “religi” berasal dari bahasa Latin *relegere* yang berarti kumpulan atau bacaan. Adapun menurut istilah adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan ghaib yang harus dipatuhi. Kekuatan ghaib tersebut menguasai manusia; berarti pula mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia yang memengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Agama dapat pula berarti ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.

Kedua, Landasan filosofis pendidikan, Menurut Abdullah (2014:39) kata filosofis terbentuk dua kata dari bahasa Yunani, yaitu *philo* yang berarti cinta dan *sophos* yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian filsafat dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan (*al-hikmah*). Orang yang mencintai atau mencari kebijaksanaan atau kebenaran disebut sebagai filsuf.

Landasan filosofis pendidikan merupakan bagian penting yang harus dipelajari pada normatif dan perspektif. Selain itu, filosofis pendidikan akan

mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana melaksanakan pelajaran, siapa yang di ajar dan mengajar. Hal ini merupakan seperangkat prinsip yang menuntun kita melakukan pendidikan profesional.

Landasan pendidikan merupakan suatu gagasan tentang pendidikan yang dijelaskan berdasarkan filsafat umum dalam pendidikan yang terdiri dari metafisika, ephistimologi dan aksiologi. Menurut Suyitno (2009:62) bahwa terdapat tiga cabang filsafat masing-masing memiliki sub cabang. Ketiga cabang tersebut adalah Metaphysic (Metafisika), Ephistemology (Epistemologi) dan Axiology (Aksiologi).

Sebagaimana halnya di dalam filsafat umum, landasan filsafat pendidikan juga terdapat berbagai aliran. Landasan filsafat pendidikan dikenal ada tiga aliran, yaitu: filsafat pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Selain ketiga filsafat pendidikan tersebut sebenarnya masih banyak jenis landasan filsafat lainnya. Namun demikian, bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki filsafat pendidikan nasional tersendiri, yaitu filsafat pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi semua aliran filsafat pendidikan perlu dipelajari, namun demikian pendidikan yang terselenggara hendaknya tetap berlandaskan Pancasila. Pemahaman atas berbagai aliran filsafat pendidikan akan dapat membantu menganalisis berbagai ilmu pengetahuan yang bersifat konstruktif.

Ketiga, Landasan ilmiah pendidikan, Perkembangan teknologi pendidikan (Education Tecnology) sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan.

Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan pada awalnya hanya berfokus pada kajian media pendidikan, yang dapat memberikan nilai tambah terhadap proses, produk dan sistem pendidikan.

Menurut Claessens dkk. (2016:5) bahwa: teori interpersonal atau hubungan kognisi conceptualise adalah hubungan dalam hal representasi mental diri yang signifikan terhadap orang lain. Kemudian teori skema relasional menurut Claessens dkk. (2016:28) adalah orang mengembangkan mental peta hubungan dengan individu, yang disebut relasional skema, yang memandu perilaku mereka dalam interaksi berikutnya.

Lahirnya ilmu baru menuntut adanya bidang kajian penelitian dengan segala perangkatnya. Hal ini menjadi pemikiran para ahli bidang teknologi pendidikan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam PBM. Landasan berpikir dalam bidang teknologi pendidikan (*education technology*) atau teknologi pengajaran (*instructional technology*) yang menjadikan garapan disiplin ilmu baru yaitu rangkaian dalil yang dapat menuntun terhadap PBM yang benar. Dasar filosofi keilmuan tersebut terbagi tiga jenis yaitu: *ontologi, epistemologi dan aksiologi*.

Ketiga dasar filsafat di atas, dapat dicapai melalui empat pendekatan: (1) Pendekatan isometrik, (2) Pendekatan sistematik, (3) Pendekatan sinergistik dan (4) Pendekatan sistemik. Tujuan falsafah teknologi pendidikan adalah agar setiap orang dapat memperoleh kesempatan belajar, baik sendiri-sendiri maupun melalui organisasi. Agar PBM berjalan optimal, maka sumber belajar dapat

dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi prinsip efisiensi, efektifitas dan selaras dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan. Keadaan tersebut menjadi penting dalam penggarapan bidang teknologi pendidikan melalui penelitian dan pengembangan teknologi pendidikan.

Pendekatan dalam mencari kebenaran melalui penelitian yang pada hakekatnya merupakan usaha mengungkap kebenaran. Pada dasarnya semua manusia selalu ingin mencari kebenaran, namun demikian, cara memperoleh kebenaran berbeda-beda. Kebenaran ilmiah dapat diperoleh melalui berbagai cara yang dilandasi oleh pendekatan ilmiah.

Muhajir (2015:89) bahwa pada tingkat yang paling dasar, guru profesional mengacu pada status seseorang yang dibayar untuk mengajar; pada tingkat yang lebih tinggi, ia dapat merujuk kepada guru yang mewakili yang terbaik dalam profesi dan kumpulan standar tertinggi. Profesionalisme akan meningkat ketika guru menggunakan keunggulan sebagai kriteria penting untuk menilai tindakan dan sikapnya. Dengan demikian, profesionalisme diukur oleh standar terbaik dan tertinggi.

b. Lingkup Materi Pembelajaran

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, bahasa, agama, adat istiadat serta budaya. Keanekaragaman ini pada hakikatnya merupakan kekuatan untuk menjaga keutuhan negara. Kekuatan itu akan lahir dari sikap saling menghormati, menghargai, toleransi yang tinggi terhadap keberagaman

yang muaranya adalah perdamaian, kesantunan dan persatuan. Dalam hal ini, pendidikan mengambil peran yang sangat penting dalam upaya menjaga dan melahirkan persatuan. Pendidikan merupakan instrument untuk menginternalisasikan nilai-nilai positif yang sesuai dengan ajaran agama, nilai-nilai yang sesuai dengan norma serta budaya. Pada prinsipnya, pemahaman akan keberagaman haruslah diperkenalkan sedini mungkin kepada para anak agar tidak muncul adanya bentuk penolakan atau bahkan kerasingan dari adanya perbedaan tersebut.

Konsep keberagaman haruslah dikenalkan sedini mungkin kepada anak, karena anak hidup ditengah-tengah keberadaan tersebut sehingga menjadi suatu keniscayaan bagi anak untuk dapat menerimanya. Penerimaan akan keberagaman ini, haruslah ditampilkan dalam setiap nafas kehidupan anak, tidak hanya didalam keluarga, namun juga dilingkungan sekolah anak juga harus ditampilkan. Hal tersebut dikarenakan, sekolah memiliki kekuatan untuk menginternalisasikan nilai-nilai kehidupan yang lebih kuat dibandingkan di rumah. Interaksi anak dengan teman, metode pembelajaran yang disajikan, media pembelajaran yang ditampilkan akan sangat berbekas kepada anak karena berisikan berbagai warna yang menarik, sebutan yang menarik dan mungkin saja ada lagu-lagu yang menarik sehingga benar kalau sekolah memiliki kekuatan yang lebih dalam menginternalisasikan nilai dibandingkan di rumah.

Multikultural harus dimaknai dalam arti yang luas. Sehingga tidak hanya berkaitan dengan keberagaman agama, suku atau ras, namun juga berkaitan

dengan keberagaman status sosial, keberagaman stratifikasi sosial, ataupun keberagaman diferensiasi sosial. Anak yang hidup dalam lingkungan yang menerima keberagaman dan nyaman didalamnya, maka anak tersebut akan terus ingin berada didalam suasana tersebut dan nanti jika dia sudah besar akan terus mencari suasana yang membuat anak tersebut senang. Olehnya itu, seyogyanya sejak dini anak diajarkan atau diberi pengalaman akan konsep multikultur baik di rumah ataupun di sekolah.

Berdasarkan paparan di atas, maka artikel ini akan membahas mengenai konsep pendidikan mutikultur, konsep pendidikan anak usia dini serta implementasi pendidikan multikultur pada pendidikan anak usia dini. Banyak pendapat tentang pendidikan multikultur. Walaupun secara teori berbeda-beda namun semuanya bermuara pada tindakan yang sama. Muhaemin el Ma'hady dalam Mahfud (2014:37) berpendapat pendidikan multikultural merupakan pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (global). Pandangan ini menggarisbawahi akan bentuk tanggap dunia pendidikan anak keberagaman yang ada di masyarakat.

Bentuk keberagaman tersebut harus diakomodir oleh dunia pendidikan. Sebab bagaimanapun juga pendidikan merupakan pilar terdepan dalam membentuk watak, karakter serta sikap positif dan sikap penerimaan akan keberagaman. Pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan

bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multicultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa. Sedangkan secara luas, pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnic, ras, budaya, strata sosial, dan agama.

Hilliard dalam Mahfud (2014: 31) menambahkan bahwa konsep tanggap akan keberagaman tersebut haruslah diteruskan pada proses persamaan bagi setiap kelompok atau individu dalam pendidikan. Artinya, setiap siswa tanpa memandang dari kelompok mana, dari jenis kelamin apa, dari etnik mana ia berasal, dari ras apa dia terlahir, budaya apa yang melekat padanya, berasal strata sosial apa dia atau apapun agamanya haruslah mendapatkan perlakuan yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Maka dari itu, dalam dimensi pendidikan multikultural, perlulah adanya pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian akan perbedaan tersebut.

Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa pendidikan harus menjadi garda terdepan dalam mengembangkan konsep multikultural. Hal tersebut dikarenakan karena sekolah sebagai institusi yang menanamkan nilai kemanusiaan yang sangat penting pada perkembangan multikulturalisme dalam kehidupan. Selain itu juga bahwa antara pendidikan dan perkembangan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemajuan suatu masyarakat

dan suatu bangsa sangat ditentukan pembangunan sektor pendidikan dalam penyiapan SDM yang sesuai dengan perkembangan zaman. SDM bangsa Indonesia kedepan tidak terlepas dari fungsi pendidikan nasional dalam pasal 3 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada TYME, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada prinsipnya, bila kita memperhatikan tentang apa yang ada di sekitar kita terkait dengan kehidupan kita yang beragam, sebenarnya kita sama kita bisa Multikultur menjadi penting untuk kita fahami dan cermati, sebab setiap saat kita pasti akan berinteraksi dengan orang lain yang pastinya orang tersebut berbeda dengan kita. hubungan yang terbentuk dalam sebuah masyarakat akan terjalin secara harmonis bila setiap unsur masyarakat tersebut menerima perbedaan dan bersatu dengan perbedaan tersebut. Setiap kita harus dapat memahami bagaiman karakter atau sisitem nilai yang terbentuk pada diri seseorang.

Salah satu hal yang cenderung ada pada diri kita yang menyebabkan terjadi gesekan antara satu dengan yang lainnya adalah karena kita tidak dapat memahami karakter, sifat dan sikap orang lain. Hal ini nantinya akan

melahirkan sikap tidak menghormati, kurang menghargai dan sampai pada tidak toleran. Pada hakikatnya setiap masyarakat mempunyai suatu sistem nilai sendiri yang coraknya berbeda dengan masyarakat lain. Hal tersebut dapat terlihat pada adanya nilai yang dianggap lebih tinggi daripada yang lain, dan dapat berbeda menurut pendirian individual. Masyarakat kota yang memiliki universitas dan penduduk yang intelektual memiliki sifat lebih terbuka bagi modernisasi dan pendirian atau kelakuan yang baru, lain dari yang lain, seperti pola pikiran, moral, pakaian, pergaulan. Masyarakat desa memiliki tradisi yang leboh kuat dan lebih taat kepada agama, sikap pikiran orangnya lebih homogen. Penyimpangan dari kebiasaan akan segera mendapat sorotan, kelakuan setiap orang seakan diawasi dan diatur orang sekitarnya.

Padahal sebenarnya kedua tipe masyarakat di atas mempunyai persamaan, yakni mereka adalah anggota suatu bangsa yang mempunyai kebudayaan nasional yang sama baik dari segi falsafah, bahasa, sejarah, dan budaya. Meskipun ada beberapa daerah mempunyai ciri yang khas. Tiap sekolah, seorang guru harus mengenal lingkungan sosial tempat mereka berada agar dapat memahami latar belakang kultural anak didik. Hindari berbuat atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma yang dianut masyarakat. Dalam suatu masyarakat mungkin pula terdapat perbedaan pendirian tentang nilai mana yang dominan. Golongan pengusaha mungkin lebih progresif, golongan dapat mengutamakan tradisi dan cenderung menentang perubahan atau lebih hati-hati/curiga terhadap pembaruan. Golongan agama juga

cenderung konservatif dalam mengambil keputusan menyangkut kepentingan umum, termasuk pendidikan akan terdapat kesulitan untuk mempertemukan perbedaan norma-norma yang ada.

Pendidikan multikultur berusaha menyajikan sebuah kurikulum dimana para peserta didik diberikan materi yang berisikan nilai-nilai kehidupan akan keberagaman sehingga nantinya akan muncul satu bentuk tipe masyarakat yang disebut dengan *gemeinschaft* (hubungan primer) yang merupakan bentuk kehidupan bersama. Antara anggotanya memiliki hubungan batin murni yang sifatnya alamiah dan kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta dan persatuan batin yang nyata dan organis. Lebih lanjut James Banks dalam Mahfud (2014:34) menjelaskan, bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu : Pertama, *Content Integration*, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu. Kedua, *the knowledge construction process*, yaitu memahami siswa untuk implikasi budaya kedalam sebuah mata pelajaran (disiplin). Ketiga, *an equity pedagogy*, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial. Keempat, *prejudice reduction*, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka.

Bentuk pendidikan multikultur yang terjadi pada pendidikan anak usia dini pada prinsipnya merupakan sebuah jalan baik untuk dapat memperkenalkan dan menumbuhkembangkan nilai keberagaman dalam kehidupan. Sejak dinilah harus diterapkan atau memperkenalkan anak akan keberagaman budaya, sosial dan lainnya. Prinsipnya dalam suatu masyarakat yang baru dan demokratis maka pendidikan multikultural menempati tempat yang sangat sentral di dalam pembinaan generasi Indonesia baru. Maka dari itu, pelaksanaan pendidikan multikultur melalui pengembangan pendidikan multikultural dilakukan dengan transformasi kebudayaan dalam proses pendidikan. Kebudayaan yang ada akan termanifestasi dengan baik kepada anak bila nilai-nilai luhur dari budaya tersebut dapat diserap oleh anak melalui pembelajaran dan proses pendidikan yang dirasakan oleh anak. maka dari itu, pendidikan multikultur yang diterapkan pada anak usia dini dipandang sangat perlu untuk menciptakan generasi ke depan yang lebih berakhlak dan toleran.

2. Proses Pendidikan

a. Persiapan Materi Pengajaran

Salah satu tujuan negara Indonesia dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke 3 (tiga) adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka setiap warga Negara Republik Indonesia berhak memperoleh akses dan kesempatan pendidikan yang merata, bermutu dan relevan, serta berdaya saing sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan yang dimiliki setiap warga negara tanpa memandang status sosial, etnis dan gender di seluruh pelosok tanah air.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dikeluarkan kebijakan yang mengatur tentang sistem penyelenggaraan pendidikan sebagaimana terakhir dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14 dinyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam (0-6 tahun) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, serta mengembangkan bakat-bakatnya secara optimal; selain itu juga memberikan bimbingan yang seksama agar anak-anak memiliki sifat-sifat, nilai-nilai, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu usaha untuk mendorong bentuk PAUD menjadi perhatian kita semua khususnya pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Demikian pula bila dilihat ketuntasan satu desa satu PAUD maka dari 1956 desa pada tahun 2015, masih terdapat 237 desa belum ada dan terbentuk lembaga PAUD atau masih ada sebanyak 12,12 %. Komunikasi yang melibatkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, pengelola PAUD dan masyarakat melalui sosialisasi dan koordinasi tentang penyelenggaraan PAUD belum maksimal, karena belum melibatkan pemerintah desa (kepala desa dan aparat desa lainnya), dan

tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tingkat desa. Sehingga layanan PAUD belum merata terakses ke semua desa yang ada di Sulawesi Selatan, serta masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya pendidikan anak usia dini.

Disisi lainnya, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yaitu Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bahwa setiap guru sebagai tenaga profesional wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat yang sesuai dengan kewenangan mengajar (setiap guru di sebuah jenjang pendidikan harus berkualifikasi minimal Strata satu (S1). Sementara ribuan guru PAUD di Sulawesi Selatan hanya tamatan SMA dan sederajat. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengupayakan pengembangan Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD melalui program peningkatan kualifikasi akademik Akta IV atau S1.

Berdasarkan hasil observasi awal implementasi kebijakan program PAUD, khususnya di daerah provinsi Sulawesi Selatan ternyata belum terlaksana dengan baik, efektif dan maksimal. Hal ini dapat dilihat kurangnya partisipasi atau kepedulian pemerintah daerah terhadap PAUD, antara lain: kurangnya perhatian terhadap tenaga pendidik dan kependidikan, kurangnya pembinaan terhadap tenaga pendidik, kurangnya perhatian pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/

kota terhadap sarana dan prasarana, pengelolaan yang kurang bagus serta hambatan yang paling sering dihadapi adalah pembiayaan, sehingga apabila terus dibiarkan maka berdampak pada lembaga PAUD terbengkalai bahkan terancam tutup. Oleh karena itu agar dampak tersebut dapat dihindari maka diperlukan perhatian serius terhadap implementasi kebijakan program PAUD khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal yang menjadi penting dalam penyelenggaraan program PAUD adalah faktor komunikasi, dan dukungan sumber daya relatif belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu.

Melihat kondisi tersebut jika dikaitkan dengan teori George C.Edward III (1980) dalam Agustino (2012:150) bahwa ada 4 (empat) faktor yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, adalah komunikasi antar pihak terkait (stakeholders) dalam mengimplemtasikan kebijakan mengalami ketidakefektifan, dan sumber daya manusia yang tidak memadai dan mempunyai kualitas rendah, disposisi pelaksana program dan struktur birokrasi pelaksana menjadi lebih baik dalam penerapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 Tahun 2014 sesuai dengan Prosedur, Strategi, Prinsip dan Pendekatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi awal atas permasalahan dan pentingnya PAUD sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah bagaimana implementasi kebijakan program PAUD dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program PAUD di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil penelitian dan penelaahan nantinya diharapkan dapat memberikan suatu solusi yang dapat dijadikan bahan rekomendasi sebagai saran positif dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait implementasi kebijakan program PAUD di daerah Sulawesi Selatan.

Didalam pelaksanaan kebijakan tersebut, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu perlu memperhatikan beberapa hal atau faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan kebijakan yang dilaksanakan. Menurut Edward III dalam Agustino, (2012:150-154), Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1) Komunikasi; keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. (2) Sumber daya; walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya

adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. (3) Disposisi; adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. dan (4) Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

b. Implementasi Program Pengajaran

Pelaksanaan pengajaran merupakan implementasi dari RPP. Dengan kata lain RPP adalah acuan utama dalam pelaksanaan pengajaran. Dijelaskan dalam Permendikbud No. 57 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan dalam Permendikbud No. 103/2014 tentang Pengajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bahwa pelaksanaan pembelajaran tematik terbagi menjadi tiga, yaitu: kegiatan

pendahuluan (awal), kegiatan inti dan kegiatan penutup (akhir). Ketiga kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Ditegaskan pula secara jelas oleh Trianto (2010:29) bahwa dengan mengacu pada Permendikbud No. 103/2014, pelaksanaan pengajaran tematik-terpadu setiap hari dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan kegiatan, yaitu kegiatan pembukaan atau pendahuluan (alokasi waktu 5-10 persen atau sekitar 35 menit untuk satu jam pelajaran), kegiatan inti (alokasi waktu 80 persen atau sekitar 105 menit untuk satu jam pelajaran), dan kegiatan penutup (alokasi waktu 10-15 persen atau sekitar 35 menit untuk satu jam pelajaran).

Secara prosedural PBM diterapkan ke dalam tiga langkah sebagai berikut. Pertama, Kegiatan Pendahuluan (awal), Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal yang harus ditempuh guru dan peserta didik pada setiap kali pelaksanaan pengajaran tematik-terpadu. (Trianto, 2010:37).

Kegiatan ini dilakukan terutama untuk menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pengajaran; memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional; mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; menjelaskan tujuan pengajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan suasana awal pengajaran untuk

mendorong peserta didik menfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses pengajaran dengan baik. Sifat dari kegiatan pembukaan adalah kegiatan untuk pemanasan. Pada tahap ini dapat dilakukan penggalian pengalaman anak tentang tema yang akan disajikan. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah bercerita, bernyanyi, bernyanyi sambil menari mengikuti irama musik, dan menceritakan pengalaman guru. (Permendikbud No. 57/2014).

Dalam kegiatan pendahuluan PBM bersifat fleksibel dengan menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Materi pendahuluan pengajaran yang terpenting ialah motivasi belajar dan menyampaikan tujuan pengajaran serta memberikan stimulus materi yang akan dipelajari. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik betul-betul siap dalam mengikuti proses pengajaran. (Fadillah, 2014:59).

Kedua, Kegiatan Inti, merupakan pelaksanaan pengajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar peserta didik (learning experience). Kegiatan pengajaran tematik bersifat situasional, yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Selain itu, Trianto (2010:45) menyatakan bahwa dalam pengajaran tematik di sekolah ditekankan pada kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Kegiatan inti dilakukan dengan menggunakan metode yang disesuaikan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diberikan, meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.

Dalam Permendikbud No. 57 tahun 2014, menekankan bahwa kegiatan inti difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dalam rangka pengembangan sikap, maka seluruh aktivitas pengajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas melalui proses afeksi yang dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Untuk kompetensi pengetahuan dilakukan melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Untuk kompetensi keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, bertanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan, harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pengajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/ penelitian (discovery/ inquiry learning) dan pengajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). Sedangkan dalam Permendikbud No. 103 tahun 2014 menguraikan bahwa guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi untuk menalar atau mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari KI-1 dan KI-2. Terkait dengan itu adalah RPP yang berisi:

mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerja sama, toleransi, disiplin, dan taat aturan.

Selain itu, dalam kegiatan pengajaran, diperlukan juga latihan. Latihan yang dilakukan oleh peserta didik diikuti dengan bimbingan belajar, koreksi dari guru atas kesalahan yang dibuat peserta didik dan petunjuk cara memperbaikinya. Latihan ini diulang seperlunya hingga peserta didik dapat menyelesaikannya dengan benar tanpa bantuan guru.

Ketiga, Kegiatan Penutup (akhir), Sifat dari kegiatan penutup adalah untuk menenangkan dan melakukan refleksi dalam rangka evaluasi. Dalam Permendikbud No. 57 tahun 2014 menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan menghususkan pada seluruh rangkaian aktivitas pengajaran dan hasil-hasil yang diperoleh dan selanjutnya bersama-sama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pengajaran yang telah berlangsung. Kegiatan penutup juga dimaksudkan untuk memberikan umpan balik terhadap hasil proses pengajaran. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas individu maupun kelompok; dan menginformasikan rencana kegiatan pengajaran untuk pertemuan berikutnya. Waktu yang tersedia untuk kegiatan ini relatif singkat, oleh karena itu guru perlu mengatur dan memanfaatkan waktu seefisien mungkin.

Menurut Fadillah (2014:79) bahwa berhasil tidaknya pelaksanaan pengajaran sangat bergantung bagaimana interaksi antara guru dan peserta didik, maupun antar peserta didik itu sendiri dapat berjalan aktif. Dengan

demikian sifat dari kegiatan penutup adalah menciptakan kondisi PBM dalam keadaan kondusif. Beberapa contoh kegiatan penutup yang dapat dilakukan adalah menyimpulkan hasil pengajaran yang telah berlangsung, mendongeng, membacakan cerita dari buku, pantomim, pesan-pesan moral, dan/atau apresiasi musik.

3. Evaluasi Hasil Pendidikan

a. Peningkatan Mutu Pembelajaran

Peningkatan mutu pendidikan yaitu upaya mengembangkan kemampuan, sikap yang berakhlak disegala bidang untuk keberhasilan pendidikan anak usia dini Manusia sangat membutuhkan ilmu pengetahuan di dalam kehidupan mereka. Ilmu pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan. Pendidikan dapat membentuk karakter manusia menjadi manusia yang lebih baik, serta berguna bagi sesama, beriman dan bertaqwa serta bertanggung jawab. Pendidikan yang dalam UU No. 20 Tahun 2003 (pasal 3) tentang Sisdiknas bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada TYME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan dapat diperoleh dari usia dini atau kanak-kanak. Di usia ini, karakter manusia dapat dibentuk dan diciptakan sesuai dengan pendidikan yang didapat. Salah satu tujuan adanya pendidikan yaitu dapat menciptakan keselamatan serta kebahagiaan bagi umat manusia, sesuai dengan pernyataan Ki

Hadjar Dewantara (dalam Burhanuddin, 2013: 3) pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lebih lanjut Ki Hadjar Dewantara (dalam Haryanto, 2010) juga menyatakan bahwa beliau juga ingin a) menempatkan anak didik sebagai pusat pendidikan, b) memandang pendidikan sebagai suatu proses yang dengan demikian bersifat dinamis, dan c) mengutamakan keseimbangan antar cipta, rasa, dan karsa dalam diri anak. Mutu pendidikan merupakan suatu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pihak sekolah dalam menciptakan anak didik yang berkualitas.

Sekolah dapat dikatakan bermutu apabila di dalam sekolah tersebut terdapat proses pembelajaran yang baik, serta mempunyai lembaga atau badan-badan sekolah yang mampu menangani dan bertanggung jawab atas hasil belajar anak didiknya. Menurut Zahid (2014: 669), mutu pendidikan merupakan konsep multidimensi meliputi kelembagaan, pengajaran dan hasil belajar siswa. Makna peningkatan mutu pendidikan yaitu bukan hanya dapat menyekolahkan anak untuk menimba ilmu pengetahuan saja, melainkan juga dapat mengembangkan pengetahuan anak secara komprehensif. Peningkatan mutu pendidikan juga dapat memberikan harapan bagi siswa guna mendapat kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Menurut Edward Sallis (dalam Jasuri, 2014: 15) mengatakan, *Total Quality Management (TQM)* adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan

seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan para pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang.

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan sejak dini, yang paling utama dari lingkup keluarga dan sekolah sebagai kelanjutannya. Potensi anak akan berkembang sangat pesat yakni antara umur 0 sampai dengan 6 tahun, disitulah pentingnya pendidikan usia dini karena umur tersebut adalah periode usia emas (*golden age*). Pendidikan di sekolah bagi anak usia dini memberikan banyak kesempatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan yang menyangkut fisik motorik halus dan kasar, kecerdasan, sosio emosional bahasa dan komunikasi, sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Menurut Apriana (2009: 3) Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Tingginya harapan masyarakat dengan adanya pendidikan usia dini terlihat dari keantusiasan orang tua dalam menyekolahkan putra-putrinya. Hal ini tidak lepas dari guru yang telah melahirkan penerus yang berkualitas. Guru dinilai baik dalam mengajar yaitu ketika guru mampu menguasai kelas dan terampil dalam menarik minat siswa untuk belajar dengan baik. Menurut Max (1991: 187) mengajar membutuhkan keterampilan improvisasi langsung yaitu

dengan mengetahui bagaimana menginterpretasikan situasi yang selalu berubah, perubahan waktu, tanggap dengan apa yang terjadi pada anak, apa yang harus dilakukan, bagaimana menyajikan sesuatu, bagaimana menahan, dan cara membuat nada yang tepat dalam kelas.

Terkait dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan empat kebijakan, yaitu: pembangunan satuan pendidikan, penyempurnaan sistem pembelajaran, penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan bantuan pendanaan peserta didik (Freyani, 2013). Peningkatan kualitas atau mutu pendidikan PAUD tidaklah mudah. Beberapa PAUD tidak mengalami peningkatan mutu dikarenakan beberapa hal yaitu: (a) Masalah pendidik, tidak sedikit lembaga PAUD yang masih asal-asalan berjalan disebabkan karena usia yang relatif baru sehingga pendidik kurang berkualitas, belum kreatif dan inovatif; (b) Lembaga PAUD yang masih baru pelaksanaan program masih bersifat asal jalan, asal dapat peserta didik tanpa memperhatikan kualitas pelayanan pendidikan, baik dari segi sarana-prasarana, tenaga pendidik/pengasuh, maupun metode pembelajarannya dan (c) Tenaga pendidik yang berkualifikasi dan berkompentensi yang ada sangat terbatas, serta yang berlatar belakang pendidik PAUD, masih heterogen bahkan tak sedikit yang berdasar pengalaman semata.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pendidik yang belum memiliki kualifikasi dan kemampuan sebagai pendidik Ada beberapa hal

yang menjadi acuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas PAUD. Diantaranya acuan itu adalah sebagai berikut: (a) ada standar minimal sebelum masyarakat atau yayasan mendirikan lembaga PAUD, (b) pendidik yang akan terjun langsung di PAUD seharusnya di latih terlebih dahulu minimal 2 bulan, sehingga ketika terjun bisa menguasai kelas dengan baik; (c) pendidik PAUD harus tidak berhenti belajar, hendaknya mengikuti pelatihan rutin baik itu sebulan sekali atau dua minggu sekali, (d) pengoptimalan Himpaudi & Forum PAUD, karena anggotanya juga terdiri dari pendidik yang tentunya lebih mengerti pelatihan yang mendesak harus diadakan itu apa; (e) mengadakan studi banding, (f) guru lebih meningkatkan gemar membaca karena ilmu tentang PAUD sangat luas, apalagi mempelajari anak yang unik di butuhkan ilmu yang banyak; (g) guru atau pendidik harus sekolah lagi; (h) pengalokasian dana dari Pemerintah Daerah untuk peningkatan mutu pendidik PAUD di daerah masing-masing; dan (i) di tumbuhkan jiwa meneliti bagi para guru karena begitu kompleknya permasalahan anak, maka setidaknya pendidik harus gemar meneliti jika ada permasalahan yang di rasa mengganjal (Freyani, 2013).

PAUD Fatimah di desaPurbayan kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu dapat dilihat dari perkembanganjumlah siswa dari tahun ke tahun: Demi mencapai tujuan yang diinginkan yaitu meningkatkan mutu pendidikan di PAUD Fatimah, maka guru dituntut untuk mampu mendidik anak didik dengan meningkatkan pola pengajaran, meskipun menjadi pendidik PAUD memang tidak semudah yang dibayangkan. Pendidik

tidak hanya mendidik saja tapi juga sebagai pembimbing, penasehat, motivator, pengasuh, fasilitator, dan lain-lain. Mendidik lebih sulit daripada mendidik orang dewasa pada umumnya. Karena itu, banyak guru merancang optimisme setinggi langit, tetapi kenyataannya gagal.

Kebanyakan orang tua menyekolahkan anak-anaknya dengan mempertimbangkan mutu pendidikan. Tak dapat dipungkiri bahwa setiap orang setuju akan upaya peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila mempunyai mutu yang lebih baik atau berkualitas dan begitu juga sebaliknya. Menurut Kristianty (2005: 107) mutu adalah perasaan menghargai terhadap sesuatu yang lebih baik daripada yang lain. Sedangkan menurut Edward Sallis (dalam Nata, 2012: 46) mutu merupakan konsep yang licin. Mutu mengimplikasikan hal-hal yang berbeda pada masing-masing orang. Sedangkan menurut Crosby (dalam Abdul dan Nurhayati, 2010: 84) menyatakan bahwa mutu ialah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.

Mutu tidak hanya menghargai terhadap sesuatu, tetapi juga mampu menilai karakteristik produk atau jasa. Mutu pendidikan dapat memberikan kepuasan terhadap para konsumen. Menurut Bresman (2009: 78) mutu adalah suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan berbagai cara dimana setiap definisi bisa didukung oleh argumentasi yang sama baiknya.

Berdasarkan pendapat tersebut mutu dapat diartikan sebagai penilaian karakteristik dari produk maupun jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen.

Dalam lingkungan sistem pendidikan, khususnya sekolah, penjaminan mutu merupakan tuntutan yang harus difokuskan oleh pihak sekolah demi kemajuan bersama. Hal ini didasarkan pada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan hal yang menjadi sorotan utama oleh orang tua bahkan sampai ke tingkat satuan pendidikan pemerintah. Setiap komponen pemangku kepentingan pendidikan (orang tua, masyarakat, dunia kerja, pemerintah) dalam peranan dan kepentingannya masing-masing memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Mutu disebut pula sebagai definisi kualitas menurut produsen. Kualitas ini dicapai bilamana produk atau jasa memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu prosedur yang konsisten. Kualitas didemonstrasikan oleh produsen dalam sebuah sistem yang dikenal sebagai sistem jaminan kualitas, yang memungkinkan produksi yang konsisten dari produk dan jasa untuk memenuhi standar atau spesifikasi tertentu. Bilamana produk atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi spesifikasi atau standar/kriteria yang telah ditetapkan. Mutu pendidikan merupakan suatu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pihak sekolah dalam menciptakan anak didik yang berkualitas. Sekolah dapat dikatakan bermutu apabila di dalam sekolah tersebut terdapat proses pembelajaran yang baik, serta mempunyai lembaga atau badan-badan

sekolah yang mampu menangani dan bertanggung jawab atas hasil belajar anak didiknya. Menurut Zahid (2014: 669), mutu pendidikan merupakan konsep multidimensi meliputi kelembagaan, pengajaran dan hasil belajar siswa. Makna peningkatan mutu pendidikan yaitu bukan hanya dapat menyekolahkan anak untuk menimba ilmu pengetahuan saja, melainkan juga dapat mengembangkan pengetahuan anak secara komprehensif.

Peningkatan mutu pendidikan juga dapat memberikan harapan bagi siswa guna mendapat kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Menurut Edward Sallis (dalam Jasuri, 2014: 15) mengatakan, total quality management (TQM) adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan para pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang.

b. Pendokumentasian Hasil Pembelajaran

Pendokumentasian secara sistematis dimaksudkan agar apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera ditemukan. Untuk itu perlu dibuatkan pola klasifikasinya. Menurut Syamsi (2000: 119) agar pada klasifikasi dapat berjalan efektif maka diperlukan persyaratan antara lain: (1) Pola klasifikasi itu harus tertulis, (2) Penggolongan masalah serta rinciannya harus sesuai dengan bidang kegiatan unit-unit organisasinya, (3) Golongan masalah dan rinciannya harus disusun secara logis, kronologis, dan sistematis, (4) Rincian klasifikasi tidak perlu terlalu terurai: cukup tiga tingkatan saja yaitu subjek utama, subjek dan

subjek, (5) Istilah-istilah untuk masalah (*subject heading*) singkat tetapi mampu memberikan pengertian luas, mudah digunakan secara teknis ilmiah, (6) Dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan tentang arti dan ruang lingkup masing-masing subjek, (7) Dilengkapi dengan kode (tanda) baik huruf maupun angka, (8) Bentuk dan susunan pola hendaknya sederhana dan luwes (fleksibel), dan (9) Dilengkapi dengan indeks subjek-subjek yang disusun secara *alphabetic*, sesuai dengan ketentuannya

Pengamanan Arsip dari segi fisiknya menurut Syamsi (2000: 134) yaitu:

(1) Restorasi arsip, maksudnya memperbaiki arsip yang telah rusak dan sulit digunakan. Dengan demikian agar dapat digunakan lagi dalam jangka waktu yang lebih lama, kemudian, (2) Laminasi arsip, dengan menggunakan plastik agar tidak mudah rusak, kena air, dikoyak binatang kecil dll, serta (3) *Microfilm/ CD* dimaksudkan arsip penting/vital yang sulit di restorasi dan dilaminasi, diatasi dengan menyimpannya dalam CD.

Kecepatan penemuan arsip di Diknas masih kurang efektif dikarenakan cara penyimpanan data yang tidak efektif. Menurut Syamsi (2000: 135) Kecepatan penemuan arsip yang baik adalah satu menit arsip dapat diketemukan. Dalam praktek mungkin waktu penemuan kembali arsip dapat diperlonggar lebih dari satu menit.”

Kebijakan peningkatan rasio pendidik dan penyebaran pendidik, kebijakan peningkatan kualitas pendidik belum diimplementasikan secara optimal karena data tentang daftar keadaan guru masih semrawut, sehingga dalam membuat

dan mengambil keputusan sifatnya tanpa perencanaan yang matang karena tidak didukung oleh tersedianya data yang akurat berkaitan dengan kebijakan tersebut. Komputer adalah media penyimpanan data yang sangat efektif. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Syamsi (2000:137) bahwa salah satu kemampuan komputer adalah menyimpan data dan memperoleh kembali serta memperbaiki data. Jadi komputer mempunyai kelebihan kemampuan dalam memproses data sampai jutaan data (tergantung dari kapabilitas komputernya). Akan tetapi *computerize minded* belum meluas dikalangan aparat, sehingga komputer yang ada pada saat ini di Diknas sangat terbatas fungsinya yaitu hanya meng-*entry* data pokok yang sifatnya statis, belum memanfaatkan program aplikasi untuk penyimpanan data secara optimal.

Penyimpanan data hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga informasi dapat dengan mudah digunakan oleh siapapun pihak pengguna informasi yaitu masyarakat pada umumnya dan *stakeholder* pendidikan pada khususnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka disimpulkan masing-masing fokus, indikator, dan prediktor sebagai berikut:

1. Deskripsi konten pendidikan anak usia dini, yang diukur oleh dua indikator, sebagai berikut: (a) Kurikulum pembelajaran, implementasi peraturan perundang-undangan PAUD untuk anak masih sangat terbatas, terutama karena kurangnya kesadaran orang tua dalam mendidik anak yang sesuai dengan usia dan peraturan yang berlaku. dan (b) Lingkup materi pembelajaran, pengembangan kurikulum pendidikan Taman Kanak-Kanak dilakukan dengan memperhatikan landasan, prinsip, dan pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan multikultural..
2. Realitas proses pendidikan anak usia dini, yang diukur oleh dua indikator: (a) Persiapan pembelajaran, dinilai sesuai prediktor: (i) Komunikasi pembelajaran, komunikasi yang dilakukan dalam proses implementasi kebijakan program PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Selayar belum sepenuhnya berjalan baik, efektif dan maksimal. Sehingga masih diperlukan agenda sosialisasi pada masyarakat atau lembaga PAUD agar kedepannya mereka lebih mengetahui dan memahami implementasi kebijakan tentang program PAUD yang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, (ii) Sumber daya, standar kualifikasi pendidikan, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, PAUD belum memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi guru sesuai kriteria Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, (iii) Sikap pelaksana, respon positif dari pihak Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Selayar, pihak Pengelola PAUD yang dimonitoring, maka disarankan agar komitmen yang tinggi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan, namun masih perlu diikuti dengan memaksimalkan agenda sosialisasi, dan (iv) Struktur birokrasi, implementasi kebijakan program PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Selayar belum sepenuhnya berjalan efektif dan maksimal. dan, (b) Implementasi program pembelajaran, belum terlaksana dengan baik, efektif dan maksimal. Hal ini dapat dilihat kurangnya partisipasi atau kepedulian pemerintah daerah terhadap PAUD.

3. Evaluasi hasil pendidikan anak usia dini, diukur oleh dua indikator: (a) Peningkatan mutu pembelajaran, dinilai sesuai prediktor: (i) Pengelolaan kelas, belum signifikan yang dibuktikan dengan kurang penguasaan materi pelajaran oleh siswa dan kurang mampu mempraktekkannya ketika proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sedang berlangsung, (ii) Penggunaan media dan sumber belajar, siswa sangat antusias dan fokus ketika guru menggunakan media ajar, dan guru juga mencoba mempraktekkan supaya siswa lebih tertarik. Oleh sebab itu, penggunaan media sangat membantu guru untuk menarik siswa untuk lebih fokus dan aktif dalam belajar. (iii) Penggunaan metode pembelajaran, cara memotivasi siswa dan

adanya tantangan atau kompetisi untuk lebih aktif yaitu dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa. Sehingga siswa akan berebut untuk menjawab, walau demikian bobot pertanyaan harus selalu dijaga dengan maksud untuk memancing anak dalam menjawab pertanyaan atau soal test, dan (iv) Penilaian hasil pembelajaran yaitu secara objektif dan transparan, dan (b) Pendokumentasi hasil pembelajaran, umumnya TK Selayar belum memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan fasilitas *Information and Communi-cation Technology* (ICT) untuk proses penyelenggaraan pendidikan.

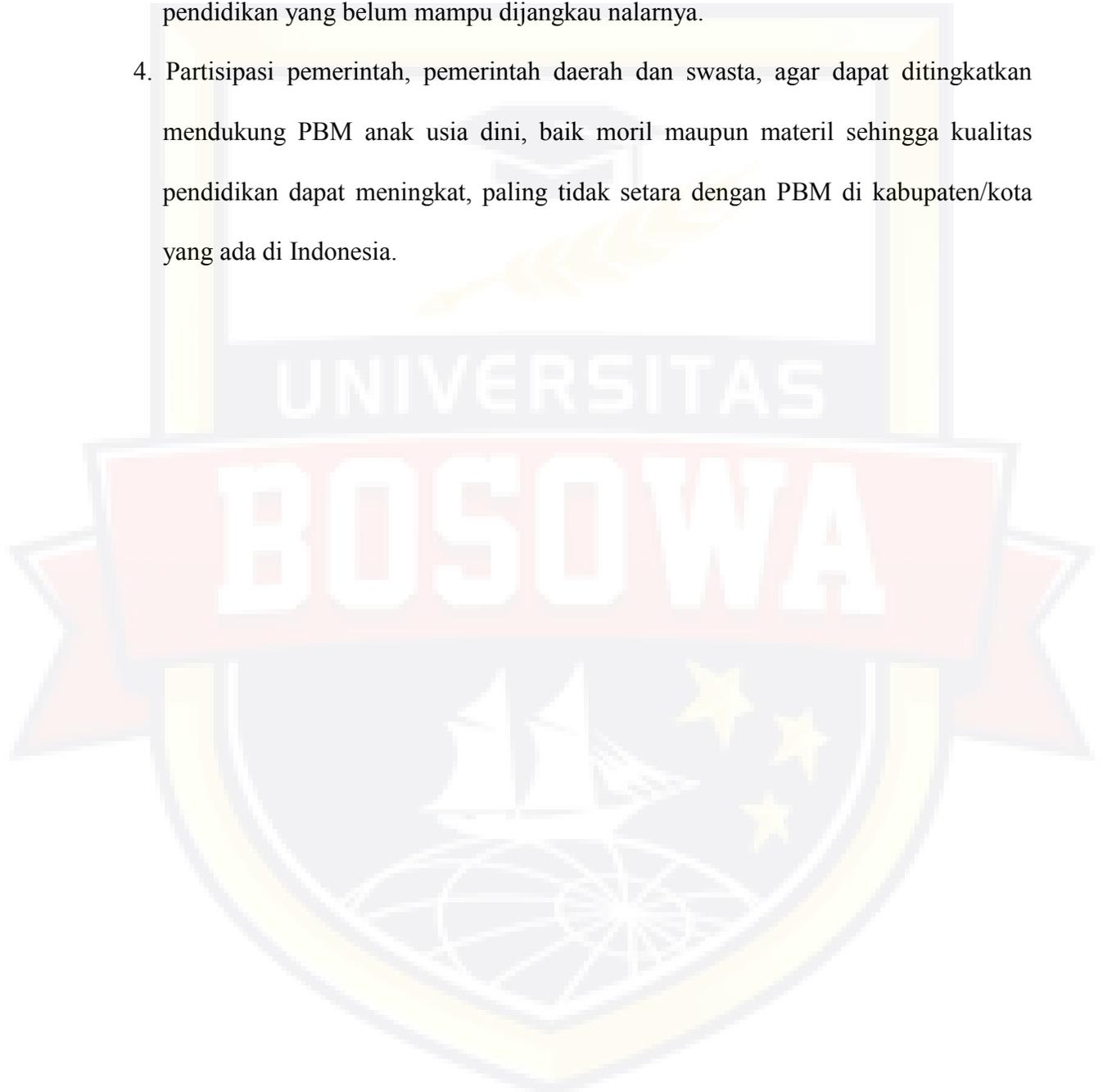
B. Saran-Saran

Atas dasar kesimpulan hasil penelitian di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dikemukakan empat rekomendasi, sebagai berikut:

1. Konten pendidikan lalu lintas anak usia dini, harus memadukan materi ajar tradisional dengan modern. Tujuannya adalah materi ajar tradisional dimaknai sebagai upaya agar murid tidak melupakan sejarah perkembangan pendidikan, sedangkan materi pelajaran teknologi modern diharapkan agar murid tidak memiliki keterbatasan memahami dan mengapli-kasikannya.
2. Proses pendidikan lalu lintas anak usia dini sebaiknya dilakukan sesuai SOP dengan menyesuaikan perkembangan usia anak didik agar mereka memiliki kemampuan memahami dan mempraktekkannya melalui play group.
3. Evaluasi hasil pendidikan lalu lintas anak usia dini diupayakan lebih kooperatif melihat keterbatasan fasilitas agar tidak terjadi kurangnya motivasi pendidik

menurun dalam PBM dan peserta didik tidak merasa terpaksa mengikuti pendidikan yang belum mampu dijangkau nalarnya.

4. Partisipasi pemerintah, pemerintah daerah dan swasta, agar dapat ditingkatkan mendukung PBM anak usia dini, baik moril maupun materil sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat, paling tidak setara dengan PBM di kabupaten/kota yang ada di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aar. 2015. http://www.kompasiana.com/analathifah/kelebihan-dan-kekuranganhomeschooling_5528a5f76ea834025e8b45b9. Diakses pada tanggal 23 desember 2015.
- Abdullah, M.N. 2014. *Pragmatisme: Sebuah Tinjauan Sejarah Intelektual Amerika*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Agustino Leo, 2006. Politik dan Kebijakan Publik. APII Bandung Bekerjasama dengan Puslit KP2W Lemlit Unpad. Bandung.
- Agustino, Leo. 2007. *Publik Dalam Aneka Perspektif*. Online. (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/30/0801.htm>). Diakses. tanggal 17 November 2012.
- Anderson, James E., 1990. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 2and ed.
- Atmasista, Romli. 2005. *Teori dan Kapita Selekt KRIMINOLOGI*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 127.
- Birkland, Thomas. A. 2001. *Introduction To The Policy Process, Concepts, And Models Of Public Policy Marking*. New York: M.E.
- Burhanuddin, 2013. *Supervisi Pendidikan dan Pengajaran*, Malang: Rosindo.
- Cecil, R.E. 2011. *Penegak Hukum Lalu Lintas*. Bandung : Nuansa Cendikia
- Claessens, Luce, Jan van Tartwijk, Helena Pennings, Anna van der Want, Nico Verloop, Perry den Brok, Theo Wubbels. 2016. *Beginning And Experienced Secondary School Teachers' Self- And Student Schema In Positive And Problematic Teacher -Student Relationships*. Procedia Social and Behavioral Sciences. Leiden University, The Netherlands. (Journal on line).
- Darajat, Zakiah. 2012. *Landasan-Landasan Pendidikan dan Pembelajaran*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Dede Rosyadah, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Perdana Media, Jakarta, 2003.
- Denhard, Janet P, Denhard Robert B. 2007. *The New Public Service, Serving Not Steering*. M.E. Sharpe, Inc. New York, 2007.
- Dunn, William. N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Erwan Agus Purwanto)*. Gajah mada University Press.
- Dwiyanto, Agus, 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dye, Thomas R. 1998. *Understanding Public Policy*. New Jersey USA: Prentice Hall.

- Exter, A.P. den (et.al), *Internasional Health Law: Solidarity in Justice and Health Care*, Maklu, Antwerpen, 2008.
- Fadillah, 2014. *Implementasi Kurikulum 2013: Dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, & SMA/MA*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.
- Freddy Tengker, *Hak Pasien*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Fredrickson, George, 2003. *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco: Jossey Bass.
- Hazlitt, Henry, 2003, *Dasar-dasar Moralitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Huda, Miftahul. 2013. *Model-model Pengajaran dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Islamy, M Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kansil, C.S.T. dkk, 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, P.T. Rineka cipta, Jakarta.
- Keban, Yeremias. T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media
- Kunarto, 2004, *Prilaku Organisasi Polri*, Jakarta : Citra Manunggal.
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta:
- Mahfud, Choirul. 2014. *Pendidikan Multikultural* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, M. B., Huberman, M., dan Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Muhajir, Noeng, 2015 *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Rake Sarasin Edisi/ Cetakan: Ed. 5.
- Muhammad, Joko Susilo. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustopadidjaja, AR,. 2003. *Reformasi Birokrasi, Perwujudan Good Governance, dan Pembangunan Masyarakat Madani*. Jakarta: Silaknas ICMI.
- Nugroho, D. Riant. 2006. *Kebijakan Publik; Untuk Negara-Negara Berkembang, Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*, (Cet. Pertama). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurwahidah, 2017. <http://makassar.tribunnews.com/2017/12/18/periode-januari-desember-118-kasus-kecelakaan-di-selayar-penyebabnya-didominasi-ini>.
- Osborne, David dan Gaebler, Ted. 2000. *Mewirauahakan Birokrasi*, Jakarta; Pustaka Binaman Pressindo.
- Osborne, David dan Plastrik, Peter. (2000). *Memangkas Birokrasi*. Jakarta: PPM.

- Peterson, S.A. 2003. *Public Policy*. Dalam *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*. Diedit oleh Jack Rabin. New York: N. Y.: Marcel Dekker.
- Sasmita, Raharjo Adi dan Sakti Adji, 2011. Adisasmita, *Manajemen Transportasi Darat Mengatasi Kemacetan di Kota Besar (Jakarta)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 12.
- Simon, Herbert A. 1984. *Administrative Behavior: Perilaku Administrasi, Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi*. Terjemahan St. Dianjung. Jakarta: Bina Aksara.
- . 2005. *Public Administration: Third Printing*. New Brunswick and London: Transaction Publishers.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suyitno, Y. 2009. *Landsan Filosofi Pendidikan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Taylor, Frederick. W. 1947. *Scientific Management*. New York: Harper.
- Trianto, 2010. *Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Waldo, Dwight. 2004. *The Study of Public Administration*, terjemahan oleh Slamet W. Admosoedarmo. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin. 2003. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wikipedia. 2008. *Pelayanan Publik*, (Online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan-publik>.) Diakses. tanggal 6 Oktober 2012.
- Willoughby, William. 1927. *Principles of Administration*, Political Science Quarterly,
- Winarno. 2013. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Regulasi**
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Penerapan Pendekatan Beyond Centers and Circle Time (BCCT) Pendekatan sentra dan Saat Lingkaran dalam Pendidikan Anak Usia Dini* Jakarta:
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006 Direktorat Anak Usia Dini, *Acuan Menu Pada Kelompok Bermain* Jakarta:
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002
<http://www.nickir.co/parenting/activityfinder/game/index.html>

Permendikbud RI Nomor 57 Tahun 2014 *Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Kemendikbud.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 *Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud.

